

PRABOWO

DAN TANTANGAN PENYELESAIAN

KONFLIK PAPUA

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PRABOWO

DAN TANTANGAN PENYELESAIAN

KONFLIK PAPUA

Kumpulan Esai-esai Sejarah, Politik,
dan Hak Asasi Manusia

DR. SOCRATEZ YOMAN

Pustaka Larasan
2024

**PRABOWO DAN TANTANGAN
PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA**
Kumpulan Esai-esai Sejarah, Politik, Hak Asasi Manusia

Penulis
Socratez Yoman

Editor
Aletho

Pracetak
Slamat Trisila

Rancang Sampul
Lintang

Penerbit
Pustaka Larasan
(Anggota IKAPI)
Jalan Tunggul Ametung IIIA No. 11B
Denpasar, Bali - 80116
Ponsel: 0817353433
Pos-el: pustaka.larasan@gmail.com
Laman: www.pustakalarasan.com

Cetakan Pertama
2024

ISBN 978-623-XXXX-XX-X

KATA PENGANTAR

Dr. Adriana Elisabeth

(Jaringan Damai Papua)

Pemilihan presiden 2024 di Indonesia telah menginspirasi Pendeta Yoman untuk kembali menuliskan pengalaman dan pespektifnya mengenai proses politik dan dinamika Papua dihubungkan dengan kemenangan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dalam kontestasi politik nasional. Secara resmi, Presiden Kedelapan Republik Indonesia akan dilantik pada 20 Oktober 2024 menggantikan Presiden Joko Widodo.

Menurut Pendeta Yoman, Prabowo Subianto adalah seorang pemimpin yang berbudi luhur dan jujur. Namun demikian, terdapat tantangan kemanusiaan yang akan dihadapinya termasuk bagaimana menyelesaikan akar konflik di Papua yang telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun. Persoalan-persoalan yang belum dapat diselesaikan seperti perbedaan sudut pandang mengenai proses integrasi dan hasilnya, dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagai dampak langsung dari konflik bersenjata menjadi hambatan dalam mewujudkan Papua Tanah Damai yang bebas dari kekerasan.

Bukan hanya persoalan di masa lalu yang belum selesai (*unresolved problems*), masalah-masalah pembangunan Papua di bawah Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) juga menjadi sorotannya, karena alih-alih memberikan pemerataan hasil-hasil pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua atau Orang Asli

Papua (OAP), kebijakan negara di bidang pembangunan kerap menimbulkan perdebatan baru. Penyebab utamanya antara lain karena perbedaan pemahaman dan penentuan prioritas program yang lebih banyak ditentukan menurut kepentingan pemerintah pusat dari pada daerah, terutama di sektor-sektor prioritas yang mencakup pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Apalagi saat ini Papua memiliki enam provinsi yang tidak sama kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungannya.

Berdasarkan daftar masalah yang bersumber dari masa lalu maupun yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan dan keamanan di Papua, maka Pendeta Yoman menaruh harapan pada kepemimpinan Prabowo Subianto agar kondisi Papua menjadi lebih baik, demokratis, dan bermartabat. Latar belakang militer yang dimiliki Prabowo Subianto merupakan bekal dalam mengambil keputusan yang tegas dalam bersikap, namun proses pengambilan keputusan perlu dilandasi pemahaman yang menyeluruh mengenai realita di Papua yang tidak tunggal. Sebagai contoh, konflik bersenjata tidak terjadi di seluruh wilayah Papua, namun jenis konfliknya bukan hanya mengenai separatisme, namun juga terdapat konflik di sektor sumber daya alam seperti di sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Selain juga terdapat potensi konflik komunal yang dipicu oleh faktor internal dan eksternal.

Dengan kata lain, selain kebaikan budi, kejujuran, dan ketegasan, pemimpin di masa depan memerlukan kemampuan dalam hal '*problem solving, communication skills, dan critical thinking*'. Dengan demikian, keputusan

politik dan ekonomi bagi Papua tidak lagi bersifat biner, bukan berputar pada belanja masalah, namun perlu diatasi dengan cara-cara yang lebih komunikatif dan dialogis, setara dan transparan.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada Pendeta Yoman atas karya terbaru ini. Semoga para pembaca mendapatkan pengetahuan baru dari seorang penulis Papua, baik selaku gembala, maupun intelektual. Hormat!

Depok, 8 September 2024

Dr. Adriana Elisabeth
(Jaringan Damai Papua)

PENGANTAR PENULIS

Kepada Presiden Prabowo Subianto:

Buku ini akan menjadi seperti panduan untuk melihat akar konflik Papua secara utuh. Tentu, sebagai Presiden, Anda telah diberikan otoritas dan tanggungjawab untuk menjaga konstitusi dan keutuhan nasional. Namun, otoritas itu juga bisa dipergunakan untuk mengakhiri kejahatan kemanusiaan dan penyelesaian konflik secara damai di Tanah Papua.

Banyak jalan untuk melawan kejahatan negara, pelanggaran HAM berat, ketidakadilan, rasisme, genocide, marginalisasi, kapitalisme, kolonialisme, atau dominasi pendatang. Salah satunya, dengan menulis buku dan juga mau membangun jembatan atau komunikasi dengan pihak yang berbeda ideologi-nasionalisme. Saya berdiri dalam posisi ini. Saya bukan pada posisi dukung mendukung. Saya berdiri pada keyakinan saya, yaitu kita boleh berbeda secara ideologis dan nasionalisme, tapi kita bersahabat atau bersaudara dalam kemanusiaan untuk mencari jalan penyelesaian akar konflik Papua dengan jalan adil, damai, terhormat, bermartabat dan manusiawi.

Dalam keyakinan ini, saya mau menggambarkan secara singkat alasan yang menjadi pijakan dan pedoman saya menulis buku yang diberi judul *Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua*. Bahwa, buku ini bukanlah suatu buku tentang sosok khusus, apalagi biografi tentang Prabowo, melainkan karakter kepemimpinan dan rekam jejaknya masa lalu yang mempengaruhi kepemimpinannya, khususnya dalam penyelesaian konflik Papua.

Kebanyakan orang telah terbangun opini, mindset dan persepsi negatif terhadap Prabowo Subianto, yang memang benar adanya dari rekam jejak dan fakta tentang

keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia. Namun, belakangan, terutama proses pemilihan presiden tahun 2024, Prabowo menunjukkan karakternya yang jujur dalam perkataan dan mulia dalam motivasi memimpin negeri ini.

Saya tahu dan sadar, banyak pembaca yang tidak akan menerima dan mengkritik buku ini, baik secara tidak langsung dan langsung kepada saya. Berbagai bentuk penilaian, opini, pendapat, komentar dan kritik pasti mengalir deras yang bermuara kepada saya dengan analisa-analisa masing-masing sesuai daya nalar, daya tanggap dan persepsi masing-masing.

Kemungkinan juga ada orang yang akan memunculkan komentar dan pendapat bernada pesimis dan kecewa, bahwa Gembala Yoman terjebak dalam kata-kata manis dari Prabowo Subianto. Atau, Gembala Yoman tidak kritis, menutup mata, hati, pikiran dan mendukung orang yang punya rekam jejak buruk, yaitu pelaku pelanggaran HAM berat.

Saya dengan terbuka menyambut dan menerima dari seluruh bentuk kritik, saran, ejekan, penghinaan, penolakan atas buku ini. Tetapi, saya memiliki pijakan, pedoman, dan pertimbangan, sehingga saya mengambil keputusan iman dan moral untuk menulis buku ini. Saya juga didukung dari banyak sahabat, salah satu pesan seorang pendeta ketika saya menuliskan ini, begini, "...biarkan saja. Saya percaya kakak. Bahwa ada bagian yang kakak sedang perjuangkan tetapi orang belum lihat sehingga mereka bingung."

Seluruh isi buku ini dengan jelas tercermin pesan utama mengenai benang merah akar konflik yang dipersoalkan oleh rakyat dan bangsa Papua Barat yang

oleh penguasa Indonesia dinilai dan dianggap sebagai gerakan separatis dan makar karena memperjuangkan hak-haknya sebagai bangsa untuk menentukan nasib sendiri, setelah melewati proses 'dekolonisasi' yang tidak berjalan dengan benar ketika melakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969.

Buku ini menekankan paling tidak tiga hal penting. Pertama, pernyataan-pernyataan Prabowo Subianto yang diungkapkannya merupakan suatu cermin bagi keluhuran budi dan karakternya yang jujur itu menjadi harapan, doa. Itu ibarat cahaya, pintu, jendela dan jembatan untuk mengarah kepada penyelesaian akar konflik Papua.

Kedua, buku ini menggambarkan sebagian besar akar konflik yang dipersoalkan rakyat dan bangsa Papua Barat dari waktu ke waktu, dengan pengorbanan nyawa, harta benda, dan segala-galanya sejak 1 Desember 1961 sampai sekarang.

Ketiga, seluruh buku ini berisikan akar konflik yang dihindari dan dihilangkan oleh penguasa Indonesia selama ini. Dengan demikian, apakah Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia mengikuti jejak kegelapan seperti yang diwariskan para pemimpin pendahulunya? Harganya jelas, yaitu keluhuran budi dan karakter jujur dan tegak lurus Prabowo Subianto menjadi harapan menyalakan cahaya harapan kehidupan rakyat dan bangsa Papua Barat.

Pokok-pokok persoalan yang dihadapi bangsa Papua Barat sejak dulu sudah merupakan masalah yang berdimensi internasional, yang meliputi beragam isu: ketidakadilan, distorsi sejarah, diskriminasi rasial, operasi militer, kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, genosida, ecosida, dominasi migran dan marginalisasi penduduk pribumi atau orang asli Papua.

Buku ini saya baktikan sebagai sebuah pemikiran alternatif dan perspektif baru untuk mencari jalan penyelesaian akar konflik dan persoalan kemanusiaan di Tanah Papua Barat yang sudah berlangsung selama enam dekade lebih, sejak 19 Desember 1961 sampai sekarang ini. Saya mencoba membangun jembatan dan komunikasi dengan presiden Indonesia terpilih dengan persepsi yang tegak lurus dengan menyajikan pokok-pokok masalah yang selama ini dihindari oleh penguasa Indonesia.

Sekali lagi, buku ini bagian yang tak terpisahkan dengan doa, harapan dan cita-cita luhur saya untuk mendukung dan memperkuat penyelesaian berdasarkan empat akar masalah Papua yang dikaji dan dihasilkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sekarang berubah namanya menjadi BRIN.

Buku ini dihadirkan di hadapan para pembaca dan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak berada dalam cara-cara dan metode lama dalam memahami permasalahan akar konflik di Tanah Papua. Buku ini semoga bisa mendorong munculnya pendekatan baru dan alternatif baru dalam mengakhiri kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua, dari Sorong hingga Merauke.

Saya mengucapkan terima kasih kepada para pembaca sekalian. Selamat membaca.

Ita Wakhu Purom, 13 September 2024
Penulis

Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman

DAFTAR ISI




KATA PENGANTAR	iii
PENGANTAR PENULIS	vi

BAGIAN I

PRABOWO DAN PROSPEK PAPUA	1
1. Mencatat Janji Prabowo untuk Papua	2
2. Menguji Kepemimpinan Prabowo: Arah Situasi Papua ke Depan	7
3. Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua	13





BAGIAN II

SEJARAH DAN AKAR KONFLIK	21
4. Sejarah Pemerintahan dan Negara Papua Barat Itu Benar-Benar Ada	22
5. Akar Konflik Papua: Sengketa Pepera 1969	27
6. Menggugat Pelaksanaan Pepera di Sidang Umum PBB	37
7. Pelaksanaan Pepera Tidak Demokratis: Diwarnai Intimidasi dan Mobilisasi Kekuatan Militer	44
8. Tanpa Wakil West Papua, Amerika, Belanda, dan Indonesia Berunding: Tipu-tipu Pernjanjian New York	59

9. Cerita Anak-Cucu Pejuang Pepera: Menceritakan 'Kebenaran'?  65
10. Kesejahteraan Bukan Akar Konflik  71
11. Ideologi Papua Merdeka yang Tetap Hidup  76






BAGIAN III


KEKERASAN DAN MILITERISME 81

12. Tanah Papua di Bawah Kontrol Militer  82
13. Kekerasan Militer: Wajah Buruk Negara di Papua  92
14. Gereja Pun Menjadi Korban Kekerasan Militer  99
15. Seruan Gereja Untuk Selesaikan Konflik Papua: Konsisten Suarakan Dialog Pemerintah dan ULM-WP  108

BAGIAN IV



KOLONIALISME MODERN: OTONOMI KHUSUS, RASISME DAN MARJINALISASI 115

16. Kolonialisme Beririsan dengan Rasisme dan Stigma  116
17. Rasisme dan Ketidakadilan Bertumbuh Subur  120
18. Mengapa Tak Belajar dari Gus Dur?  127
19. Luka Rasisme yang Tak Disembuhkan  134
20. Otonomi Khusus Lahir karena Tuntutan Merdeka bukan Kesejahteraan  137

21. Marjinalisasi Masyarakat asli Papua: Praktik Kolonialisme Baru  144

BAGIAN V

WARISAN JOKOWI: PEMBANGUNAN VS. ESKALASI KONFLIK 149

22. Sembilan Dosa Politik Joko Widodo Terhadap Bangsa Papua Barat.  150
23. Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke Papua: Apa yang Dilakukan dan Mengapa Masalah Konflik dan Hak Asasi Manusia Tak Diselesaikan  160

BAGIAN VI

PENUTUP 175

24. Penutup  176

DAFTAR PUSTAKA 179

BAGIAN I

**PRABOWO
DAN PROSPEK PAPUA**

BAB 1

Mencatat Janji Politik Prabowo untuk Papua

Indonesia telah mempunyai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan pada bulan Oktober 2024. Pasangan pemenang Pilpres pada 14 Februari 2024 lalu telah memberikan atensi terhadap Papua.

Saya ingat, sebelum pemilihan presiden, pernah memprediksi kemenangan pasangan ini, sebelum pemilihan umum berlangsung. Dan, presiden dan wakil presiden terpilih ini yang akan mempengaruhi bagaimana masalah Papua ke depan. Pada saat kampanye Pilpres 2024 lalu, masalah Papua menjadi isu krusial yang dibicarakan dan dibahas oleh kandidat dan tim pemenangan masing-masing pasangan, termasuk Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pantaslah dicatat di sini janji pasangan pemenang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 terhadap masalah Papua, terutama isu penyelesaian konflik dan hak asasi manusia (HAM). Beberapa hal dinyatakan oleh Prabowo saat itu adalah penegakan hukum, memperkuat aparat-aparat (keamanan) di Papua, dan mempercepat pembangunan ekonomi.

Perhatian khusus soal eskalasi konflik Papua, yang ditanyakan oleh panelis saat debat kandidat presiden, Prabowo menguraikan pikiran dan pandangannya, untuk menanggapi kekerasan dan konflik yang terus meningkat serta persoalan keadilan dan hak asasi manusia di Papua tak juga terselesaikan.

Situasi konflik di Papua, menurut Prabowo, menjadi masalah rumit karena ada gerakan separatis yang ada pihak tertentu, atau campur tangan asing yang menginginkan negara Indonesia terpecah belah atau disintegrasi. Dalam kacamata Prabowo, kelompok separatis bersenjata telah menyerang dan menyorot masyarakat, perempuan dan anak-anak. “Untuk itu, memang masalah HAM itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan. Dan di antaranya juga kita harus lindungi rakyat Papua,” kata Prabowo, saat itu, seperti dikutip *Antara* (12/12/2023).

Dari pemahaman itu, Prabowo mengajukan langkah pendekatan menghadapi situasi konflik di Papua, melalui penegakan hukum dan penguatan aparat-aparat keamanan. Dalam debat capres itu, ia mengatakan, demikian dikutip *Antara*, “Jadi rencana saya pertama adalah tentunya penegakan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ (di Papua), dan juga mempercepat pembangunan ekonomi.”

Pendekatan ‘penegakan hukum’ dan ‘penguatan aparat keamanan’ menjadi kata kunci atau benang merah yang menjadi rujukan Pemerintahan Prabowo dalam menyelesaikan masalah konflik di Tanah Papua. Penegasan janji politik itu ia ungkapkan juga ketika berdialog dengan organisasi masyarakat keagamaan Muhammadiyah.

Ia mengatakan pada dialog terbuka itu, seperti dikutip *DetikJatim* (24/11/2023) berikut, “Pendekatan hukum, kita tentunya ingin pendekatan yang soft (halus), sekarang pendekatan dengan penyelesaian politik yang damai.”

Pendekatan Prabowo itu dilakukan melalui cara damai, seperti akan melakukan diskusi maupun dialog dengan kelompok-kelompok di Papua. Bahkan, ia sempat mengungkapkan ketika menjadi presiden akan menggunakan haknya memberikan amnesti kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

“Silahkan tutup buku, tanggalkan senjata mu, kembali ke masyarakat. Amnesti kalau perlu, tapi ini haknya presiden, saya belum presiden jadi belum amnesti, siapa tahu nanti saya bisa,” demikian pertanyaan Prabowo.

Pernyataan janji politiknya dalam menyelesaikan konflik Papua yang berlangsung sejak 1960-an itu, merujuk pada pendekatan Pemerintah Indonesia saat menangani konflik bersenjata di Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang melakukan perlawanan dan memperjuangkan Tanah Aceh sebagai bangsa merdeka dan berdaulat. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla Aceh terselesaikan melalui perundingan yang melahirkan Perjanjian Helsinki pada 2005.

Namun, situasi di Aceh itu juga dipengaruhi kuat dengan bencana alam tsunami di Aceh, yang memakan ribuan korban rakyat Aceh dan melumpuhkan daratannya. “Tapi kita sudah buktikan di Aceh, sekarang kita damai. Saya yakin kelompok teroris itu, separatis, mereka itu sedikit, kita sudah hitung kok,” demikian ungkapan Prabowo.

Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih, yang didukung oleh Presiden Joko Widodo, ia akan melanjutkan pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi Papua, seperti yang dilakukan pendahulunya itu. Pada dua periode memimpin, Joko Widodo melakukan pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah pegunungan dan pedalaman Papua yang sulit diakses dengan transportasi umum.

Pendekatan kesejahteraan atau pembangunan itu diharapkan bisa meredam tuntutan kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Tetapi pada kenyataannya, eskalasi konflik itu tak kunjung berhenti. Bahkan, beberapa kejadian, konflik bersenjata pejuang kemerdekaan terjadi di area-area yang menjadi proyek pembangunan ekonomi.

Sebagaimana janji politik Prabowo untuk menyelesaikan masalah konflik di Papua, situasi tersebut tak mengkoreksi kenyataan di atas, bahwa pembangunan ekonomi merupakan cara pendekatan dalam penyelesaian konflik. “Mempercepat pembangunan ekonomi”, sebagaimana dinyatakan Prabowo dalam kampanye-kampanye saat Pilpres, tampaknya mengulang-ulang pendekatan presiden Jokowi, yang juga pernah berkomitmen, bahwa pembangunan menjadi cara dalam penyelesaian masalah konflik di Papua. Namun, pendekatan pembangunan tidak juga mengurangi eskalasi konflik di Papua.

Berikut janji Prabowo Subianto itu diungkapkannya (*Antara*, 12/12/2023), “Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan. Kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, *service* yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris,

dan menjamin penegakan HAM.”

Janji politik pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang telah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 – bakal dilantik bulan Oktober 2024, menjadi catatan penting nasib Papua semasa kepemimpinannya dalam lima tahun ke depan. Bahasa janji politik pasangan ini, dengan presiden sebelumnya, masih beririsan, namun kepemimpinannya tidak bisa disamakan, presiden dengan latar belakang sipil dengan latar belakang kuat militer, yang turut mempengaruhi perjalanan menangani permasalahan Papua ke depan.

BAB 2

Memahami Karakter Kepemimpinan Prabowo: Arah dan Harapan Papua ke Depan

Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden dalam Pemilihan Umum 2024 telah membuka lembaran baru bagi sosoknya untuk mempengaruhi arah Papua dalam lima tahun ke depan. Perilaku dan kebijakan Prabowo pantas mendapatkan perhatian karena akan mempengaruhi arah situasi dan harapan perubahan bagi masyarakat atau rakyat asli Papua.

Dalam bagiantulisan ini saya tidak akan menuliskan biografi Prabowo Subianto, namun sebelum menuliskan karakter dan latar belakang kepemimpinannya, saya coba tulis latar singkat tentang dirinya.

Prabowo lahir dari keluarga elite dan intelek di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Ayahnya Soemitro Djojohadikusumo, dikenal sebagai Begawan Ekonomi dan kakeknya, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, anggota BPUPKI, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua DPA pertama. Jadi baik kakeknya maupun ayahnya adalah bangsawan dan cendekiawan.

Letnan Jenderal TNI H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karier militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik dan pemerintahan.

Prabowo Subianto dikenal suka berbicara apa adanya, blak-blakan, kadang bersuara keras dan muncul nada bicara dengan letupan-letupan. Saat tampil bicara di panggung, tak jarang melontarkan balasan kritik dan singgungan kepada 'lawan politik' ataupun para kritikus, di bidang politik dan ekonomi, juga soal kepemimpinannya.

Misalnya, sosoknya yang sering dikaitkan dengan keluarga dan kroni dari mantan presiden Soeharto, yang dikenal otoriter, melakukan kejahatan hak asasi manusia, dan bisnis keluarga Cendana pada masa Orde Baru. Ketiga hal tersebut: Rezim Soeharto, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, kroni atau oligarki Orde Baru, merupakan 'amunisi' bagi lawan politiknya untuk melemahkan dan menjatuhkannya.

Dalam konteks masalah konflik Papua, Prabowo Subianto – semasa menjadi pimpinan militer, dikenal sosoknya yang membawa trauma bagi rakyat Papua ketika melakukan operasi militer yang memakan korban dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh rakyat Papua. Ia dianggap punya 'jejak berdarah' di Tanah Papua pada masa operasi militer 1990-an.

Prabowo Subianto dikenal suka berbicara apa adanya, orang berbudi luhur, berkarakter jujur dan yang suka berbicara apa adanya, ia tentu akan dilawan oleh lawan-lawan politiknya dari berbagai alasan. Sepertinya contoh ada kaitan dengan keuarga alm. Suharto mantan Presiden kedua RI, pelanggaran HAM berat dan dikait-kaitan dengan bisnis dan lain-lain.

Namanya politik, kepentingan menjadi kompas atau arah perjuangan. Tak jarang, kepentingan menjadi yang utama, bahkan tak peduli menabrak etika dan

moral. Segala cara, baik yang wajar dan tidak wajar selalu digunakan untuk menjatuhkan lawan-lawannya agar tujuan dan cita-citanya tercapai.

Dalam setiap Pemilu, rekam jejak selalu diungkap, tak terkecuali saat ia terlibat dalam peristiwa penculikan aktivis 1998, operasi militer di Papua. Rekam jejak kandidat lain pun juga disorot atau diungkap ke publik. Dan, rekam jejak Prabowo dimunculkan kembali saat Pilpres 2024, namun hal itu tidak mempengaruhi secara signifikan kepada rakyat untuk memilihnya.

Saya mengatakan, bahwa para kandidat juga tidak semuanya 'bersih' atau 'kotor'. Sehingga, rekam jejak Prabowo dan karakter, sikap, perilakunya, telah menegaskan motivasi untuk menjadi presiden untuk kepentingan bangsa dan negara. Karakter bicara yang apa adanya ini dan motivasinya yang positif itu, telah memberi kesempatan memimpin dan mewujudkan cita-citanya.

Kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, saya taruh sikap respek untuk memimpin, dan terutama keinginan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan damai. Bagi bangsa Papua, sikap tersebut sangat relevan bagi kami yang terus memperjuangkan hak-hak kami sebagai rakyat Papua, yang masih jauh dari kenyataan situasi yang adil, sejahtera, dan damai.

Pada 2 Agustus 2023 lalu, saya menulis perspektif dalam artikel "Prabowo Subianto Pemimpin Berbudi Luhur, Berkarakter Jujur dan Tidak Munafik dalam Menyampaikan Isi Hati dan Pikirannya Kepada Publik".

Saya menulis bahwa saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin seperti B.J. Habibie: cendekiawan, ilmuwan, dan teknokrat yang berwawasan luas, dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur: pemikir, cendekiawan, tokoh pluralis, moderat.

Lalu, bagaimana dengan sosok Prabowo Subianto? Menurut saya, Prabowo itu seperti Jenderal Sudirman yang dikenal jujur, berbudi luhur, dan rendah hati bagi bangsa Indonesia. Hal ini yang paling tidak terlihat dari ucapan atau pernyataan di depan publik, saat jelang pemilihan presiden 2024. “Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Saya bukan orang yang suka menjilat, saya bukan apa yang namanya memuji-muji orang tanpa alasan...”

Mengenai kejujuran dan kesetiaan kepada rakyat, ia menyatakan, demikian: “Kita harus beretik jujur! Apa yang dikatakan itu ada di hati kita. Jangan lain dimulut dan lain di hati. Kejujuran dan kesetiaan kepada rakyat itu hal fundamental”.

Lalu, dalam sebuah momen dialog, Prabowo diminta untuk berefleksi, dan ia mengungkapkannya berikut: “Saya pernah hidup di tengah orang Eropa. Saya ingat, saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dbilang bangsa monyet, ini, itu. Prabowo *your people live on trees*. Saya sekolah di beberapa Negara selalu mereka bilang begitu, rakyatmu tinggal di pohon”. Hal yang ungkapkan dari pengalamannya itu ia ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dihormati martabatnya.

Dari apa yang ditunjukkan oleh Prabowo Subianto, sebagai penulis dan kritikus, saya memahami karakter-

karakternya dalam perspetif yang barangkali berbeda dari persepsi umum. Saya ingin mengungkapkan cara pandang berbeda dalam melihat karakter kepemimpinan yang ditunjukkan dari sosok Prabowo Subianto.

Saya sebagai orang Kristen yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, saya berkewajiban membangun relasi atau solidaritas dan menghormati dengan siapa pun tanpa mengorbankan iman saya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mengasihi Allahmu dan sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini iman saya. Iman orang Kristen yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri” (Matius 22:37-39).

Saya tidak bisa mengisolasi atau memenjarakan diri dalam iman, keyakinan ideologi dan nasionalisme saya dalam dunia realitas yang terus bergerak maju dengan hitungan detik. Dunia sekarang terus berubah, sehingga kita juga harus berubah dengan cara pandang kita dalam melihat dan menilai dinamika realitas saat ini.

Kalau kita berada seperti katak dalam tempurung, kita berada dalam kehilangan harapan hidup dan tanpa masa depan. Kita seperti berada dalam kematian. Kita harus keluar dari tempurung yang mematikan kita.

Kita berhak melihat dan menikmati matahari terbit dan terbenam. Kita berhak melihat terang bulan dan bintang-bintang di malam hari. Kita berhak menikmati udara yang segar dan sehat yang diberikan oleh Tuhan Allah.

Dunia ini bukan milik sekelompok orang. Dunia ini bukan milik Indonesia. Dunia bukan milik orang penguasa. Dunia bukan milik orang kaya. Dunia ini milik kita semua. Kita harus bebas dan merdeka dalam semangat solidaritas.

Kita butuh kawan, teman, sahabat untuk berdiri bersama-sama berjuang untuk keadilan, martabat kemanusiaan, kesamaan derajat, kebebasan, menegakkan kebenaran.

Kita boleh berbeda iman, ideologi dan nasionalisme, tapi kita tidak boleh mengorbankan kemanusiaan, kita memelihara dan merawat dalam nilai kemanusiaan untuk menciptakan dunia yang harmoni dan perdamaian permanen untuk kebaikan semua umat manusia.

Saya tidak ada kepentingan dengan Jenderal (purn. TNI) Prabowo Subianto dan tidak pernah ada komunikasi personal. Saya mengikuti dan mempelajari dari apa yang disampaikannya Prabowo terlihat jujur dari hatinya dan apa adanya dan tidak dipoles-poles.

Tentu, Prabowo Subianto bukan manusia sempurna, ia sebagai manusia mempunyai masa lalu yang buruk yang terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat sebagai seorang prajurit yang harus melaksanakan perintah atasan dan negara.

Tentu saja, ada yang tidak setuju dengan tulisan saya ini. Mari, kita melihat sesama manusia secara utuh, supaya kita tidak melihat dari sebagian sisi buruknya dan itu bisa merusak sebagian kebaikan dan nilai-nilai keluhuran yang ada dalam diri mereka. Sehingga, kita bisa menaruh harapan bagi arah dan masa depan Papua dengan lebih baik.*)

BAB 3

Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua

Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadapi tantangan permasalahan konflik di Tanah Air yang panjang dan hingga hari ini belum terselesaikan, yaitu konflik Papua. Sejak reformasi 1998 telah berganti presiden, dari era B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, tidak mampu menyelesaikan konflik Papua.

Tentu, masing-masing presiden pernah berjanji dan berikhtiar menyelesaikan konflik Papua, atau menciptakan Papua sebagai tanah yang damai, namun hal itu tidak diwujudkan. Meskipun, masing-masing presiden punya gaya kepemimpinan dan pendekatan menyikapi permasalahan konflik Papua, yang menuntut keadilan, kedamaian, dan penentuan nasib sendiri.

Penyelesaian konflik Papua Barat, dimana rakyat Papua Barat menuntut dan memperjuangkan kemerdekaan, telah diakomodir dengan pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua pada 2001, yang saat itu menjadi *bargaining position*, antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua yang menuntut kemerdekaan dan .

Namun, pelaksanaan UU Otsus Papua itu pun juga tidak berjalan baik, bahkan persoalan krusial atau utama seperti pelurusan sejarah, pembentukan Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka pencarian kebenaran terhadap berbagai kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia berat sama sekali tidak disentuh atau diabaikan.

Kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat terhadap wilayah Papua Barat juga tidak mampu memenuhi tuntutan keadilan dan membebaskan bangsa Papua Barat dari masalah kemiskinan, bahkan yang terjadi kebijakan-kebijakan itu menyingkirkan dan mendiskriminasi orang-orang asli Papua, dan menjadi minoritas di tanahnya sendiri.

Puluhan tahun rakyat Papua hidup dalam kekecewaan, yang disertai dengan membesarnya gerakan perlawanan dan perjuangan rakyat Papua menuntut dihargainya martabat sebagai manusia hingga tuntutan penentuan nasib sendiri, karena Negara tidak mengakui dan mendengarkan berbagai aspirasi rakyat Papua, termasuk untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Pada Oktober 2024 ini, Indonesia mempunyai pemimpin baru, yaitu Prabowo Subianto sebagai presiden dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Kedua pemimpin itu akan menggantikan Presiden Joko Widodo, dan wakilnya Mah'ruf Amin, yang sempat memberikan 'setitik' harapan menyelesaikan berbagai persoalan hak asasi manusia dan konflik yang terjadi di Tanah Papua, yang tidak diwujudkan hingga masa kepemimpinannya berakhir.

Konflik Papua yang dinamis hingga hari ini menjadi tantangan bagi presiden baru, Prabowo Subianto. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, Prabowo punya catatan khusus dengan konflik di Papua, semasa bertugas sebagai panglima militer pada 1990-an. Bagi rakyat

Papua, ia dikenal punya catatan buruk semasa bertugas di Papua, terutama terkait kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Kini, Prabowo Subianto yang telah ditetapkan sebagai presiden terpilih dalam Pilpres 2024, yang ke depan mendapatkan mandat kekuasaan menjalankan roda pemerintahan dan negara, termasuk menghadapi berbagai dinamika dan tantangan konflik yang terjadi di Tanah Papua. Bagaimana latar belakang kemiliterannya dan rekam jeaknya terhadap masalah hak asasi manusia itu akan mempengaruhi situasi (penyelesaian) konflik Papua?

Melalui tulisan ini, saya ingin mengajak pembaca untuk melihat Prabowo Subianto secara utuh dan jernih. Rekam jejak Prabowo pada masa lalu, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM berat, tidak dikesampingkan, namun juga membuka peluang bagi sosok Prabowo sebagai presiden terpilih yang telah menyatakan komitmennya dalam melakukan penegakan hukum dan penyelesaian konflik Papua secara damai.

Bagi saya sisi gelap Prabowo dalam persoalan hak asasi manusia, yang telah memberikan persepsi negatif bisa menjadi penghalang bila berbagai pihak hanya berhenti dalam pandangan itu. Padahal saat ini pandangan dan pemikiran segar, tidak mempertebal rasa dendam dan benci – tanpa menghilangkan fakta-fakta masa lalunya, dibutuhkan untuk menghadirkan inisiasi-inisiasi dan membangun jembatan-jembatan komunikasi bagi terjadinya dialog antara Pemerintah Indonesia yang dipimpin Prabowo Subianto dengan rakyat dan bangsa Papua di bawah payung perjuangan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua).

Syarat utama penyelesaian akar konflik Papua adalah masing-masing pihak harus membebaskan atau memerdekakan diri dari perasaan dendam, benci, sakit hati, dan belenggu trauma masa lalu. Bagian ini tidak mudah dilakukan, namun saya percaya kita bisa melakukannya. Bagi kita, rakyat Papua, belenggu itu pada gilirannya akan 'membunuh' potensi, talenta, dan kekuatan yang ada dalam diri rakyat dan bangsa Papua untuk memperjuangkan martabat kemanusiaan dan hak hakiki politik sebagai sebuah bangsa.

Kita bisa belajar banyak dari adagium seperti ini yang telah berlaku di masyarakat umum, yaitu orang sakit tidak biasa menolong orang sakit. Hanya orang sehat yang selalu menolong orang-orang sakit. Begitu pun dengan orang-orang yang berada dalam penjara kebencian dan dendam, mereka tidak akan pernah membebaskan diri dari bangsa yang menindasnya.

Dari perspektif ini saya percaya bahwa bagi orang-orang yang mau bersahabat dengan jujur dan tulus kepada musuh atau lawan saja yang menyelesaikan persoalan-persoalan sulit dengan semangat kesetaraan, saling percaya dan saling menghormati. Jalan ke arah itu, harus dirintis dalam persepsi dan paradigma baru dengan standar nilai kejujuran, kebenaran, keadilan dan kasih serta kedamaian.

Dalam semangat itu, saya berusaha membuka jalan dengan pendekatan perspektif iman Kristiani: Kasihilah Allahmu, kasihilah sesama, dan kasihilah musuhmu.

Saya menulis apa yang saya tahu dan lihat untuk keseimbangan, dengan prinsip tidak akan dan tidak pernah mengorbankan atau menggadaikan iman, ideologi, nasionalisme, dan martabat kemanusiaan saya

untuk uang, jabatan atau pun kedudukan.

Melalui buku-buku tentang fakta-fakta sejarah yang telah saya tulis, berharap bisa menjadi bekal dan gambaran bagi Prabowo Subianto sebagai presiden untuk bisa melihat dan memahami akar persoalan konflik Papua dengan persepsi dan perspektif berbasis data, kajian ilmiah, yang obyektif, benar, jujur dan adil.

Kalau ada dukungan fakta-fakta, maka keyakinan saya bahwa Prabowo Subianto dengan keluhuran budi dan karakter yang jujur dapat menyelesaikan akar konflik Papua Barat secara jujur, benar, adil dan bermartabat. Walaupun, keyakinan saya ini belum tentu benar dan belum tentu juga menjadi kenyataan. Namun demikian, saya berusaha, karena Tuhan selalu memberkati dan membuka jalan bagi setiap orang yang berjuang dengan tujuan-tujuan mulia untuk kehormatan martabat kemanusiaan.

Kebanyakan, dengan persepsi masa lalunya, orang bersikap skeptis tentang kepemimpinan Prabowo Subianto untuk penyelesaian akar konflik Papua Barat. Dalam keadaan sikap yang kaku dan pesimisme seperti itu, saya mencoba memberikan pemikiran optimis kepada kepemimpinan pemerintah Indonesia di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto, dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka.

Pertanyaan saya, apakah Presiden RI terpilih yang saya nilai berbudi luhur dan berkarakter jujur ini tetap memelihara akar konflik Papua Barat yang sudah seperti luka membusuk ini?

Kita harus membangun jembatan baru dan kalau sudah ada jembatan lama, jangan kita bakar jembatannya, tapi kita merawat jembatan itu supaya kita

bisa melewatinya sehingga tetap menjadi penghubung dan bertemu, sehingga bisa mulai berkomunikasi dan membicarakan masalah yang terjadi.

Bagi saya, ditolak atau diterima itu nomor yang paling terakhir, tapi mulailah bersuara dari bisikan hati nurani. Berbicara dari hati ke hati. Hindari watak berpura-pura dan munafik. Jangan kita korbankan orang banyak dengan watak penjilat dan tunduk-tunduk.

Mari, kita berbicara *face to face* dituntun nurani suci dan mulia, dengan menempatkan kita masing-masing sebagai manusia yang setara dan sederajat. Planet bumi ini milik kita bersama, semestinya tidak ada yang harus ditakuti, karena kita sama-sama menerima cahaya matahari, bulan dan bintang-bintang. Kita harus mengakhiri semua ketidakadilan dan kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan di Tanah Papua.

Pada bagian ini, saya ingin menyampaikan kepada Prabowo Subianto bahwa alasan-alasan atau dasar-dasar rakyat dan bangsa Papua Barat melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Republik Indonesia selama ini secara tertulis dalam bentuk buku. Dengan misi utama para penguasa jangan berpura-berpura, bersilat lidah dan menghindar dari akar konflik yang sesungguhnya.

Saya juga ingin menyampaikan kepada Prabowo Subianto bahwa kami rakyat dan bangsa Papua Barat cukup lama menderita. Sejak 19 Desember 1961 sampai sekarang, kami merasakan dan mengalami bahwa kami dijajah, dibantai, dimusnahkan, diperbudak, dimiskinkan, disingkirkan, dimarginalkan dari Tanah leluhur kami

secara sistematis, masif, meluas, oleh sistem kekuasaan pemerintah Indonesia yang rasialis – kami pandang selama ini sebagai bangsa kolonial firaun modern.

Rakyat dan bangsa Papua Barat sebaiknya tidak menutup mata bahwa sekarang ini Prabowo Subianto sudah terpilih menjadi Presiden RI ke-8 dan pasti dan jelas, negara-negara merdeka dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mendukung dan mendengarkan dia. Jadi dalam posisi seperti ini rakyat dan bangsa Papua Barat, terutama para pejuang Papua Barat merdeka yang berada pada posisi dilematis perlu bekerja keras.

Saya tidak berada dalam kotak berpikir atau persepsi sebagian besar atau mayoritas orang yang mendiskreditkan Prabowo Subianto sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan. Saya mau memulai merintis jalan atau membangun jembatan kepercayaan (*the trust brige*) untuk duduk berdialog dengan Prabowo Subianto yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 dalam upaya untuk penyelesaian akar konflik Papua Barat.

Saya memahami bahwa akar konflik Papua Barat seperti persoalan ketidakadilan, martabat kemanusiaan, hak asasi manusia, rasisme, kesamaan derajat, distorsi sejarah, status politik, rasisme, marjinalisasi, genocide, dan dominasi kaum pendatang merupakan tantangan kemanusiaan dan nilai-nilai universal yang berdimensi internasional tersebut harus disikapi. Misalnya, mendorong pelaksanaan UU Otsus No.21 Tahun 2001 Pasal 46 yang menjamin “Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk melakukan klarifikasi sejarah Papua... merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi”.

Banyak jalan yang sesungguhnya telah disiapkan

untuk menyelesaikan akar konflik di Papua ini yang terhenti. Dalam konteks inilah, saya mengungkapkan bahwa kita harus memulai dengan paradigma, perspektif dan persepsi baru dalam melihat konflik Papua Barat yang sudah kronis atau menahun ini.

Apabila kita ingin membangun dialog, baik rakyat dan bangsa Papua maupun Pemerintah Indonesia, kita harus berusaha melawan sifat, watak, hati yang berpura-pura, munafik, perasaan dendam, benci kepada pihak-pihak lain yang berupaya menyelesaikan akar konflik Papua ini. Kita harus mendudukannya dalam suatu motivasi yang benar, murni, jujur dan terbuka. Karena, apa yang kita bicarakan dan putuskan tentang nasib dan masa depan manusia, terutama rakyat dan bangsa Papua Barat. *)

BAGIAN II

SEJARAH DAN AKAR KONFLIK

BAB 4

Sejarah Pemerintahan dan Negara Papua Barat Itu Benar-Benar Ada

Kebanyakan orang belum mengerti proses politik yang terjadi dalam sejarah kemerdekaan dan pembentukan Negara Papua Barat, yang benar-benar ada dan diakui, yang dideklarasikan saat itu pada 1 Desember 1961. Fakta sejarah itu dikuburkan atau dihilangkan, terutama oleh proses Pepera 1969 yang cacat hukum – yang dianggap sudah final oleh Pemerintah Indonesia, namun terus dipertanyakan legitimasinya oleh rakyat dan bangsa Papua.

Apakah ada bukti dan fakta sejarah proses kemerdekaan rakyat dan bangsa Papua Barat 1 Desember 1961 dan sejarah terbentuknya negara Papua Barat? Atau, apakah pemerintahan dan negara Papua Barat itu benar-benar ada?

Mari kita telusuri dari lembaga yang bernama Dewan Nieuw Guinea atau Nieuw Guinea Rad – parlemennya Nieuw Guinea – wilayah yang kelak disebut Papua. Pada 5 April 1961, orang-orang terdidik yang terpilih dari





Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea) menjadi anggota Parlemen Pertama penduduk orang asli West Nieuw Guinea (Papua Barat) yang bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kemerdekaan penuh.

Pada 19 Oktober 1961 Nieuw Guinea Raad, yang diinisiasi oleh Jouwe, Bonay, Tanggahma, dan Torey menggelar pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 80 'kaum Papoea asli', yang kemudian dikenal sebagai Kongres Nasional I Papua Barat di Gedung Nieuw Guinea Raad di Hollandia, menyepakati suatu Manifest (Manifesto), yang menetapkan simbol-simbol sebuah negara, yaitu bernama Negara Papua Barat; nama Nieuw Guinea menjadi Papua Barat, lagu kebangsaan: "Hai Tanahku Papua", bendera nasional Papua Barat "Bintang Kejora", dan sebutan nama bangsa menjadi Papua.

Manifest itu juga menyampaikan kehendak rakyat Nieuw Guinea (Papua Barat) agar sejak tanggal 1 November 1961 untuk mengibarkan bendera Papua di samping bendera Nederland, menyanyikan lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" di samping Wilhemus.

Adanya manifesto itu, kemudian Pemerintahan

Kerajaan Belanda menerbitkan *Governmentstblad van Nederland Nieuw Guinea* tahun 1961, tertanggal 18 November 1961 Nomor 68 mengenai Bendera Negeri berdasarkan Nomor Register 362 dan 366 tentang Bendera, dan *Governmentstblad Nieuw Guinea* tahun 1961 Nomor 69 mengenai Lagu Kebangsaan Negeri (Yoman, 27).

Proses pendirian pemerintahan dan negara tersebut kemudian menyolidkan para pemimpin, tokoh-tokoh, dan rakyat Papua bersama-sama menyerukan sebuah Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember 1961, yang juga telah disaksikan oleh delegasi pemerintah dari kelima negara merdeka yang hadir saat itu, yaitu: Inggris, Prancis, Australia, Belanda, dan perwakilan Parlemen Papua New Guinea.

Sebagai sebuah negara dan pemerintahan yang berdiri, Papua Barat memiliki perangkat atau syarat-syarat 'administratif' untuk berdirinya sebuah pemerintahan dan negara, sebagaimana ditetapkan berikut ini:

- Anggota parlemen nasional: New Guinea Raad.
- Bendera kebangsaan: Bintang Kejora.
- Lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua.
- Wilayah: Papua.
- Nama: Negara Papua Barat.
- Mata uang: Gulden.
- Lambang, Burung Mambruk.
- Semboyan: One Soul, One People.



Pada 6 Juli 2024 lalu, saya menerima pesan pendek dari seorang Geolog Papua Jon Nassey yang juga menjadi saksi sejarah dalam peristiwa deklarasi kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember 1961. Pesan itu penting juga untuk disampaikan di sini, berikut saya kutipkan:

Saya adalah saksi hari Kemerdekaan Papua Barat 1/12/1961 yang masih hidup dan saya pada tanggal 1/7/2024 genap berumur 75 Tahun. Halleluyah Amin.

Saya waktu itu berumur 12 tahun, dan sekolah di JVVS - ZNHN kota Fak Fak, dan saya bersama 3 rekan sekolah lainnya ditugaskan untuk mengibarkan bendera Papua Barat di samping bendera Kerajaan Belanda.

Selanjutnya saya dan 11 anak sekolah JVVS / LSB lainnya telah masuk daftar untuk melanjutkan pendidikan ke Negeri Belanda tapi dibatalkan.

Akhirnya saya dari Fak Fak pindah ke Sorong pada tahun 1962 dan sekolah di PMS - ZNHN di Remu Sorong.

Dari kesaksian Jon Nassey, peristiwa pengibaran bendera Papua Barat bersama dengan bendera Kerajaan Belanda, merupakan suatu pengakuan sejarah tentang kemerdekaan Papua Barat.





Pada suatu saat, saya menerima kesaksian dari saksi sejarah lain, yaitu Piet Maturbongs. Kepada saya, ia mengatakan begini: “Waktu itu pada 1 Desember 1961 semua pelajar yang bersekolah di Jayapura hadir untuk menyaksikan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora berdampingan dengan bendera Belanda di depan (gedung) sekarang disebut Loka Budaya di Lapangan Imbi.”

Kemudian Piet menambahkan keterangan nama perwakilan atau delegasi dari Dewan Perwakilan Rakyat yang telah dibentuk, dikenal dengan Nieuw Guinea Raad, dari wilayah Paniai, namanya Dr. Lubert Van de Berg OFM dan Karel Gobay. Keduanya telah wafat.

Kesaksian di atas potongan kecil dari catatan panjang sejarah deklarasi kemerdekaan Papua Barat dan pembentukan pemerintahan dan negara Papua Barat telah memperkuat peristiwa penting yang telah dideklarasikan oleh para *foundhing fathers* negara dan bangsa Papua Barat. (*)

BAB 5

Akar Konflik Papua: Sengketa Pepera 1969

Sejarah membuktikan bahwa sebuah kekuasaan pemerintahan yang dibangun atas dasar kejahatan, kekerasan dan kebohongan, ketidakbenaran, ketidakadilan, yang merendahkan martabat kemanusiaan, ia tidak pernah bertahan lama. Ia selalu runtuh hancur, berantakan, dan tinggal dalam kenangan sejarah. Apakah Papua akan bernasib begitu ke depan?

Pertanyaan demikian memandu penulis dalam merefleksikan perjalanan konflik Papua yang belum juga selesai hingga saat ini, karena akar persoalan konflik itu sendiri yang diabaikan dan tidak muncul dari pihak negara untuk menyentuh, bahkan menyelesaikan persoalan sejarah pengintegrasian West Papua ke Indonesia.

Proses pengintegrasian West Papua ke dalam wilayah Indonesia dengan proses yang benar, adil, jujur dan itu memang benar-benar pilihan dari hati nurani sejatinya menjadi jalan bermartabat dan beradab, sehingga dihormati oleh para pihak. Namun, proses pengintegrasian, yang dilakukan melalui Pepera justeru terungkap dilakukan secara tak bermartabat, banyak manipulasi, intimidasi, dan rekayasa – tak sesuai prinsip-prinsip jajak pendapat menurut ketentuan internasional PBB, ‘one man one vote’ – ‘satu orang satu suara’.

Proses pengintegrasian yang bermasalah tersebut menyebabkan kami, orang asli Papua bersikap tidak mengakui hasil Pepera tersebut, apalagi menghormatinya, karena telah menduduki tanah leluhur kami secara tak bermartabat.

Lebih baik kita berjuang untuk menegakkan nilai kebenaran dan keadilan demi martabat bangsa kami. Bukan masalah menang dan kalah, tetapi kejahatan dan ketidakadilan kolonial Indonesia yang merendahkan martabat bangsa Papua harus dilawan dan diakhiri dengan perjuangan menyatakan fakta sejarah dan realitas hidup yang orang-orang Papua yang menderita dan jadi korban kejahatan kemanusiaan.

Situasi masyarakat Papua yang berada dalam ketakutan, jadi korban kekerasan dan konflik, akibat sejarah pengintegrasian yang tidak benar, maka dalam proses memperjuangkan martabat (dignity) rakyat dan bangsa West Papua tidak dengan cara mengemis dan tunduk kepada penguasa kolonial modern Indonesia. Kami bangsa Papua, sejak dulu, berdaulat dan terhormat di atas tanah leluhur kami.

Proses kolonialisme yang tidak selesai di Tanah Papua menjadi sejarah kelam. Ketika Papua – saat itu West New Guinea (Irian Barat) melewati zaman dekolonisasi, dimana proses politik memberikan kesempatan bangsa Papua menentukan nasib sendiri sebagai wilayah yang berpemerintahan independen. Namun, dekolonisasi Papua melalui jalan berliku: dari Konferensi Meja Bundar, Perjanjian New York, dan Perjanjian Roma, yang disepakati dengan jalan 'self determination' berujung pada proses yang politik non-self determination.

Act free choice atau jajak pendapat yang didesain non-interven, gagal dilakukan. Jajak pendapat, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, atas pengawasan PBB, didesain dengan rekayasa, menggunakan kekuatan koersif dari militer dan aparatus sipil.

Implementasi pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 yang tak pernah melibatkan orang asli Papua kini terus digugat. Dua perjanjian internasional yang dibuat oleh Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat, yang berisi keputusan penting mengenai hak politik penduduk asli Papua justru diberangus atau disingkirkan, melalui proses-proses negosiasi dan diplomasi yang tak melibatkan rakyat Papua, atau tokoh-tokoh pemimpin Papua saat itu.

Ketidakjujuran di tubuh bangsa Indonesia dimulai sejak dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Perjanjian itu tak melibatkan rakyat atau penduduk orang asli Papua. Tiga bangsa dan negara penandatanganinya, Amerika Serikat, Belanda, Indonesia, itu berkongsi bahkan berkonspirasi.

Perjanjian yang dikenal dengan New York Agreement itu memiliki empat tujuan. Pertama, perjanjian ini untuk mengakhiri pertengkaran antara pemerintah Belanda dengan Indonesia tentang status politik dan masa depan rakyat dan bangsa Papua Barat.

Konflik antara Belanda dan Indonesia mengenai Papua Barat mencuat dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (The Haque) pada 27 Desember 1949. Belanda tidak memasukkan hak politik Papua Barat ke dalam wilayah Indonesia.

Dalam buku BPUPKI & PPKI (1998) diungkapkan bahwa Belanda memutuskan untuk tidak menyerahkan kedaulatan Papua Barat ke dalam Republik Indonesia. Dan hal itu sesungguhnya dimengerti oleh Wakil Presiden RI Drs. Mohammad Hatta. "Secara pribadi ingin saya nyatakan bahwa bagi saya masalah Irian Barat tidak perlu dipersoalkan. Saya tahu bahwa Bangsa Papua pun berhak menjadi bangsa yang merdeka."

Tujuan kedua dari New York Agreement untuk kepentingan membendung perkembangan komunisme di kawasan Asia Pasifik. Menurut pengamat politik Cipta Lesmana, seperti dipublikasikan di *Media Indonesia*, 30 November 2000, halaman 4, masalah Papua Barat akan memperuncing konfrontasi Amerika Serikat dan Uni Soviet.

"Pemerintah Kennedy semula menentang matimatian pengembalian Papua Barat ke pangkuan RI. Soekarno kemudian berpaling kepada Nikolai Krushchev pemimpin Uni Soviet, setelah dengan jelas mengetahui sikap Washington. Perlengkapan militer canggih senilai satu milyar dollar Amerika, termasuk kapal selam, segera mengalir ke Jakarta dari Moskow. ...Kennedy rupanya khawatir masalah Irian Barat dapat berbuntut pada pecahnya kembali konfrontasi langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Daripada Indonesia sepenuhnya jatuh ke pangkuan Soviet, lebih baik Soekarno dijinakkan. Tekanan Amerika itu yang tampak membuat Belanda akhirnya mengalah, merelakan solusi Irian Barat diserahkan sepenuhnya kepada PBB."

Dalam surat rahasia Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy (Surat John F. Kennedy, Secret, 2 April 1962), Amerikat Serikat menyiapkan bantuan yang diperlukan PBB pada saat rakyat Papua melaksanakan penentuan nasib sendiri. "Dalam keadaan seperti ini serta didorong

oleh tanggung jawab kami untuk kebebasan dunia (non-komunis), saya mendesak dengan sangat, agar pemerintah Belanda menerima rumusan yang telah disampaikan kepada wakil Anda oleh Tuan Bunker.” Dalam surat yang sama, John F. Kennedy menegaskan kepada Dr. J.E. de Quay, “Kami tentunya akan menekan Pemerintah Indonesia sekuatnya, agar menyetujui pembicaraan-pembicaraan lanjutan atas dasar rumusan tersebut di atas.”

Tujuan ketiga pada Perjanjian New York adalah kepentingan Amerika Serikat untuk menguasai emas di Papua. Kepentingan ekonomi Amerika Serikat terbukti dengan disepakati kontrak karya penambangan emas di Papua selama 30 tahun yang ditandatangani pada 7 April 1967, antara Indonesia dengan Freeport (Amerika Serikat) setelah Soeharto dilantik pada 12 Maret 1967 sebagai pejabat presiden. Ambisi Amerika Serikat untuk merampok dan menguasai tambang emas di Namangkawi, Mimika (Tembagapura) itu terjadi dengan begitu cepat. Kontrak karya itu dibuat hanya dalam waktu 42 hari setelah Suharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Kesepakatan Amerika Serikat dan Indonesia pada 7 April 1967 itu bertolak belakang dengan pelaksanaan Pepera pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969. Artinya, sebelum Papua Barat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan moncong senjata, kontrak karya penambangan emas di Papua dilakukan dua negara, Amerika Serikat dan Indonesia. Bisa dikatakan keduanya melakukan pendudukan dan penjajahan atas Papua Barat.

Perjanjian New York 15 Agustus 1962 terdiri dari 29 Pasal yang terdiri dari tiga bagian penting. Bagian pertama mengenai transfer administrasi dari Belanda kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disebut UNTEA (United Nations Temporary Executive Administration) yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 11.

Bagian kedua tentang transfer administrasi dari PBB (UNTEA) kepada Indonesia yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13. Lalu, bagian ketiga mengenai penentuan nasib sendiri (*self determination*) orang asli Papua yang diatur pada 9 Pasal dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 22.

Tujuan utama New York Agreement 15 Agustus 1962 ialah penyelesaian persengketaan antara Indonesia dan Belanda atas status politik bangsa West Papua dan diberikannya kesempatan kepada orang asli Papua untuk penentuan nasib sendiri di atas tanah dan negeri leluhur mereka atas pengawasan PBB. Tetapi, setelah penulis menyelidiki dan mengkritisi dengan saksama New York Agreement yang terdiri dari 29 Pasal tersebut, ternyata New York Agreement (NYA) dibuat untuk kepentingan penyerahan pemerintahan dari Belanda kepada Indonesia bukan untuk kepentingan penentuan nasib sendiri OAP (Orang Asli Papua).

Satu lagi perjanjian yang krusial bagi sejarah bangsa Papua, yang masih terkait dengan New York Agreement, adalah Perjanjian Roma yang ditandatangani pada 30 September 1962. Perjanjian ini juga menyepakati penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Ada beberapa poin atau isi dari Perjanjian Roma:

1. Penundaan atau bahkan pembatalan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969.
2. Indonesia menduduki Papua Barat selama 25 tahun

terhitung 1 Mei 1963 (sampai tahun 1988).

3. Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 adalah dengan sistem lokal Indonesia “musyawarah” untuk “mufakat.”
4. Laporan akhir tentang hasil-hasil pelaksanaan Plebisit tahun 1969 kepada Sidang Umum PBB agar diterima tanpa sanggahan terbuka.
5. Pihak Amerika Serikat bertanggungjawab menamakan modalnya pada sejumlah BUMN di bidang eksploitasi SDA Papua Barat.
6. Amerika Serikat menunjang Pembangunan Papua Barat selama 25 tahun melalui jaminan kepada Bank Pembangunan Asia sebesar USD 30 Juta.
7. Amerika Serikat menjamin pendanaan Program Transmigrasi Indonesia ke Papua Barat melalui Bank Dunia.

Mari lihat lebih kritis lagi hal yang termuat dalam perjanjian itu dari pasal ke pasal. Saya mulai dengan pertanyaan pertama, mengapa Pasal 2 ditetapkan penyerahan wilayah Papua dari Belanda kepada UNTEA (PBB) dan selanjutnya dari UNTEA menyerahkan kepada Indonesia? Pada 1 Oktober 1962 Pemerintah Belanda menyerahkan Papua kepada UNTEA. Selanjutnya, pada 1 Mei 1963 UNTEA serahkan Papua kepada Indonesia hanya berselang 6 bulan. Yang sebenarnya ialah UNTEA harus berada di Papua selama 6 tahun dalam mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib sendiri OAP pada 1969.

Lalu pertanyaan kedua, mengapa Pasal 7 dan 13 disetujui menggunakan kekuatan militer Indonesia di Papua sebelum OAP memilih menjadi bagian sah wilayah Indonesia melalui Pepera 1969? Keterlibatan Militer

Indonesia juga diakui oleh Sintong Panjaitan (2009:169) bahwa “Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka.”

Hal tersebut merupakan kesalahan fatal yang dilakukan Belanda dan Indonesia serta Amerika Serikat, yaitu penyerahan Papua kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Seharusnya, keamanan dari UNTEA mengawasi wilayah Papua selama 6 tahun sejak 1963 sampai pelaksanaan Pepera 1969.

Pertanyaan ketiga, bagaimana UNTEA (PBB) mensosialisasikan kepada OAP sesuai dengan New York Agreement Pasal 10 tentang penyerahan pemerintahan dari UNTEA kepada Indonesia? Ada tiga alasan. Pertama, PBB telah terlibat dalam konspirasi politik untuk mengabaikan hak penentuan nasib sendiri Orang Asli Papua dalam NYA. Kedua, UNTEA mempunyai waktu sangat terbatas, anggota UNTEA dikurangi oleh Indonesia, dan sementara jangkauan wilayah geografis yang sangat luas sehingga wewenang dan pengawasan anggota UNTEA sangat terbatas. Ketiga, pemerintah Indonesia benar-benar dan serius menghalang-halangi pekerjaan UNTEA di Papua Barat.

Lalu, keempat, mengapa Pasal 12 dalam perjanjian itu ditetapkan PBB/UNTEA akan menyerahkan semua atau sebagian bahkan disebut penyerahan kembali pemerintah penuh di Papua kepada Indonesia? Ini berlawanan karena Orang Asli Papua (OAP) belum menyatakan pilihan untuk bergabung dengan Indonesia sesuai dengan New York Agreement Pasal 18 butir D tentang “Penentuan nasib sendiri orang-orang Papua

sesuai praktek internasional.” Kenyataannya, UNTEA menggabungkan wilayah Papua ke dalam wilayah Indonesia sebelum Pepera 1969.

Pertanyaan keenam, mengapa Pasal 14 dari perjanjian itu disetujui untuk dilaksanakan Undang-undang dan peraturan-peraturan Indonesia di Papua sebelum Papua dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia melalui Pepera 1969? PBB, Amerika Serikat, dan Belanda bersama-sama dengan Indonesia memasukkan Papua ke dalam wilayah Indonesia sebelum Pepera 1969. Tindakan itu merupakan kesalahan fatal karena orang Asli Papua tidak pernah terlibat dalam proses pembuatan New York Agreement.

Terakhir, apakah pemerintah Indonesia sungguh-sungguh melaksanakan perjanjian pada Pasal 15 tentang pendidikan dan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di Papua melalui Dana United Nations for the Development of West Irian (FUNDWI) sebesar 30 milyar dollar (US\$30 million) yang disumbangkan Belanda sebagai tanda perpisahan dengan rakyat Papua?

Jose Rolz-Bennet, Sekretaris Jenderal PBB pada 1967 datang ke Jakarta dan berkunjung ke West Irian untuk melihat pembangunan dan persiapan penentuan nasib sendiri orang asli Papua. Jose menyatakan pemerintah Indonesia menghalangi pembangunan, penggunaan uang yang melenceng, dan korupsi meluas dalam pemerintah yang dikuasai militer (Maire Leadbeater, 2018:140).

Melihat fakta-fakta yang muncul setelah Pepera 1969, yang saat itu dibungkam, kini menggerakkan bangsa Papua untuk memperjuangkan kembali sejarah dan cita-cita perjuangan Bangsa Papua. Kita menjadi tahu, bahwa Dr. Fernando Ortiz Sanz dalam laporan resminya pada Sidang Umum PBB tahun 1969 menyatakan bahwa,

“Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka” (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph, 243, p.47).

Kemudian, pada bulan Juni 1969, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengakui kepada anggota Tim PBB, Ortiz Sanz, secara tertutup (rahasia), “bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua” (Sumber: Summarey of Jack W. Lydman’s report, July 18, 1969, in NAA, Extracts given to author by Anthony Bamain).

Sejarah Papua hari ini, berkaca dalam realitas fakta-fakta sejarah pengintegrasian Papua ke dalam Indonesia yang dilakukan dengan tidak benar. Saya melihat apa yang Pemerintah Indonesia lakukan setiap hari terhadap rakyat dan bangsa West Papua. Itulah kenapa rakyat dan bangsa West Papua berpendirian untuk menentukan nasib masa depannya sendiri sebagai solusi secara damai untuk mengakhiri tindakan rasisme dan ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang asli Papua lebih dari 60 tahun. (*)

BAB 6

Menggugat Pelaksanaan Pepera di Sidang Umum PBB

Pelaksanaan Pepera 1969 di Papua mendapatkan sorotan tajam dalam laporan Sidang Umum PBB. Kritik mengalir deras saat utusan PBB Dr. Fernando Ortiz Sanz, yang mengawasi Pepera saat itu, melaporkan pelaksanaan Pepera diungkapkan adanya manipulasi dan intimidasi dari militer Indonesia. “Saya harus menyatakan pada permulaan laporan ini, ketika saya tiba di Irian Barat pada bulan Agustus 1968, saya diperhadapkan dengan masalah-masalah yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian New York Pasal XVI. Lebih dulu ahli-ahli PBB yang ada tinggal di Irian Barat pada saat peralihan tanggung jawab administrasi secara penuh kepada Indonesia ditiadakan, mereka tidak mengenal keadaan secara baik, mempersingkat tugas-tugas mereka,” kata Ortiz Sanz.

“Akibatnya, fungsi-fungsi dasar mereka untuk menasihati dan membantu dalam persiapan untuk mengadakan ketentuan-ketentuan Penentuan Nasib Sendiri tidak didukung selama masa 1 Mei 1963-23 Agustus 1968. Atas kehadiran saya di Irian Barat, untuk tujuan misi saya, saya telah memulai dengan mengumpulkan, mencoba untuk memenuhi dalam beberapa bulan dengan staf yang terbatas tidak seimbang dengan wilayah yang luas, fungsi-fungsi penting dan kompleks di bawah Perjanjian New York XVI hendaknya dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dengan sejumlah ahli” (UN Doc. Annex I A/7723,

paragraph 23, p.4).

“Saya dengan menyesal harus menyatakan pengamatan-pengamatan saya tentang pelaksanaan Pasal XXII (22) Perjanjian New York, yang berhubungan dengan hak-hak termasuk hak-hak kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul penduduk asli. Dalam melakukan usaha-usaha yang tetap, syarat-syarat yang penting ini tidak sepenuhnya dilaksanakan dan pelaksanaan administrasi dalam setiap kesempatan diadakan pengawasan politik yang ketat terhadap penduduk pribumi.” (Laporan Resmi Hasil Pepera 1969 Dalam Sidang Umum PBB, Paragraf 164, 260).

Dr. Fernando Ortiz Sanz dalam laporan resminya dalam Sidang Umum PBB tahun 1969 menyatakan, “Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka.” (UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph, 243, p.47)

Hasil Pepera 1969 itu telah menuai hujan kritik dan protes yang keras dalam Sidang Umum PBB pada tahun 1969 oleh anggota resmi PBB. Mereka (anggota PBB) mempersoalkan pelaksanaan Pepera yang dianggap penuh dengan kebohongan dan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hukum internasional. Karena, hasil Pepera 1969 itu dianggap melanggar hukum internasional, maka Sidang Umum PBB hanya mencatat “take note”. Istilah “take note” itu tidak sama dengan disahkan. Hanya dicatat karena masih ada masalah yang serius dalam pelaksanaan Pepera 1969 di Papua Barat.

Hasil Pepera 1969 tidak disahkan tapi hanya dicatat “take note” karena perlawanan sengit dari beberapa negara anggota PBB yang dimotori oleh pemerintah Ghana. Dalam arsip resmi di kantor PBB, New York,

Amerika Serikat, melaporkan bahwa, “ ...156 dari 179 pernyataan masih tersimpan, sesuai dengan semua yang diterima sampai tanggal 30 April 1969, dari pernyataan-pernyataan ini, 95 pernyataan anti Indonesia, 59 pernyataan pro Indonesia, dan 2 pernyataan adalah netral.” (Dok. PBB di New York: *Six lists of summaries of political communications from unidentified Papuans to Ortiz Sanz, August 1968 to April 1969: UN Series 100, Box 1, File 5*)

Para pembaca perlu ketahui bahwa ada 15 Negara dari kawasan Afrika dan Karabia pernah melawan dan menolak hasil Pepera 1969 yang tidak adil dan yang dimenangkan ABRI itu. Berikut dua negara, dari negara-negara tersebut yang menentang hasil Pepera 1969.

Duta Besar Perwakilan tetap Pemerintah Ghana di PBB, Mr. Akwei melawan dan menolak dengan tegas hasil Pepera 1969 yang palsu dan cacat hukum.

“...yang dilaporkan Sekretaris Jenderal PBB bahwa bukti-bukti peristiwa keputusan pelaksanaan pemilihan bebas adalah fenomena asing, dimana Menteri Dalam Negeri naik mimbar dan benar-benar kampanye. Dia, Menteri Dalam Negeri Indonesia, dia meminta anggota-anggota dewan musyawarah untuk menentukan masa depan mereka dengan mengajak bahwa mereka satu ideologi, Pancasila, satu bendera, satu pemerintah, satu Negara dari Sabang sampai Merauke.” (Dokumen PBB A/7723, Annex 1, paragraf 195)

Sementara delegasi Pemerintah Gabon, Mr. Davin dalam perlawanan dan penolakannya dengan tegas mengatakan ketidakjujuran dan penipuan pemerintah Indonesia terhadap rakyat dan bangsa Papua dalam pelaksanaan Pepera 1969 di West Papua sebagai berikut.

“Setelah kami mempelajari laporan ini, utusan pemerintah Gabon menemukan hal-hal aneh dan kebingungan yang luar biasa, itu sangat sulit bagi kami untuk menyatakan pendapat kami tentang metode dan prosedur yang dipakai untuk musyawarah rakyat Irian Barat. Kami dibingungkan luar biasa dengan keberatan-keberatan yang dirumuskan oleh Mr. Ortiz Sanz dalam kata-kata terakhir pada penutupan laporannya. Berkenaan dengan metode-metode dan prosedur-prosedur ini, jika utusan saya berpikir perlunya untuk menyampaikan pertanyaan mendasar, itu dengan pasti menarik perhatian peserta Sidang untuk memastikan aspek-aspek yang ada, untuk menyatakan setidaknya-tidaknya kebingungan yang luar biasa. Kami harus menanyakan hal-hal yang mengejutkan kami dan meminta penjelasan tentang sejumlah bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan perwakilan Sekretaris Jenderal PBB.”

Banyak suara kritis dan tajam mempertanyakan pelaksanaan dan hasil Pepera 1969 di Papua saat itu, antara lain:

Pertama, mengapa sangat banyak jumlah mayoritas wakil-wakil diangkat dan dipilih oleh pemerintah dan tidak dipilih oleh rakyat?

Kedua, mengapa pengamat PBB dapat hadir dalam pemilihan hanya 20% wakil, beberapa dari mereka bertugas hanya sebentar?

Ketiga, mengapa pertemuan konsultasi dikepalai oleh gubernur; dengan kata lain, oleh perwakilan pemerintah?

Keempat, mengapa hanya organisasi pemerintah dan bukan gerakan oposisi dapat hadir sebagai calon?

Kelima, mengapa prinsip “one man one vote” yang direkomendasikan oleh perwakilan Sekretaris Jenderal PBB tidak dilaksanakan?

Keenam, mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?

Ketujuh, mengapa para menteri dengan sengaja hadir dan mempengaruhi wakil-wakil (anggota Pepera) di depan umum dengan menyampaikan bahwa, “ hanya hak menjawab atas pertanyaan untuk mengumumkan bahwa mereka berkeinginan tinggal dengan Indonesia?

Kedelapan, mengapa hak-hak pengakuan dalam Pasal XXII (22) Perjanjian New York 15 Agustus 1962, yang berhubungan dengan kebebasan menyatakan pendapat; berserikat dan berkumpul tidak diberlakukan kepada semua penduduk Orang Asli Papua (OAP)? (United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN General Assembly, Agenda item 108, 20 November 1969, paragraph 11, p. 42)

Sejarawan dan peneliti Pepera di Papua, J.P. Drooglever, yang menghasilkan sebuah buku besar berjudul “Act of Free”, dalam bahasa Indonesia dialibahasakan menjadi “Tindakan Bebas”, mengungkapkan protes negara-negara dari Afrika terhadap proses, pelaksanaan dan hasil Pepera sebagai bagian sikap simpati yang dilakukannya sejak tahun 1961 terhadap persoalan nasib bangsa Papua (Drooglever, hal.784).

Dalam buku itu Prof. J.P. Drooglever memberikan bukti adanya keterlibatan militer Indonesia dalam memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Sejak kedatangan Ortiz Sanz pada bulan Agustus 1968, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai persiapan untuk memperkuat jangkauan (pengaruh) terhadap wilayah itu. Tugas ini dipercayakan kepada pimpinan militer saat itu, Sarwo Edhie Wibowo, orang kepercayaan Soeharto. Menurut kata-katanya sendiri, ia pada waktu itu memiliki tidak lebih daripada 6.000 orang pasukan. Dalam bulan-bulan pertama tahun 1969 kekuatan itu menurut menteri Amir Machmud ditingkatkan menjadi 10.000 orang, sementara kekuatan

ini pada waktu Kegiatan Pemilihan Bebas (Pepera) menurut pemberitaan Malik sudah ditingkatkan menjadi 16.000 orang. Itu sangat cukup untuk mengendalikan kekacauan yang mungkin. (2010:711).

Drooglever mengemukakan bahwa mengintegrasikan orang-orang Papua ke dalam Negara Indonesia tetap menjadi masalah. Kesempatan bagi orang Papua untuk maju sangat terbatas. Penduduk Papua adalah kelompok yang paling miskin di Indonesia. Integrasi mental dan organisasional ke dalam Negara Indonesia tidak tercapai. Satu hal yang pasti adalah: Indonesia tidak berhasil memenangkan hati orang-orang Papua. Dalam pada itu kesadaran nasional orang-orang Papua meningkat dengan tajam. Dengan disiplin mereka sendiri, para tokoh Papua dalam organisasi gereja maupun di masyarakat mampu mengelola keadaan ini sehingga kerusuhan dapat dicegah, bahkan mampu membawa suara orang Papua untuk didengar oleh pemerintah Indonesia dan dunia melalui cara yang terhormat namun tegas (Drooglever: 2010, hal.786-787).

Piter Siran dan saksi sejarah yang dikirim oleh Pemerintah Indonesia untuk memenangkan Pepera 1969, pada awal Desember 2009, setelah membaca buku penulis *Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat* (2007), memberikan kesaksian (Yoman, *Integrasi Belum Selesai*: 2010, hal. 91-92):

Pak Yoman, saya tiba di Jayapura, 1 Desember 1964. Saya menyaksikan ABRI menembak mati Elly Uyok di Bioskop Rex (sekarang: Kantor Pos Jayapura). Saya ikut angkat mayat itu dan darahnya tampias ke baju saya.

Kami orang Indonesia benar-benar menipu orang Papua yang mau berkata benar waktu itu. Kami benar-benar menipu orang

Papua. Kami benar-benar menindas orang Papua. Kami benar-benar merugikan masa depan orang Papua. Kami benar-benar tidak menghargai hati nurani orang Papua untuk benar-benar mau merdeka.

Kami mengetahui bahwa pada waktu pelaksanaan Pepera 1969 itu, orang-orang Papua benar-benar mau merdeka. Saya mengetahui bahwa 100% orang Papua mau merdeka. Impian dan harapan mereka, benar-benar kami hancurkan.

Kami diperintahkan ABRI untuk mencabut tulisan "One Man One Vote" jalan yang akan dilewati Ortiz Sanz orang utusan PBB dan kami ganti dengan menanam tiang-tiang dengan bendera merah putih.

Pada waktu itu, saya mendapat hadiah uang sebesar Rp 7.000.000; (tujuh juta) dari pemerintah Indonesia karena saya dianggap berhasil menipu orang Papua dan memenangkan Pepera 1969. Karena itu, sekarang saya sangat mendukung perjuangan orang Papua untuk merdeka.

BAB 7

Pelaksanaan Pepera Tidak Demokratis: Diwarnai Intimidasi dan Mobilisasi Kekuatan Militer

Rakyat Papua menentang dan menolak hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Kenyataan ini terjadi ketika sejarah Pepera 1969 terungkap bahwa pelaksanaannya tidak *fair*, direkayasa dan intimidatif.

Salah satu kekuatan yang sangat mempengaruhi proses penentuan pilihan rakyat Papua pada 1969, memilih opsi ikut bergabung dengan pemerintah Indonesia atau berdiri sendiri (merdeka), adalah operasi kekuatan dan mobiliaasi yang dilakukan oleh tentara Indonesia, yang saat itu dikenal dengan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Mobilisasi kekuatan militer Indonesia telah ‘memaksa’ orang-orang Papua, yang dipilih sebagai wakil, oleh panitia pemilihan saat itu, untuk memenangkan suara bergabung ke Pemerintah Indonesia. Cara-cara demikian telah menodai prinsip demokratis bagi pelaksanaan Pepera tahun 1969. Bahkan, Pepera dianggap cacat secara hukum internasional.

Bagaimana militer bertindak mempengaruhi proses pelaksanaan Pepera agar para delegasi memilih bergabung dengan Pemerintah Indonesia? Pasca pelaksanaan Pepera 1969, muncul dokumen yang mengungkap peran besar

militer dalam memenangkan jajak pendapat itu. Terlihat dalam dokumen militer Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radiogram MEN/PANGAD No: TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, Perihal: menghadapi referendum di IRBA tahun 1969:

“Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun yang B/P-kan baik dari Angkatan Darat maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman, referendum di IRBA tahun 1969 harus dimenangkan, harus dimenangkan. Bahan-bahan strategis vital yang ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos yang statis. Surat ini sebagai perintah OPS untuk dilaksanakan. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangdam 17/PANG OPSADAR”.

Dalam sebuah wawancara dengan penulis di Jayapura pada 11 Desember 2002, Christofelt L. Korua, seorang saksi mata yang merupakan purnawirawan polisi, menyatakan, “Orang-orang Papua yang memberikan suara dalam Pepera 1969 itu ditentukan oleh pejabat Indonesia dan sementara orang-orang yang dipilih itu semua berada di dalam ruangan dan dijaga ketat oleh militer dan polisi Indonesia.” Laporan Resmi PBB, Annex 1, Paragraph 189-200, menyebutkan bahwa kelompok tentara Indonesia dalam jumlah besar hadir pada pemilihan tersebut. Disebutkan kelompok besar tentara hadir dalam Pepera yang dimulai pada 14 Juli 1969 dengan 175 anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke.

Carmel Budiardjo, Direktur The Indonesia Human Rights Campaign (TAPOL), pada 26 Maret 2002

menyerukan kepada Sekjen PBB, Kofi Annan, “Dalam bulan Agustus 1969, penguasa Indonesia melaksanakan Pepera di West Niew Guinea (West Irian, kemudian Irian Jaya, dan sekarang Papua) untuk menentukan status masa depan wilayah. Pemilihan menyampaikan delapan dewan bersama 1.025 orang, dilaksanakan di bawah tekanan dari penguasa militer Indonesia.”

Operasi militer juga dilakukan sebelum Pepera digelar beberapa tahun sebelumnya (Raweyai, 2002:33-34). Antara lain, pada masa Kodam dipimpin oleh Brigjen R. Kartidjo (1965 – 23 Maret 1966), dilaksanakan ‘Operasi Sadar’ yang bertugas melakukan kegiatan intelijen, menyadarkan para kepala suku, dan melakukan penangkapan terhadap para pemimpin OPM (Organisasi Papua Merdeka) serta menangkap orang-orang Papua yang menolak integrasi dengan Indonesia.

Kemudian, ketika Brigjen R. Bintoro ditunjuk sebagai Pangdam (23 Maret 1966-25 Juni 1968), beliau memimpin ‘Operasi Bratayudha’ yang bertujuan untuk menghancurkan aktivitas OPM yang dipimpin Ferry Awom di Manokwari dan menguasai wilayah Papua Barat secara keseluruhan. Pangdam berikutnya, Brigjen Sarwo Edhi Wibowo, memimpin tugas ‘Operasi Sadar’ yang bertujuan menghabisi sisa-sisa OPM, merangkul orang-orang Papua untuk memenangkan Pepera 1969, dan melakukan konsolidasi kekuasaan pemerintah Indonesia di seluruh wilayah.

Dokumen lain yang mengungkap aksi militer dalam pelaksanaan Pepera diungkapkan dalam surat kabar nasional Belanda, NRC Handelsblad pada 4 Maret 2000. Sebuah surat rahasia untuk pengamanan dan kemenangan Pepera di Merauke dikirim oleh Komando Militer

Wilayah XVII Tjenderawasih, Kolonel Infantri Soemarto-NRP.16716, kepada Komando Militer Resort-172 Merauke tanggal 8 Mei 1969, Nomor: R-24/1969. Surat itu berstatus rahasia, tertulis perihal: Pengamanan Pepera di Merauke. Inti dari isi surat rahasia tersebut untuk pemenangan Pepera, berikut potongan kutipannya.

“Kami harus yakin untuk kemenangan mutlak referendum ini, melaksanakan dengan dua metode biasa dan tidak biasa. Oleh karena itu, saya percaya sebagai Ketua Dewan Musyawarah Daerah dan Muspida akan menyatukan pemahaman dengan tujuan kita untuk menggabungkan Papua dengan Republik Indonesia”.

Sintong Panjaitan, pimpinan Tim Irian Barat Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang tiba di Manokwari pada 6 Januari 1967 dalam operasi teritorial untuk memenangkan PEPERA 1969, dalam bukunya “Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando” memberikan bukti-bukti keterlibatan langsung aparat keamanan Indonesia memenangkan PEPERA 1969 dengan istilah Operasi Teritorial, Operasi Tempur, Pembinaan, dan Pembentukan DMP. DMP singkatan dari Dewan Musyawarah PEPERA bentukan ABRI (kini TNI). Anggota DMP adalah orang-orang yang dipilih oleh ABRI dan Pemerintah dan diawasi ketat dibawah intimidasi, teror, dan ancaman pembunuhan. Tujuannya untuk menggabungkan Papua Barat secara paksa ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam buku itu Sintong mengungkapkan sejumlah fakta seperti yang termuat dalam kutipan berikut.

“Di Jayapura Panglima Kodam XVII/Tjenderawasih Brigjen TNI Sarwo Edhie, memikul tanggungjawab

sangat besar atas keberhasilan Pepera dalam pelaksanaan Pepera. Sarwo Edhi diangkat sebagai Ketua Proyek Pelaksana Daerah. Tugasnya mengendalikan, mengerahkan, dan melakukan koordinasi seluruh kegiatan aparat pemerintah daerah, sipil dan swasta, serta seluruh unsur ABRI di Irian Barat. Di Jayapura Brigjen Sarwo Edhi kepada penulis mengemukakan, Kalau Pepera gagal, kegagalan itu terletak di pundak saya. Sebaliknya kalau nanti Pepera berhasil, akan banyak pihak yang mengaku bahwa keberhasilan itu hasil jerih payah mereka." (2009:1969).

Sintong juga menyebutkan ABRI melalui Kodam XVII/Tjenderawasih melaksanakan Operasi Wibawa. Operasi ini dilakukan pasukan organik dan didatangkan dari luar Irian Barat. Bahkan, operasi ini dikenal berkekuatan jumbo karena jumlah pasukannya mencapai 5.220 personil. Selain dari ABRI, personil lain yang dilibatkan adalah Kopasget atau Pasukan Gerak Tjepat AURI, dan Karsayudha. Tujuan operasi ini adalah mengamankan Pepera, menghancurkan OPM pimpinan Ferry Awom, dan menumbuhkan kewibawaan pemerintah (2009: 169).

Fakta lain yang dicatat oleh Sintong Pandjaitan adalah pelaksanaan operasi tujuh bulan sebelum Pepera yang dilakukan oleh satuan operasi bernama Karsayudha yang dikomandoi oleh Kapten Faisal Tanjung. Operasi ini dibawah perintah Pangdam XVII/Tjenderawasih, tujuannya sama, memenangkan Pepera.

"Prayudha 1 di bawah pimpinan Lettu Saparwadi, AMN angkatan 64, ditempatkan di Kabupaten Sorong. Lettu Kuntara memimpin Prayudha 2 di Kabupaten Biak. Prayudha 4 di bawah pimpinan Lettu Wismoyo Arismunandar ditempatkan di Kabupaten Merauke. Lettu Sintong Panjaitan memimpin Prayudha 3

berkekuatan 26 orang di bawah perintah (B/P) Komandan Korem 171/Manokwari, selaku Komandan Operasi Wibawa 1 di Kabupaten Manokwari. Ia dibantu oleh Sujudi yang berpangkat calon perwira (capa) sebagai wakil komandan." (2009:169-170).

(Keterangan: Karsayudha pimpinan Kapten Feisal Tanjung disebut Karsayudha Wibawa, karena pada waktu itu Kodam XVII/Tjenderawasih sedang melaksanakan serangkaian operasi dengan sandi Wibawa).

Ada berbagai cara dalam operasi tersebut yang digunakan untuk menggagalkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat Papua saat itu. Seperti di Manokwari, misalnya, operasi dijalankan dengan target para pegawai negeri, pemuda pelajar. Faktor yang penting juga pembinaan penduduk melalui operasi teritorial. Aksi-aksi itu diatur dengan rinci, seperti satuan Prayudha 3, yang menugaskan anggota melakukan pendekatan atau 'pembinaan' kepada para calon DMP. Setiap KPS dikendalikan oleh 3 personil Sandiyudha yang dikenal handal dalam tempur. (2009:182-183)

Pada 30 Maret 1969 Sintong didampingi oleh Sertu Salam menghadiri rapat pembentukan DMP Persiapan yang dipimpin oleh S.D. Kawab, Bupati Manokwari, di kantor kabupaten. Rapat membicarakan pembentukan DMP Manokwari yang akan diputuskan berdasarkan konsultasi dengan Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Soedjarwo Tjondronegoro, SH dari Departemen Luar Negeri RI. Sebelum rapat dimulai, para anggota DPRD yang akan berbicara dalam rapat telah melakukan latihan sebanyak empat kali, dengan disaksikan oleh anggota Prayudha 3 sebagai Pembina. Rapat tetap menolak dilaksanakannya kebebasan memilih secara *one*

man one vote. Kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Pembentukan DMP yang kemudian disingkat menjadi Panitia 9 dengan ketua S.D. Kawab. Prayudha 3 mendapat tugas membantu Panitia 9 untuk bertindak sebagai pengaman dan penghubung antara para pembina di daerah-daerah dengan Panitia 9. Disebabkan kerja Panitia 9 kurang lancar hingga Prayudha 3 yang melakukan pekerjaan itu. Hasilnya diserahkan kepada Panitia 9. (2009:183-184).

Para anggota DMP dikumpulkan di kota Manokwari dengan disertai dua orang pembina, masing-masing Letda Renwaren, seorang Perwira Rohani Katolik, dan serta Abdul Hamid (2009:184). Dalam pelaksanaan Pepera di kabupaten Manokwari, Sintong bertindak sebagai koordinator intelijen dan mengawasi anggota DMP bernama Rumajom yang diperkirakan akan melakukan tindakan negatif. Capa Suyudi, Wadan Prayudha 3 bertindak sebagai Komandan Sektor A di dalam ruang sidang, sedangkan Letda Monthe sebagai Komandan Sektor B. Sementara itu Prayudha 3 mendapat tugas mengerahkan massa sebanyak 5.000 orang untuk menghadiri sidang. Sersan Kepala Simon dibantu oleh tiga orang bertugas mengerakkan massa dari daerah pedalaman dan Sertu Wagimin beserta tiga orang lainnya menggerakkan masa dari daerah pantai. Pengerahan massa menjadi tanggungjawab Prayudha 3 mulai dari pengangkutan sampai ke tempat sidang. (2009:185)

Keberhasilan menjalankan peran yang sangat besar dalam menyukseskan Pepera adalah puncak keberhasilan Prayudha 3. Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan mengakui, "Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi-operasi Tempur, Teritorial dan Wibawa sebelum

dan paska pelaksanaan PEPERA dari Tahun 1965-1969, maka saya yakin PEPERA 1969 di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Pro Papua Mereka.”

Sintong Panjaitan (2009:185) mengakui perlawanan dari pemuda dan mahasiswa. Pada 19 Juni 1969, 30 orang pelajar yang akan melakukan demonstrasi ditangkap, dari tingkat pimpinan sampai tingkat bawah. Pimpinan mereka seorang mahasiswa Universitas Tjenderawasih. Dalam sidang terjadi demonstrasi kecil, yaitu 17 anak sekolah yang membuat kegaduhan, yang kemudian mereka ditangkap dan dibawa ke Posko Prayudha 3.

Pepera: Tidak ‘One Man One Vote’

Referendum untuk rakyat Papua, atau dikenal saat itu dengan Pepera dilaksanakan tidak demokratis dan sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional, yaitu satu orang satu suara atau *one man one vote*. Saat pelaksanaan Pepera pada 14 Juli-2 Agustus 1969 penduduk Papua yang berjumlah 809.337 jiwa tidak semua dilibatkan untuk memilih dan memutuskan ikut Pemerintah Republik Indonesia atau tidak. Saat itu sekitar 1.025 orang yang dipilih secara tidak demokratis, tidak cukup mewakili rakyat Papua, bahkan mereka tak mendapatkan kebebasan untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya.

Pemerintah Indonesia sengaja membentuk badan yang sesuai dengan ‘selera’ atau budaya yang ditanamkan dalam pengambilan keputusan ‘musyawarah untuk mufakat’. Maka, Pemerintah Indonesia membentuk Dewan Musyawarah papua atau DMP, yang mengatur bagaimana segala sesuatunya berada di bawah kendali Negara Indonesia.

Semakin tidak masuk akal jika kita melihat representasi dari jumlah penduduk Papua yang memiliki hak untuk memilih. Logikanya dari total penduduk OAP 809.337 yang ditunjuk ABRI 1.025 berarti OAP yang tidak ikut terlibat memilih dan menyetujui pernyataan yang disiapkan ABRI sebanyak 808.312 orang. Jumlah wakil yang terpilih itu tidaklah mencerminkan suara orang Papua karena jumlahnya jauh dari setengah jumlah penduduk. Sesuatu yang miris memang.

Tokoh intelektual Papua Agus Alue Alua dalam buku Papua Barat Dari Pangkuan Ke Pangkuan (2000:76), menguraikan data komposisi perwakilan orang-orang Papua yang menjadi peserta utusan dalam Pepera 1969 di berbagai wilayah di Papua.

Pada 14 Juli 1969 di Merauke hanya 175 orang yang dipilih ABRI dan 144.171 jiwa tidak terlibat dalam proses Pepera itu. Apakah 175 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 144.171 orang Merauke untuk memilih Indonesia? Jawabannya adalah tidak. 175 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Merauke.

Kemudian pada 16 Juli 1969 di Jayawijaya hanya 175 orang yang dipilih ABRI dan 165.000 jiwa tidak terlibat dalam Pepera itu. Apakah 175 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 165.000 orang Jayawijaya untuk memilih Indonesia? Jawabannya juga tidak. 175 orang itu dipilih oleh ABRI, bukan utusan rakyat Jayawijaya.

Lalu pada 19 Juli 1969 di Paniai hanya 175 orang dan 156.000 jiwa belum terlibat dalam Pepera. Apakah 175 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 156.000 orang Paniai untuk memilih Indonesia? Jawabannya tidak juga. 175 orang itu dipilih oleh ABRI, bukan utusan rakyat Paniai.

Selanjutnya, 23 Juli 1969 di Fak-Fak hanya 75 orang dan 43.187 jiwa belum terlibat dalam Pepera. Apakah 75 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 43.287 orang Fak-Fak untuk memilih Indonesia? Jawabannya adalah tidak. 75 orang itu dipilih oleh ABRI, bukan utusan rakyat Fak-Fak.

Pada 26 Juli 1969 di Sorong hanya 110 orang dan 75.474 jiwa belum terlibat dalam Pepera. Apakah 110 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 75.474 orang Sorong untuk memilih Indonesia? Jawabannya juga tidak. 110 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Sorong.

Lalu 29 Juli 1969 di Manokwari hanya 75 orang dan 49.875 jiwa tidak terlibat dalam Pepera. Apakah 75 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 49.875 orang Manokwari untuk memilih Indonesia? Jawabannya juga sama, tidak. 75 orang itu dipilih oleh ABRI, bukan utusan rakyat Manokwari.

31 Juli 1969 di Teluk Cenderawasih hanya 130 orang dan 83.000 jiwa tidak terlibat dalam Pepera 1969. Apakah 130 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 83.000 orang Teluk Cenderawasih untuk memilih Indonesia? Jawabannya adalah tidak. 175 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Teluk Cenderawasih.

Terakhir, 2 Agustus 1969 di Jayapura hanya 110 orang dan 81.246 jiwa tidak terlibat dalam Pepera. Apakah 110 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 81.246 orang Jayapura untuk memilih Indonesia? Jawabannya adalah tidak. 110 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Jayapura.

Dari uraian pelaksanaan Pepera 1969 terbukti

bahwa ABRI-lah yang memenangkan Pepera 1969, bukan Orang Asli Papua. Karena penduduk OAP pada tahun 1969 berjumlah 809.337 jiwa dan hanya 1.025 orang yang dipilih ABRI dan 808.312 tidak pernah ikut terlibat dalam Pepera 1969.

Persoalan mendasar yang bisa dilihat dari proses dan hasil Pepera itu ialah tidak ada legitimasi hukum dan dukungan dari mayoritas rakyat dan bangsa Papua kepada Indonesia untuk berada di Papua. Namun, hasil pilihan dari 1.025 orang itu dianggap telah sah karena sudah diakomodir dalam resolusi PBB 2504 tentang hasil Pepera. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, hasil Pepera 1969 terus digugat oleh rakyat Papua, yang diwakili oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), atas dukungan dari negara Vanuatu yang menggugat kembali Indonesia karena ada masalah hukum yang serius dalam pelaksanaan Pepera 1969.

Pelaksanaan Pepera 1969 dinilai punya cacat moral dan hukum serta manipulatif karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Perjanjian New York 15 Agustus 1962 "one man one vote". Pepera sama sekali tidak menganut hukum itu melainkan dengan cara dan budaya politik Indonesia dengan 'Musyawarah' untuk mencapai mufakat.

Sesudah Manipulasi Pepera Terungkap

J.P. Drooglever menemukan dalam penelitiannya yang berjudul "Laporan Akhir Sekjen PBB Seluruhnya Didasarkan pada Laporan Ortiz Sanz tentang Perannya dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Bebas." Laporan ini hanya berisi kritik yang lemah terhadap oposisi dari pihak Indonesia. Atas dasar ini, U. Thant tidak

bisa berbuat lain kecuali menyimpulkan bahwa suatu kegiatan pemilihan bebas telah dilaksanakan. Ia tidak bisa menggunakan kata depan yang tegas (*the*), karena nilai-nilai proses itu jauh di bawah standar yang diatur dalam Persetujuan New York. Walaupun dapat ditafsirkan sebagai suatu penilaian yang mencibir, tetapi beberapa pihak justru mengabaikan pengkalimatan yang tidak jelas dalam persetujuan New York itu.”

Pernyataan tersebut termuat dalam “Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri.” Selanjutnya Drooglever (2010:783) mengungkapkan, “Menurut pendapat para pengamat Barat dan orang-orang Papua yang bersuara mengenai hal ini, tindakan Pilihan Bebas berakhir dengan kepalsuan, sementara sekelompok pemilih yang berada di bawah tekanan luar biasa tampaknya memilih secara mutlak untuk mendukung Indonesia.”

Berkaitan dengan hal itu, Dr. Hans Meijer, Sejarawan Belanda dalam penelitiannya yang berhubungan dengan hasil Pepera 1969 di Papua Barat menyatakan bahwa, “Pepera 1969 di Papua Barat benar-benar tidak demokratis.”

Dr. John Saltford, Akademisi Inggris yang menyelidiki hasil pelaksanaan Pepera 1969 menyatakan, “ Tidak ada kebebasan dan kesempatan dalam perundingan-perundingan atau proses pengambilan keputusan yang melibatkan orang-orang Papua Barat. Jadi, PBB, Belanda, dan Indonesia gagal dan sengaja sejak dalam penandatanganan tidak pernah melibatkan orang-orang Papua untuk menentukan nasib sendiri secara jujur.” (“United Nations Involment With the Act of Free Self-Determination in West Papua (Indonesia West New

Guinea) 1968 to 1969")

Robin Osborn (2000:30) mengungkapkan, "...bahwa penggabungan daerah bekas jajahan Belanda itu ke dalam wilayah Indonesia didasarkan pada premis yang keliru. Yaitu ketika 1.025 orang delegasi yang dipilih pemerintah Indonesia memberikan suara mereka dibawah pengawasan PBB diartikan sebagai aspirasi politik dari seluruh masyarakat Papua Barat. Kini, premis ini diragukan keabsahannya berdasarkan hukum internasional."

Dr. George Junus Aditjondro (2000:8) mengatakan, "Dari kaca mata yang lebih netral, hal-hal apa saja yang dapat membuat klaim Indonesia atas daerah Papua Barat ini pantas untuk dipertanyakan kembali". Tentu ini bisa menjadi pertanyaan balikan atas beberapa pernyataan di atas.

Pada hari Sabtu, 16 Januari 2010 di studio *Metro TV* pada acara *Kick Andy*, dalam menyikapi pelarangan lima buku oleh Kejaksaan Agung, Ikrar Nusa Bhakti menanggapi kementar saya (Socratez) tentang pelaksanaan Pepera 1969 di Papua Barat yang tidak demokratis dan lebih dimenangkan oleh aparat keamanan Indonesia. Ikrar berkomentar, "Memang apa yang dikatakan pak Socratez tentang pelaksanaan Pepera 1969 yang tidak demokratis itu ada benarnya."

Menarik menyimak pernyataan Pdt. Dr. Phil Karel Erari dalam buku *Yubileum dan Pembebasan Menuju Papua Baru* (2006:23), "Rakyat Papua merasa bahwa Pepera adalah rekayasa Pemerintah RI, Belanda, Amerika Serikat dan PBB, di mana rakyat Papua tidak dilibatkan sebagai subyek hukum internasional dan pelaksanaannya tidak dilakukan secara demokratis sesuai dengan kebiasaan dan

praktik yang berlaku dalam masyarakat internasional.”

Erari menambahkan (2006:182), “Sejarah Integrasi Papua dalam Indonesia adalah suatu sejarah berdarah. Pelanggaran HAM yang diwarnai oleh pembunuhan kilat, penculikan, penghilangan, perkosaan, pembantaian, dan kecurigaan”. Karel Phil Erari dengan tegas mengatakan, “Secara hukum, integrasi Papua dalam NKRI bermasalah.”

Pada bulan Juni 1969, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengakui kepada anggota Tim PBB, Ortiz Sanz, secara tertutup (rahasia) bahwa, “95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.” Pernyataan ini termuat dalam “Summary of Jack W. Lydman’s report 1969”.

Sebuah pengakuan diberikan Pemerintah Inggris melalui juru bicara House of Lord, Symon Barroness pada 13 Desember 2004. Symon Barroness mengatakan bahwa, “Papua dimasukkan dengan paksa ke dalam wilayah Indonesia melalui rekayasa PEPERA 1969 dan akibatnya bagaimana keadaan orang Papua sekarang dan kelangsungan hidup masa depan orang-orang Papua.”

Berbagai protes telah disuarakan para anggota parlemen dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya pada 17 Februari 2005, Eni F.H. Faleomavaega yang menyurati Pemerintah Amerika. Pada 14 Februari 2008, Eni bersama Donald Payne, Anggota Kongres Amerika, melayangkan surat kepada Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-Moon yang berbunyi:

“...Referendum (PEPERA 1969) bagi orang asli Papua itu dengan jelas menunjukkan bahwa tidak pernah dilaksanakan. Faktanya, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Anggota Kongres Amerika telah menulis surat, pada tahun 2006, kepada Tuan Annan meminta

bahwa PBB tinjau kembali untuk melaksanakan penerimaan “Pepera 1969” itu.”

Pada 19 Juli 2002, 34 Anggota Parlemen Uni Eropa menyerukan kepada Komisi dan Parlemen Uni Eropa untuk mendesak Sekjen PBB, Kofi Annan, mempertimbangkan kembali penentuan nasib sendiri Papua. Hal itu tertuang dalam laporan Komisi Uni Eropa, “The EC Conflict Prevention Assessment Mission: Indonesia, March, 2002, on unrest in West Papua.”

Pada 31 Januari 1996, sebelum aksi 34 anggota parlemen Uni Erpoa, Parlemen Irlandia mengeluarkan resolusi tentang West Papua yang menyebut ketidakjujuran pelaksanaan Pepera 1969. Aksi ini merupakan sikap tegas negara Irlandia yang menentang hasil keputusan Pepera tahun 1969.

Pada 1 Desember 2008, di gedung Parlemen Inggris, London, Hon. Andrew Smith, MP, dan The Rt. Revd. Lord Harries of Pentregarth dan 50 anggota Parlemen dari berbagai Negara menyatakan: “Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan jujur dan benar mengakui penduduk asli Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri (Self-Determination), karena masa depan mereka dihancurkan melalui Pepera 1969.”

Pada 1 Desember 2009 di Gedung Parlemen Inggris, London, para ahli hukum internasional untuk Papua Barat, “International Lawyers for West Papua” (ILWP) pada saat peluncuran buku Prof. Pieter Drooglever, menyatakan bahwa Pepera 1969 adalah skandal aneksasi illegal.

BAB 8

Tanpa Wakil West Papua, Amerika, Belanda, dan Indonesia Berunding: Tipu-tipu Pernjanjian New York

Ketidajujuran di tubuh bangsa Indonesia dimulai sejak dibuat dan ditandatangani Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Perjanjian itu tak melibatkan rakyat atau penduduk orang asli Papua. Tiga bangsa dan negara penandatanganinya, Amerika Serikat, Belanda, Indonesia, itu berkongsi bahkan berkonspirasi.

Perjanjian yang dikenal dengan New York Agreement itu memiliki empat tujuan. Pertama, perjanjian ini untuk mengakhiri pertengkaran antara pemerintah Belanda dengan Indonesia tentang status politik dan masa depan rakyat dan bangsa Papua Barat.

Konflik antara Belanda dan Indonesia mengenai Papua Barat mencuat dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (The Haque) pada 27 Desember 1949. Belanda tidak memasukkan hak politik Papua Barat ke dalam wilayah Indonesia.

Dalam buku BPUPKI & PPKI (1998) diungkapkan bahwa Belanda memutuskan untuk tidak menyerahkan kedaulatan Papua Barat ke dalam Republik Indonesia. Dan hal itu sesungguhnya dimengerti oleh Wakil Presiden RI Drs. Mohammad Hatta. "Secara pribadi ingin saya nyatakan bahwa bagi saya masalah Irian Barat tidak perlu dipersoalkan. Saya tahu bahwa Bangsa Papua pun

berhak menjadi bangsa yang merdeka.”

Tujuan kedua dari New York Agreement untuk kepentingan membendung perkembangan komunisme di kawasan Asia Pasifik. Menurut pengamat politik Cipta Lesmana, seperti dipublikasikan di Media Indonesia, 30 November 2000, halaman 4, masalah Papua Barat akan memperuncing konfrontasi Amerika Serikat dan Uni Soviet.

“Pemerintah Kennedy semula menentang mati-matian pengembalian Papua Barat ke pangkuan RI. Soekarno kemudian berpaling kepada Nikolai Krushchev pemimpin Uni Soviet, setelah dengan jelas mengetahui sikap Washington. Perlengkapan militer canggih senilai satu milyar dollar Amerika, termasuk kapal selam, segera mengalir ke Jakarta dari Moskow. ...Kennedy rupanya khawatir masalah Irian Barat dapat berbuntut pada pecahnya kembali konfrontasi langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Daripada Indonesia sepenuhnya jatuh ke pangkuan Soviet, lebih baik Soekarno dijinakkan. Tekanan Amerika itu yang tampak membuat Belanda akhirnya mengalah, merelakan solusi Irian Barat diserahkan sepenuhnya kepada PBB.”

Dalam surat rahasia Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy (Surat John F. Kennedy, Secret, 2 April 1962), Amerika Serikat menyiapkan bantuan yang diperlukan PBB pada saat rakyat Papua melaksanakan penentuan nasib sendiri. “Dalam keadaan seperti ini serta didorong oleh tanggungjawab kami untuk kebebasan dunia (non-komunis), saya mendesak dengan sangat, agar pemerintah Belanda menerima rumusan yang telah disampaikan kepada wakil Anda oleh Tuan Bunker.”

Dalam surat yang sama, John F. Kennedy menegaskan kepada Dr. J.E. de Quay, “Kami tentunya

akan menekan Pemerintah Indonesia sekuatnya, agar menyetujui pembicaraan-pembicaraan lanjutan atas dasar rumusan tersebut di atas.”

Tujuan ketiga pada Perjanjian New York adalah kepentingan Amerika Serikat untuk menguasai emas di Papua. Kepentingan ekonomi Amerika Serikat terbukti dengan disepakati kontrak karya penambangan emas di Papua selama 30 tahun yang ditandatangani pada 7 April 1967, antara Indonesia dengan Freeport (Amerika Serikat) setelah Soeharto dilantik pada 12 Maret 1967 sebagai pejabat presiden. Ambisi Amerika Serikat untuk merampok dan menguasai tambang emas di Namangkawi-Ndugu-Ndugu, Mimika (Tembagapura) itu terjadi dengan begitu cepat. Kontrak karya itu dibuat hanya dalam waktu 42 hari setelah Suharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Kesepakatan Amerika Serikat dan Indonesia pada 7 April 1967 itu bertolak belakang dengan pelaksanaan Pepera pada 14 Juli-2 Agustus 1969. Artinya, sebelum Papua Barat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan moncong senjata, kontrak karya penambangan emas di Papua dilakukan dua negara, Amerika Serikat dan Indonesia. Bisa dikatakan keduanya melakukan pendudukan dan penjajahan atas Papua Barat.

Perjanjian New York 15 Agustus 1962 terdiri dari 29 Pasal yang terdiri dari tiga bagian penting. Bagian pertama mengenai transfer administrasi dari Belanda kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disebut UNTEA (United Nations Temporary Executive Administration) yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 11.

Bagian kedua tentang transfer administrasi dari PBB (UNTEA) kepada Indonesia yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13. Lalu, bagian ketiga mengenai penentuan nasib sendiri (self determination) orang asli Papua yang diatur dalam 9 Pasal dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 22.

Tujuan utama New York Agreement 15 Agustus 1962 ialah penyelesaian persengketaan antara Indonesia dan Belanda atas status politik bangsa West Papua dan diberikannya kesempatan kepada orang asli Papua untuk penentuan nasib sendiri di atas tanah dan negeri leluhur mereka atas pengawasan PBB. Tetapi, setelah penulis menyelidiki dan mengkritisi dengan saksama New York Agreement yang terdiri dari 29 Pasal tersebut, ternyata New York Agreement dibuat untuk kepentingan penyerahan pemerintahan dari Belanda kepada Indonesia bukan untuk kepentingan penentuan nasib sendiri OAP (Orang Asli Papua).

Mari lihat lebih kritis lagi hal yang termuat dalam perjanjian itu dari pasal ke pasal. Saya mulai dengan pertanyaan pertama, mengapa Pasal 2 ditetapkan penyerahan wilayah Papua dari Belanda kepada UNTEA (PBB) dan selanjutnya dari UNTEA menyerahkan kepada Indonesia? Pada 1 Oktober 1962 Pemerintah Belanda menyerahkan Papua kepada UNTEA. Selanjutnya, pada 1 Mei 1963 UNTEA serahkan Papua kepada Indonesia hanya berselang 6 bulan. Yang sebenarnya ialah UNTEA harus berada di Papua selama 6 tahun dalam mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib sendiri OAP pada 1969.

Lalu pertanyaan kedua, mengapa Pasal 7 dan 13 disetujui menggunakan kekuatan militer Indonesia di Papua sebelum OAP memilih menjadi bagian sah wilayah

Indonesia melalui Pepera 1969? Keterlibatan Militer Indonesia juga diakui oleh Sintong Panjaitan (2009:169) bahwa “Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka.”

Hal tersebut merupakan kesalahan fatal yang dilakukan Belanda dan Indonesia serta Amerika Serikat, yaitu penyerahan Papua kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Seharusnya, keamanan dari UNTEA mengawasi wilayah Papua selama 6 tahun sejak 1963 sampai pelaksanaan Pepera 1969.

Pertanyaan ketiga, bagaimana UNTEA (PBB) mensosialisasikan kepada OAP sesuai dengan New York Agreement Pasal 10 tentang penyerahan pemerintahan dari UNTEA kepada Indonesia? Ada tiga alasan. Pertama, PBB telah terlibat dalam konspirasi politik untuk mengabaikan hak penentuan nasib sendiri Orang Asli Papua dalam NYA. Kedua, UNTEA mempunyai waktu sangat terbatas, anggota UNTEA dikurangi oleh Indonesia, dan sementara jangkauan wilayah geografis yang sangat luas sehingga wewenang dan pengawasan anggota UNTEA sangat terbatas. Ketiga, pemerintah Indonesia benar-benar dan serius menghalang-halangi pekerjaan UNTEA di Papua Barat.

Lalu, keempat, mengapa Pasal 12 dalam perjanjian itu ditetapkan PBB/UNTEA akan menyerahkan semua atau sebagian bahkan disebut penyerahan kembali pemerintah penuh di Papua kepada Indonesia? Ini bellawanan karena Orang Asli Papua (OAP) belum menyatakan pilihan untuk bergabung dengan Indonesia sesuai dengan New York Agreement Pasal 18 butir D tentang “Penentuan nasib

sendiri orang-orang Papua sesuai praktek internasional.” Kenyataannya, UNTEA menggabungkan wilayah Papua ke dalam wilayah Indonesia sebelum Pepera 1969.

Pertanyaan keenam, mengapa Pasal 14 dari perjanjian itu disetujui untuk dilaksanakan Undang-undang dan peraturan-peraturan Indonesia di Papua sebelum Papua dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia melalui Pepera 1969? PBB, Amerika Serikat, dan Belanda bersama-sama dengan Indonesia memasukkan Papua ke dalam wilayah Indonesia sebelum Pepera 1969. Tindakan itu merupakan kesalahan fatal karena orang Asli Papua tidak pernah terlibat dalam proses pembuatan New York Agreement.

Terakhir, apakah pemerintah Indonesia sungguh-sungguh melaksanakan perjanjian pada Pasal 15 tentang pendidikan dan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di Papua melalui Dana United Nations for the Development of West Irian (FUNDWI) sebesar 30 milyar dollar (US\$30 million) yang disumbangkan Belanda sebagai tanda Perpisahan dengan rakyat Papua? Jose Rolz-Bennet, Sekretaris Jenderal PBB (Maire Leadbeater, 2018:140) pada 1967 datang ke Jakarta dan berkunjung ke West Irian untuk melihat pembangunan dan persiapan penentuan nasib sendiri orang asli Papua. Jose menyatakan pemerintah Indonesia menghalangi pembangunan, penggunaan uang yang melenceng, dan korupsi meluas dalam pemerintah yang dikuasai militer.

BAB 9

Cerita Anak-Cucu Pejuang Pepera: Menceritakan 'Kebenaran'?

Putra-Putri Pejuang Pepera Papua (P5) akan menceritakan sejarah status politik Papua yang sebenarnya saat situasi Pepera pada 2 Agustus 1969 di Jayapura. Cerita yang berangkat dari kebenaran yang mata mereka lihat dan alami melalui indera mereka. Dasarnya adalah ayat berikut. “Jika ya, hendaklah kamu katakan: ‘ya’, jika tidak hendaklah kamu katakan: ‘tidak’. Sebab apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat (Matius 5:37).

Pada 28 Oktober 2020 di Jayapura, Ketua Putra Putri Pejuang Pepera Papua (P5), Yanto Eluay dalam sambutan mengatakan: “Bahwa Ormas yang dipimpinnya, P5 ini, akan menjaga dan mengawal keputusan Pepera tahun 1969 yang sudah sah diperjuangkan oleh 1026 para orang tua mereka untuk menggabungkan Papua kedalam NKRI. Oleh sebab itu, jangan kita menjadi anak-anak pembangkang terhadap apa yang sudah diputuskan orang tua saat Pepera dahulu.”

Yanto Eluay lebih lanjut menyatakan, “...bahwa wadah ini mereka akan terus sosialisasikan kepada beberapa generasi mereka yang akan datang di mana mereka akan menceritakan sejarah status Politik Papua yang sebenarnya saat situasi Penentuan Pendapat Rakyat tanggal 2 Agustus 1969 hingga saat ini, dan tidak lagi

melihat kebelakang 1 Desember 1961.”

Dalam deklarasi kelompok P5, Komandan KOREM 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan, berkotbah sebagai berikut:

“....mengapa sampai saat ini Papua masih terus terjadi konflik, menurutnya karena semua yang mereka rencanakan dan inginkan adalah pikiran manusia yang direka-reka, seperti yang terdapat didalam Firman Tuhan Kitab Mazmur 2 ayat 1, makanya walaupun mereka berusaha sekuat apapun tidak akan berhasil. Terbukti hingga saat ini walaupun ke PBB tetap tidak ada hasil karena PBB mengakui bahwa Papua bagian dari Indonesia dan mempunyai dasar hukum yang jelas.”

Kotbah Brigjend TNI Izak Pangemanan mengingatkan penulis tentang ancaman dari Kol. Kav Burhanuddin Siagian DANREM 172/PWY, pada media Cenderawasih Pos, 12 Mei 2007. Ancaman terornya seperti yang terpublikasi pada buku Pemusnahan Etnis Melanesia (Yoman, 2007:346) berikut ini.

“Pengkhiran negara harus ditumpas. Jika saya temukan ada oknum-oknum orang yang sudah menikmati fasilitas negara, tetapi masih saja mengkhianati bangsa, maka terus-terang saya akan tumpas. Tidak usah demonstrasi-demonstrasi atau kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Jangan lagi mengungkit-ungkit sejarah masa lalu Pepera 1969.”

Ketua P5, Yanto Eluay membuat komitmen di depan Komandan KOREM 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan dan anggota TNI, bahwa ia dan anggota P5 siap menjaga dan menceritakan status politik Papua yang sebenarnya melalui Pepera 1969.

Inisiatif TNI membentuk wadah Putra Putri Pejuang Pepera 1969 di Papua bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan Pepera 1969, mempelajari, dan menyelidiki kebenaran proses pelaksanaan dan hasilnya. Pembentukan wadah ini sama seperti di Timor Leste (dulu Timor Timur). TNI membentuk kelompok Eurico Guterres yang lebih dikenal Milisi Indonesia yang kini hidup sangat memprihantikan karena tidak diperhatikan oleh penguasa Indonesia.

Ada kekecewaan dan protes yang disampaikan Wakil Ketua Milisi, Eurico Guterres, karena nasibnya tidak diperhatikan pemerintah Indonesia. Walaupun ia dengan TNI bahu membahu berjuang, mandi keringat dan menjadi pahlawan dengan memusuhi dan membantai bangsanya atau saudara-saudaranya sendiri demi NKRI, penghargaan itu tak setimpal dengan perjuangannya. Kekecewaan itu terungkap dalam Kompas Kupang, 29 September 2017:

“Kenapa hari ini kami ada di sini? Kok enak sekali Pak Wiranto, dengan saya bersama kawan-kawan lain masuk dalam daftar *serious crime*, tapi beliau jadi menteri, kok kami jadi gembel. Jangan lupa kami, bahwa di manapun kita selalu bersama-sama dan nama kita masuk dalam daftar *serious crime*. Kami berjuang bukan mencari jabatan tapi kami ikhlas. Bagaimana mungkin pak Wiranto bisa jadi menteri lalu nasib orang-orang ini tidak pernah dibicarakan sama sekali. Pak Wiranto selalu mendampingi Presiden ke mana-mana, tapi kami tidak bisa ke mana-mana sehingga sudah saatnya kami menyampaikan kepada pak Wiranto, supaya nasib orang-orang ini yang pernah bapak tahu, dan kenal bisa diperhatikan.”

Pengalaman Eurico Guterres ini ditulis untuk mengingatkan Yanto Eluay dan Hendrik Yance Udam bersama anggota. Kita semua tidak tahu cara Tuhan dan rencana Tuhan untuk rakyat dan bangsa Papua. Pada saat Tuhan mendengar dan melihat penderitaan, tetesan darah dan cucuran air mata umat-Nya yang terpanjang dan terlama di Tanah Papua bisa terbebaskan. Bagaimana nasib dan masa depan Yanto Eluay, Hendrik Yance Udam dan anggotanya?

Komitmen dan siap menjaga serta mengawal hasil Pepera 1969, dalam logika sehat yang biasa dijaga dan diwariskan untuk anak cucu sebagai warisan berharga, membawa kemanfaatan dan kegunaan bagi keluarga, masyarakat luas dan bangsa. Dalam sejarah kehidupan dinamika masyarakat dari waktu ke waktu, biasanya yang salah, buruk, busuk, dan tidak benar tidak pernah dijaga dan dipelihara.

Berbagai pendapat saksi sejarah, akademisi, politisi dan juga pelaku sejarah mengatakan Pepera 1969 itu akar masalah kejahatan dan kekerasan penguasa Indonesia yang menyebabkan pengorbanan ratusan bahkan ribuan orang-orang asli Papua dari tangan ABRI (kini TNI). Jadi, apakah wadah P5 mempertahankan dan menjaga hasil Pepera 1969 sebagai sumber atau jantung kekerasan itu supaya pembantaian Orang Asli Papua terus berlanjut dengan sejarah bengkok yang penuh dengan darah, air mata dan penderitaan itu?

Berhubungan dengan memelihara dan mengawal sejarah busuk dan bengkok ini, ada yang menarik untuk disimak, yaitu BAB XII Pasal 46 dalam Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 yang telah gagal. Pada butir (1) disebutkan, Dalam rangka

pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pada butir (2) Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai berikut: (a) Melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (b) merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi. Pertanyaannya, mengapa Pasal 46 ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi?

Penguasa Pemerintah Republik Indonesia yang menduduki dan menjajah bangsa Papua benar-benar menyadari bahwa pada saat klarifikasi sejarah Papua dilakukan, maka konsekuensi logis dari aspek hukum dan politik ialah rakyat dan bangsa Papua bukan bagian dari wilayah Indonesia.

Bagian akhir dari artikel ini, ada sisi yang perlu dilihat meski, kenyataan pahit tetap diungkapkan, seperti bagian di atas. Setidaknya ada ruang batin yang dikomunikasikan ketika ada secercah sinar untuk menghadirkan kebenaran dengan cara yang damai, seperti yang sempat diungkapkan oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, saat menghadiri Deklarasi Presidium Putra-Putri Pejuang Pepera 1969. Ia memberikan pesan yang positif berikut:

“Saya berpesan agar sebagai orang tua nantinya kepada generasi berikutnya di Papua jangan kita mewariskan dendam dan amarah kepada sesama kita manusia. Tetapi, wariskanlah Cinta Kasih antara sesama karena kita semua hidup di dunia hanya sementara. Untuk itu,

mari kita saling mengisi agar kita disayang Tuhan ketika kita akan kembali kepada-Nya.”

Ungkapan Bupati Mathius Awoitauw tersebut merupakan ajakan yang positif dan patut diapresiasi. Karena selama ini, belum ada ajakan untuk menceritakan sejarah status politik Papua yang sebenarnya, yaitu tentang Pepera 1969 pada 2 Agustus 1969 di Jayapura.

Warisan cinta kasih antara sesama, tidak ada dendam dan kebencian, akan mengalir dengan sendiri. Kedamaian sejati akan tercipta secara permanen di hati, pikiran dan kehidupan kita semua. Semua itu mungkin terjadi jikalau kebenaran sejarah Pepera 1969 itu diajarkan dengan benar, jujur, dan adil.

Kebenaran dan keadilan adalah syarat utama cinta kasih. Tanpa kebenaran dan keadilan cita-cita perdamaian hanya mimpi kosong. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua: “...kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu” (Yohanes 8:32).

BAB 10

Kesejahteraan Bukan Akar Konflik

Bertahun-tahun kita belajar bahwa akar konflik panjang di kawasan Asia Pasifik, seperti di West Papua (Papua Barat), bukanlah kesejahteraan. Rakyat dan bangsa Indonesia mesti memahami kebenaran sejarah konflik di Tanah Papua karena terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan tragedi kemanusiaan sejak pendudukan Indonesia atas Papua pada 1963. Saya percaya, saudara-saudari bangsa Indonesia mempunyai telinga, mata, dan hati nurani, serta kemampuan mendengarkan dan melihat tentang penderitaan rakyat dan bangsa Papua yang berlangsung hingga sekarang.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah menemukan empat akar konflik antara Papua-Indonesia, yang dituangkan dalam buku *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future* (2010). Ada empat akar persoalan itu adalah sebagai berikut: 1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia; (2) Kekerasan negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; (3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di tanah sendiri; (4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Masalah kesejahteraan, yang selam ini didengungkan dan dianggap sebagai akar konflik yang terjadi di Tanah Papua, sesungguhnya tidaklah benar,

bahkan menyamakan akar-akar konflik yang telah disebutkan di atas dengan dukungan riset mendalam dan kuat. Sudah bertahun-tahun, sejak persoalan sejarah Papua, Pepera 1969 – yang didekati dengan pembangunan (infrastruktur) tak dapat memberikan solusi penyelesaian konflik di Papua Barat.

Jika, salah satu akar persoalan konflik Papua Barat adalah adanya ketidakbenaran dan sengketa sejarah, maka bagian ini juga semestinya disentuh dan mendapatkan perhatian. Sejarah Papua yang selama ini tertutupi kini telah terungkap fakta-faktanya. Salah satunya, janji-janji penguasa terhadap rakyat Papua saat itu, yang sesungguhnya sebagai tipu daya.

Hal itu seperti diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal TNI Amir Machmud di hadapan Dewan Musyawarah Pepera (DMP), yang mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia berkeinginan dan mampu melindungi untuk kesejahteraan rakyat Irian Barat. Alasan inilah kemudian diklaim bahwa rakyat Irian Barat untuk tetap tinggal dengan Republik Indonesia (*United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN Assembly, agenda item 98, 19 November 1969, paragraph 18, p.2*).

Janji ini sangat bertolak belakang. Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan berkeinginan dan mampu melindungi kesejahteraan rakyat Irian Barat – kini Papua, pada kenyataan dan prakteknya ialah Pemerintah Indonesia tak mampu melindungi warga dan masyarakat Papua, dengan mengerahkan aparat militer atau keamanan untuk melakukan pengejaran, penangkapan, penculikan, penyiksaan rakyat Papua. Tak sedikit jumlahnya rakyat Papua dibui, dibunuh,

diusir dengan cara-cara brutal dan kejam. Rakyat Papua mengalami penderitaan panjang dan merasakan hidup dalam kejahatan kemanusiaan.

Sekali lagi, dalam situasi ini, saya tetap menaruh keyakinan terhadap suara-suara dan mata hati bangsa dan rakyat Indonesia yang dengan jernih melihat kebenaran untuk rakyat Papua. Mari, kita rakyat dan bangsa Papua, untuk saling mendidik rakyat dan bangsa Indonesia untuk membuka jalan kebenaran sejarah penderitaan rakyat Papua.

Gubernur Papua Lukas Enembe (alm.) di Tolikara pada 8 Februari 2022 pernah mengungkapkan kerisauannya atas pengalaman hidup rakyat Papua. Berikut petikannya:

“Kehidupan tidak kebahagiaan, tidak ada. Orang Papua tidak happy. Seluruh Papua, di muka bumi ini yang tidak happy itu orang Papua. Kamu catat itu. Orang tidak hidup dalam kebahagiaan. Intan Jaya menangis, Puncak menangis, Nduga menangis, Pegunungan Bintang menangis, Raja Empat menangis, eh..apa, Maybrat, orang menangis. Orang tidak hidup aman di negeri kita sendiri. Tidak hidup aman. Kami lahir bukan untuk itu. Kami hidup, mau hidup lebih bagus, berbahagia. Kami hidup lebih menikmati kebahagiaan. Itu utama, orang Papua harus bahagia. Itu utama. Waa...”

Pernyataan Lukas Enembe, Gubernur Papua, mencerminkan bahwa janji-janji pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua itu tidak pernah terwujud. Karena itu, menurut penulis, keadilan rakyat Papua itu harus diperjuangkan tanpa kompromi. Keadilan tidak pernah diberikan kaum kolonial.

Para penguasa kolonial selalu gelisah dan merasa terganggu pada saat kaum tertindas sadar dan bersatu

dan dengan gigih memperjuangkan keadilan dan martabat kemanusiaan. Kaum terabaikan dan tertindas tahu, sadar dan mengerti bahwa keadilan adalah syarat mutlak perdamaian dan kesetaraan.

Dari waktu ke waktu, generasi ke generasi, semua orang Papua selalu belajar, bahwa rakyat Papua sebagai bangsa Melanesia pernah hidup di jalan kebenaran, sebagai orang beriman seperti digambarkan dalam sosok nabi Nuh dan raja Daud yang selalu menyatakan dan menyuarakan kebenaran, keadilan, kasih, kedamaian, dan martabat kemanusiaan Orang Asli Papua (OAP).

Kata 'Kesejahteraan' adalah bahasa usang dan topeng kekejaman penguasa kolonial modern Indonesia untuk menyembunyikan akar konflik Papua Barat yang sesungguhnya. Usang artinya kuno, lapuk, ketinggalan jaman, tidak terpakai.

Kata "kesejahteraan" itu bukan pernyataan baru. Kata kesejahteraan itu sudah disampaikan pada 14 Juli 1969 di Merauke pada saat Pepera 1969 dimulai. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia saat itu Jenderal Purn TNI Amir Machmud menyampaikan pidato kepada 175 orang yang dipilih dan ditunjuk oleh ABRI, Dewan Musyawarah Pepera 1969 sebagai berikut:

"...Pemerintah Indonesia berkeinginan dan mampu melindungi untuk kesejahteraan rakyat Irian Barat dan tinggal dengan Indonesia satu ideologi, Pancasila, satu bendera, satu pemerintah, satu Negara dari Sabang sampai Merauke...."

"...Indonesia mampu melindungi untuk kesejahteraan rakyat Irian Barat...."

(*Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN Assembly, agenda items 98, 19 November 1969 paragraph 28, p.42).*)

Pernyataan sangat paradoks dan kontradiktif. Pada kenyataan di lapangan terlihat bahwa wajah dan perilaku Pemerintah Indonesia seperti 'iblis' yang membangun kekuasaan dan pemerintahan tidak mengelal kemanusiaan. Tanah-tanah milik POAP dirampok atas nama pembangunan dan hutan-hutan POAP dihancurkan untuk perusahaan-perusahaan nasional dan multi nasional yang dibeking oleh TNI/Polri dengan alasan aset vital negara.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsot) pernah mengatakan bahwa, "Isu soal pemekaran wilayah yang telah menjadi amanat UU 21 tahun 2001 jadi 5 wilayah nanti. Ini tujuannya adalah untuk lebih fokus menyejahterakan rakyat Papua, karena Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia dan Indonesia bukan Indonesia tanpa Papua." (*Sumber: Detikcom, 11 September 2020*).

Paradoks dan omong kosong pemekaran yang fokus pada kesejahteraan rakyat Papua. Dari beberapa dekade berjalan, program pemekaran provinsi dan kabupaten itu lebih tampak suatu 'operasi' memarjinalkan atau memusnahkan rakyat Papua (penduduk asli Papua). Atas nama pembangunan menyingkirkan kepentingan rakyat Papua melalui 'operasi' transmigrasi dan rasisme secara terstruktur, terlembaga, masif, dan kolektif. (*)

BAB 11

Ideologi Papua Merdeka yang Tetap Hidup

Suara-suara orang Papua mengenai ideologi Papua Merdeka dalam tulisan ini terekam dari peristiwa dan kegiatan di berbagai tempat di Tanah Papua, dari orang-orang Papua biasa, yang polos, dan jujur. Suara-suara itu disampaikan oleh orang-orang asli Papua secara terus terang, terhormat, dan bermartabat.

Melihat pengalaman dalam beragam fenomena rakyat Papua, saya tertarik dengan pernyataan Prof. Paul Ekman yang dalam penelitiannya menempatkan orang Papua, Ras Melanesia, sebagai manusia terjujur. "Papua adalah *the last honest person on earth* atau Papua adalah manusia terjujur terakhir yang disisakan di muka bumi ini."

Apa yang dikatakan oleh Prof. Paul Ekman menandakan pandangan saya tentang orang Papua bukan sekadar kiasan. Kejujuran, keterbukaan, dan kepolosan dalam mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pendapatnya, akan saya ceritakan dari sejumlah kegiatan keagamaan maupun forum diskusi publik yang saya ikuti.

Pada 24 Agustus 2020 diselenggarakan kegiatan rohani Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Stadion Sepakbola Mandala Jayapura, dengan pembicara Pendeta Gilbert Lumoindong, dengan tema Papua Bermazmur. Sebelum membawakan Firman Tuhan, Pendeta Gilbert mengajak umat Tuhan yang hadir dalam KKR tersebut

dengan dua permintaan.

Permintaan pertama, Pendeta Gilbert, mengatakan seperti ini, “Saudara-saudara, kalau saya sampaikan Indonesia, dijawab dengan Merdeka.” Permintaan kedua, “Saudara-saudara, kalau saya sampaikan Papua, dijawab Luar Biasa.” Setelah mengungkapkan ajakan dan panduan itu, makan Pendeta Gilbert pun memulai dengan mengucapkan “Indonesia...” Orang Papua menjawab “No.” Dan ketika pendeta meneriakkan “Papua...” Dengan serentak peserta menjawab “Merdeka...”

Ucapan berbalas antara Pendeta Gilbert dan jemaat itu berulang dengan kata yang sama, padahal ia telah mengungkapkan dan memberikan panduan atau arahan yang benar, namun apaya yang diucapkan dengan jawaban jemaat berbeda. Suara “Indonesia.... No...” dan “Papua.... Merdeka....” bergema tiga kali berturut-turut.

Dalam peristiwa ini, yang perlu disadari adalah suara jemaat tersebut tanpa diatur atau direkayasa seperti acara-acara resmi umumnya yang diadakan oleh pemerintah maupun aparat keamanan. Suara jemaat dalam acara KKR itu murni, bahkan suara sesuai hati nurani dan yang dirindukan jemaat.

Upaya pendeta Gilbert untuk mengatur umat ternyata tak diindahkan. Hal ini tentu harus dilihat dengan objektif juga. Mengapa Pendeta Gilbert merancang ajakan dan jawaban seperti itu? Bukannya sebaiknya ajakan itu mengarah pada kerohanian. Sungguh, respon umat di sana terasa sebagai sebuah kejujuran. Sementara itu, apa yang dilakukan pendeta kurangnya tepat dalam acara KKR itu.

Peristiwa lain terjadi pada 2011 silam. Ketika Jaringan Damai Papua (JDP) melaksanakan kegiatan Konferensi Perdamaian Papua pada 5-7 Juli 2011 di

Auditorium Universitas Cenderawasih Jayapura. Konferensi itu dihadiri oleh para pembicara, antara lain: Menkopolkam Djoko Suyanto, Gubernur Papua, Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Uskup Jayapura Leo Laba Ladjar, OFM, Dr. Toni Wanggai, Pdt. Dr. Benny Giay, dan saya, Dr. Socratez Yoman.

Dalam konferensi itu para pembicara diberi kesempatan menyampaikan materi. Tiba gilirannya Pangdam XVII Cenderawasih. Di depan peserta konferensi, Bapak Pangdam memulai dengan permintaan kepada peserta semacam yel-yel.

“Saudara-saudara, kalau saya sebut ‘Papua’ saudara-saudara peserta menyahut dengan kata “Damai” tiga kali. Lalu Pangdam Cenderawasih saat itu mengatakan, “Papua...”. Peserta yang mestinya menjawab “Damai... Damai...Damai...” justru meneriakkan “Merdeka, Merdeka, Merdeka...”

Masih di tahun yang sama 2011, sebuah agenda besar dilaksanakan di kota Manokwari. Saya dan Pendeta Dr. Marthen Luther Wanma menggelar pertemuan dengan masyarakat Manokwari di Gedung Ibadah Jemaat GKI Effata pada Desember 2011. Agenda pertemuan itu mensosialisasikan informasi terkait hasil pertemuan dengan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas pada 16 Desember 2011.

Dalam pertemuan itu, kami membuka pertanyaan awal sebelum kami menyampaikan informasi yang lebih utama. “Saudara-saudara, siapa-siapa yang mau merdeka di atas tanah leluhur orang-orang Melanesia ini?” Pertanyaan itu ditanggapi oleh rakyat yang hadir dan memenuhi gedung itu berdiri serentak, mengangkat tangan dan mengatakan, “Merdeka....Merdeka...”

Merdeka.” Yang tidak ikut berdiri pada waktu itu tiga orang aparatur sipil negara (ASN), salah satunya Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari.

Peristiwa berikutnya, saat kami sosialisasi terkait pertemuan tokoh-tokoh agama di Papua dengan Presiden Yudhyono di Sorong pada 20 Januari 2012. Pada pertemuan itu, hadir perwakilan dari Danrem, yaitu Korem 181/Praja Vira Tama (PVT) Sorong dan Kaporesta Sorong. Saya mengajukan pertanyaan yang sama, “Saudara-saudara, siapa-siapa yang mau merdeka di atas Tanah leluhur orang-orang Melanesia ini?” Rakyat yang hadir dan memenuhi gedung itu berdiri serentak dan angkat tangan dan mengatakan, “Merdeka....Merdeka... Merdeka.” Yang tidak ikut berdiri pada waktu itu yang mewakili Danrem dan Kapolresta.

Kemudian, pada 26 Oktober 2023, saya diundang salah satu Ikatan masyarakat adat. Saya diminta untuk melayani Firman Tuhan pada saat ibadah pembukaan. Selesai pembukaan, saya kembali atau pulang ke kota. Waktu saya hendak naik mobil, Ketua Panitia mendekati saya, “Maaf bapak, besok datang sampaikan materi.” Saya sanggupi.

Esoknya, saya memberikan seminar yang kurang lebih waktunya 30 menit karena harus segera kembali untuk mempersiapkan ibadah HUT ke-67 Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua pada 28 Oktober 2023.

Ketika menyampaikan sesi materi, saya sempat bertanya kepada semua peserta yang hadir. “Apakah saudara-saudara berkeinginan untuk Papua Barat merdeka?” Semua peserta yang ada di ruangan dan di luar dengan kompak dan satu nada mengatakan, “Papua merdeka”.

Peristiwa yang senada juga terjadi pada 28 Desember 2023, waktu penyambutan jenazah almarhum Lukas

Enembe, mantan Gubernur Papua. Saya mendatangi kumpulan masyarakat dan mahasiswa yang menduduki badan Jalan Expo. Di situ ada aparat keamanan TNI/Polri yang sedang memarkir mobil dan Kepala Kepolisian Sektor Abepura (Kapolsek) Victor Makbon sedang berkomunikasi dengan mahasiswa dan masyarakat untuk situasi damai dan aman dalam penyambutan jenazah alm. Lukas Enembe.

Saya sampai di Expo dan saya mengambil Megaphone dan saya minta semua orang yang ada duduk dan tenang. Saya sampaikan, "Saudara-saudara, bapak alm. Lukas Enembe adalah pemimpin rakyat dan bangsa Papua yang terhormat dan bermartabat, maka kita jempuit dengan cara bermartabat dan terhormat." Pekikan suara merdeka itu muncul di tengah-tengah rakyat Papua, tatkala saya menyebutkan kata: 'Papua', yang disambut dengan jawaban 'merdeka', selama tiga kali.

Dari berbagai peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat itu menunjukkan bahwa sesungguhnya rekayasa dan manipulasi di Tanah Papua sudah berlalu. Kesempatan berpura-pura sudah tidak ada tempat di bumi Papua. Keinginan besar rakyat Papua untuk memperoleh kemerdekaan bagaikan api yang kobarnya semakin membesar.

Kekerasan dan kekejaman Negara yang dilakukan kepada rakyat dan bangsa Papua tidak mampu mematahkan suara yang hidup di hati nuraninya. Penderitaan panjang karena menjadi korban kekerasan atas nama NKRI, tidak mampu untuk memendam suara nurani rakyat dan bangsa Papua. Bahkan, hati nurani rakyat Papua tak lagi bisa dimanipulasi dengan berbagai janji dan harapan-harapan kosong dari Pemerintah Pusat di Jakarta.

BAGIAN III

KEKERASAN DAN MILITERISME

BAB 12

Tanah Papua di Bawah Kontrol Militer

Operasi militer di Tanah Papua telah berumur puluhan tahun. Operasi militer yang hingga sekarang terus berlangsung untuk mengamankan wilayah, yang menjadi bagian kedaulatan Indonesia – sesudah proses agitasi dan pendudukan pada masa lampau.

Barangkali tidak begitu sulit saat membuka lembaran sejarah Papua dan menemukan bagian pencerahan kekuatan militer untuk merebut wilayah Papua. Sudah beberapa dekade perang dan pencerahan kekuatan armada dan pasukan militer itu, namun mengapa hari ini lembaran lama itu seakan terus menerus tiada bagian akhirnya.

Warisan kolonialisme itu yang terjaga berkat dukungan militer, yang melakukan aksi-aksi untuk meredam dan menekan rakyat Papua yang terus bersuara untuk melawan dan menolak tunduk pada kekuasaan Indonesia atau Pemerintah Pusat di Jakarta.

Pada 24 Januari 2022 Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kepada CNN-Indonesia mengatakan mengembalikan operasi penanganan keamanan di Papua dan Papua Barat sama seperti yang diterapkan di provinsi lain. “Secara umum ada beberapa perubahan yang kami lakukan untuk menghadapi dinamika permasalahan di sana secara jangka panjang, yaitu dengan mengembalikan

tugas-tugas atau operasi yang ada di Papua dan Papua Barat jadi bagian tugas satuan organik seperti di provinsi dan pulau lain di Indonesia.”

Jenderal Andika Perkasa juta menyampaikan penambahan pasukan di berbagai wilayah yang dianggap sebagai titik-titik baru. Ia menyebutkan akan ada penambahan pasukan titik-titik baru di kedua provinsi, Papua dan Papua Barat, yaitu Satgas Kodim Paniai, Kodim Intan Jaya, Kodim Puncak, Kodim Lani Jaya, Kodim Yalimo, Kodim Pegunungan Bintang, dan Kodim Nduga.

Pada 17 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022, Polri menggelar Operasi Damai Cartenz yang merupakan pengganti Satgas Operasi Nemangkawi, dengan total 1.925 personel yang terdiri dari 528 personel Polda Papua, 1.296 Personel dari Mabes Polri serta 101 Prajurit TNI.

Penambahan pasukan dan operasi-operasi militer, baik yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia maupun juga Kepolisian RI, telah menunjukkan bahwa negara menggunakan militer untuk mengontrol wilayah dan masyarakat Papua. Dominannya peran militer dalam aktivitas sosial dan mengisi ruang-ruang publik di masyarakat mempersempit dan membatasi ruang demokrasi di Tanah Papua.

Analisis Papua, yang kini juga Komisioner di Komnas HAM RI, Amiruddin al Rahab, mengungkapkan bahwa sejarah kehadiran militer di Papua yang turut menambah daftar panjang kekerasan terhadap orang Papua. Dalam buku *Heboh Papua* (2010:43), Amiruddin menyebutkan ABRI – kini TNI, bagi orang Papua menampakkan wajah Indonesia. “Orang-orang Papua secara perlahan, baik elit maupun jelata juga mulai mengenal Indonesia dalam

arti sesungguhnya. Singkatnya dalam pandangan orang Papua, ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI.”

Seperti yang telah saya sebutkan di atas, kehadiran militer itu juga berkaitan dengan adanya bisnis di Tanah Papua. Artinya, berbagai fenomena kekerasan yang melibatkan militer, di antaranya juga melibatkan aktivitas ekonomi di Papua. Amirruddin kembali mengingatkan tentang kehadiran PT Freepot di Papua yang juga memunculkan peran dan kehadiran militer di Tanah Papua. Berikut kutipannya dalam buku *Heboh Papua: Perang Rahasia-Trauma dan Separatisme*: al Rahab: 2010:46).

“Semakin menghujamnya cengkeraman militer terhadap kehidupan sosial politik di Papua juga tidak terlepas dari potensi ekonomi daerah ini yang begitu besar. Hal itu terlihat ketika PT Freeport mulai menanamkan investasinya di Papua, untuk melindungi PT Freeport, militer di Papua mulai mengembangkan pengaruh dalam politik lokal dengan cara yang lebih keras. Selain itu, militer juga memperbesar kekuasaannya dengan menempatkan diri sebagai pelindung dari menggalmnya ribuan para imigran dan transmigrasi dari luar Papua.”

Berbagai fenomena kekerasan dan konflik di Papua, menegaskan bahwa peran militer, yang tercatat dalam sejarah Papua pada 1960-an, telah memperkuat dan memperkokoh praktik-praktik kolonialisme dan kapitalisme hingga saat ini. Bahkan, saya melihat kolonialisme identik dengan militerisme, atau kapitalisme identik dengan militerisme. Ini semacam kekuatan yang menyatu menjadi kembar tiga: kolonialisme, kapitalisme, militerisme. Ketiganya seolah satu nyawa dan satu roh yang tak bisa terpisahkan.

Menengok peristiwa ekerasan negara melalui aparat keamanan di Nduga (2018), di Intan Jaya (2019), di Puncak Ilaga (2020), di Yahukimo (2021) itu tidak terlepas dari kepentingan kapatalisme dan kolonialisme. TPN-PB atau OPM yang tidak berdaya (*powerless*) selalu dikambing-hitamkan untuk operasi-operasi militer dengan tujuan penguasaan wilayah yang berpotensi adanya tambang emas dan kekayaan alam lainnya.

Dewan Gereja Papua (WPCC) pada 7 Oktober 2020 dalam Surat Gambala menyatakan bahwa remiliterisasi di Tanah Papua menjadi siasat Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan Otonomi Khusus secara sepihak dan mengembalikan, atau memulihkan, Tanah Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) – yang sebenarnya belum dicabut. Remiliterisasi begitu nyata disaksikan pada tahun 2019 dengan adanya pengerahan pasukan yang besar ke Papua, dan mendukung dan memperkuat proses pembangunan KODIM dan KOREM.

Dewan Gereja Papua, melalui Surat Gambala, berpendapat berdasarkan fakta-fakta di lapangan, program-program militer itu berjalan untuk tujuan penguasaan sumber daya alam Tanah Papua secara masif.

“Menurut kami, Surat ini tidak keluar dari ruang kosong atau tidak jatuh dari langit tetapi dari tengah dinamika Tanah Papua. Oleh karena itu melalui surat ini, kami meminta Bapak Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI dan POLRI, dan Presiden dari negara anggota Dewan HAM PBB, agar menghentikan status DOM (Daerah Operasi Militer) atau ‘Remiliterisasi’ Tanah Papua. Karena hal ini akan terus mempertontonkan kekuatan militer Negara tanpa memberi ruang demokrasi dan kebebasan mengemukakan pendapat/berkumpul kepada orang Papua.”

Kini, ketika kekuatan militer dalam jumlahnya semakin membesar di Tanah Papua, semakin memunculkan banyak masalah keamanan. Kehadiran kekuatan militer atau aparat keamanan yang berlebihan di Tanah Papua telah mempersempit ruang gerak orang-orang Papua, yang juga tingkat kesadarannya dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran semakin membesar pula. Di sinilah, masyarakat sipil yang menyuarakan kepentingan orang-orang asli Papua yang tersingkir dan tertindas, kemudian berbenturan keras oleh militer – yang dipakai untuk merespons sikap-sikap kritis di kalangan masyarakat.

Militerisasi di Tanah Papua

Jumlah penduduk di Pulau Papua saat ini berjumlah sekitar 4.392.024 jiwa. Rinciannya penduduk yang tersebar di Provinsi Papua sebanyak 3.322.526 jiwa dan sekitar 1.069.498 jiwa penduduk di Provinsi Papua Barat.

Luas Kepulauan Papua 455.092 km² dihuni oleh sekitar 4,3 juta lebih. Hal yang membuat saya bertanya adalah penambahan jumlah pos-pos dan markas komando bagi aparat keamanan jumlahnya terus meningkat. Kodim dan Polres dan berbagai kesatuan terus ditingkatkan jumlahnya. Tak berlebihan, bila saya bertanya, apakah tanah Melanesia ini akan menjadi 'rumah militer-polisi' atau juga transmigran?

Pembangunan markas-markas polisi dan militer di sejumlah tempat telah membawa akibat negatif bagi masyarakat. Penduduk asli Papua dari Sorong sampai Merauke akan menanggung akibatnya dengan kehilangan tanahnya. Tanah mereka terampas karena proyek pembangunan gedung-gedung kantor, markas

Kodam, Polda, Kodim, dan Polres.

Bertambahnya markas militer dan kepolisian semakin meluas sejak pelaksanaan Otonomi Khusus Papua pada 2001. Ini yang mungkin tidak dipikirkan atau dibayangkan oleh orang asli Papua, bahwa di antara pembangunan di era Otsus, juga dikembangkan pembangunan markas-markas dan pos-pos aparat keamanan, baik TNI maupun Kepolisian RI.

Di era Otonomi Khusus tercatat ada pembangunan Kodim dan Koramil baru di seluruh Tanah Papua. Sementara ini bisa dicatat, seperti pembangunan dan pendirian Kodim 1714 Puncak Jaya, Kodim 1715 Yahukimo, Batalyon 756 Jayawijaya, Koramil 1715 Kenyam, Nduga. Jumlah ini akan terus bertambah dan berkembang lagi di daerah-daerah, dari Sorong sampai Merauke.

Sementara itu Kepolisian RI juga menambah pos-pos atau pun markas kepolisian di berbagai daerah di Tanah Papua. Sementara ini tercatat pembangunan untuk beberapa Polres, seperti: Polres Puncak Jaya, Polres Lanny Jaya, Polres Tolikara, Polres Intan Jaya, dan Polres Yahukimo. Sama seperti markas TNI, jumlah Polres ini akan bertambah dari Sorong sampai Merauke.

Baik markas Kepolisian maupun TNI memakan banyak biaya. Misalnya, pembangunan kantor Polres Puncak telah menelan biaya 13 milyar lebih. Data biaya ini diperoleh dari pesan Kapolda Papua, Jenderal Pol. Paulus Waterpauw yang beredar di *WhatsApp* pada 21 Juli 2020, yang juga saya terima.

“Yth. Bp Kapolri, izin melaporkan saat ini kami bersama Pangdam di Kab. Puncak Ilaga dlm rangka laksanakan peresmian Polres Kab Puncak Ilaga yang dibantu

anggaran pemda Puncak 13 M lebih sejak tahun 2016, kemarin kami juga telah ikut peletakkan batu pertama Kodim Puncak Ilaga di Distrik Gome Kab Puncak, dump perkembangan akan dilapkan ksp pertama Kapolda Papua.”

Pertanyaannya ialah dari mana sumber dana pembangunan Kodim dan Polres di setiap kabupaten baru dalam era Otonomi Khusus? Apakah rakyat Papua membutuhkan pembangunan Kodim dan Polres di setiap kabupaten? Apakah dana 13 M lebih dari pemerintah daerah Puncak ini berasal dari dana Otonomi Khusus, dana APBD, atau APDN?

Fakta di lapangan, sering dijumpai, bahwa keberadaan atau pun penambahan-penambahan markas-markas keamanan baik TNI maupun Kepolisian RI, terkait dengan konflik yang terjadi di Papua. Alih-alih untuk keamanan dan perlindungan warga, aparat keamanan menjadi bagian konflik yang menimbulkan krisis kemanusiaan berkepanjangan dan tak terselesaikan.

Konflik di Nduga, salah satu daerah yang kini berada dalam krisis kemanusiaan. Operasi keamanan atau militer telah melahirkan tragedi kemanusiaan yang panjang. Penduduk asli Papua mengungsi ke hutan, dalam ketakutan, sebagian bahkan meninggal karena kelaparan dan jatuh sakit. Bahkan, ini memutus generasi Papua, karena pendidikan anak-anak terputus, sekolah tutup, dan tak ada guru atau pengajar.

Operasi militer di Nduga dari Desember 2018 hingga 2020, berawal atas perintah Presiden Joko Widodo. Kepada awak media, Presiden Joko Widodo menyerukan

operasi militer untuk menyelesaikan konflik di Nduga, seperti dilansir *DetikNews* (5/12/2018), “Tangkap seluruh pelaku penembakan di Papua. Tumpas hingga akar”.

Presiden yang juga didukung oleh Wakil Presiden H.Jusuf Kalla saat itu menyatakan, seperti diberitakan *Tribunnews.com* (6/12/2018), bahwa, “Kasus ini ya polisi dan TNI operasi besar-besaran, karena ini jelas mereka, kelompok bersenjata yang menembak.”

Perintah operasi militer dari Presiden Republik Indonesia didukung oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, menyatakan bahwa “...DPR usul pemerintah tetapkan operasi militer selain perang di Papua” (*Kompas.com*, 13/12/2018).

Perintah operasi militer itu juga diperkuat oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, yang membuat situasi bertambah panas. “Soal KKB di Nduga Papua, kita habisi mereka.” (*Kompas.com/13/12/2018*)

Selama operasi militer di Kabupaten Nduga berlangsung pada Desember 2018 sampai 2020 banyak penduduk dari kalangan asli orang Papua menjadi korban. Ada sekitar 205 orang tewas karena ditembak aparat dan mati di tempat pengungsian karena kelaparan. Hampir 37.000 penduduk asli Nduga meninggalkan kampung halaman dan menyelamatkan diri ke Lanny Jaya, Timika, Ilaga dan Jayawijaya.

Pada 20 September 2020 Tentara Nasional Indonesia menembak mati Elias Karunggu (40) dan Selu Karunggu (20) di pinggir sungai Kenyem, di Kampung Meganggorak, Nduga. Alasannya, ayah dan anaknya diduga oleh TNI sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB).

Pada 19 Desember 2018, TNI menembak mati Pendeta Geyimin Nigiri (83) Tokoh Gereja dan Perintis Gereja Kemah Injil di Kabupaten Nduga. TNI menembak mati dan dibakar jenazah Geyimin dengan menyiram minyak tanah di belakang halaman rumahnya.

Ada kisah seorang ibu hamil yang sangat menyedihkan dan menyentuh hati nurani kita semua akibat Operasi Indonesia Militer di Nduga. Kisah ini dilaporkan oleh media lokal *Suarapapua.com* pada 8 Juni 2019 berikut ini.

“Saya melahirkan anak di tengah hutan pada 4 Desember 2018. Banyak orang berpikir anak saya sudah meninggal. Ternyata anak saya masih bernafas. Anak saya sakit, susah bernafas dan batuk berdarah. Suhu di hutan sangat dingin, jadi waktu kami berjalan lagi, saya merasa anak bayi saya sudah tidak bergerak. Kami pikir dia sudah meninggal. Keluarga sudah menyerah. Ada keluarga minta saya buang anak saya karena dikira dia sudah mati.

Tetapi saya tetap mengasahi dan membawa anak saya. Ya, kalau benar meninggal, saya harus kuburkan anak saya dengan baik walaupun di hutan. Karena saya terus membawa bayi saya, saudara laki-laki saya membuat api dan memanaskan daun pohon, dan daun yang dipanaskan itu dia tempelkan pada seluruh tubuh bayi saya. Setelah saudara laki-laki tempelkan daun yang dipanaskan di api itu, bayi saya bernafas dan minum susu.

Kami ketakutan karena TNI terus menembak ke tempat persembunyian kami. Kami terus berjalan di hutan dan kami mencari gua yang bisa untuk kami bersembunyi. Jadi, saya baru tiba dari Kuyawagi, Kabupaten Lanny Jaya. Kami berada di Kuyawagi sejak awal bulan Desember 2018. Sebelum di Kuyawagi, kami tinggal di hutan tanpa makan makanan yang cukup selama beberapa minggu. Kami sangat susah dan menderita di atas tanah kami sendiri.”

Pembela HAM Papua dari Yayasan Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem mengungkapkan bahwa dalam operasi di Nduga, TNI telah menembak mati 5 orang sipil pada 20 September 2019 di Gua Gunung Kenbobo, Distrik Inye dan mayat mereka dikuburkan dalam satu kuburan. Nama-nama korban tewas: (1) Yuliana Dorongi (35/Perempuan), (2) Yulince Bugi (25/ Perempuan); (3) Masen Kusumburue (26/ Perempuan); (4) Tolop Bugi (13/ Perempuan); (5) Hardius Bugi (15/L).

BAB 13

Kekerasan Militer: Wajah Buruk Negara di Papua

“...kalau kurang pasukan di organik yang ada di daerah (Papua), kurang ya kita tambah” kata Mendagri, Dr. Tito Karnavian.

Pada Kamis, 23 Juli 2020 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kepada media. Berikut beberapa kutipan yang bisa dicatat.

Daripada nanti bunuh orang sana, bunuh orang sini akhirnya, kemudian ya penegakan hukum harus kita lakukan. Bunuh orang, tembak orang, pasti akan ditegakkan hukum karena kita negara hukum.”

“Negara tidak boleh kalah dengan siapa pun juga melanggar hukum, termasuk kelompok bersenjata ini. Kalau dia bunuh orang ya kita tegakkan, kalau kurang pasukan di organik yang ada di daerah (Papua) kurang ya kita tambah.”

Beberapa kutipan pernyataan Mendagri Tito Karnavian itu merespon konflik bersenjata yang terjadi di Papua. Dari pernyataan itu, muncul pertanyaan yang mengusik saya dan juga Orang-orang Asli Papua, apakah penegakan hukum di Papua hanya berlaku bagi orang asli Papua? Di mana rasa keadilan bagi Orang Asli Papua (OAP)?

Jika merujuk masa-masa konflik yang berlangsung di Papua, ada ribuan OAP yang menjadi korban tewas

oleh aparat keamanan. Sebagai contoh, kita lihat peristiwa yang terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yaitu peristiwa kematian 4 siswa di Paniai pada 8 Desember 2014. Peristiwa penembakan ini dilakukan oleh aparat keamanan dari TNI. Apakah para pelakunya juga mendapatkan penegakan hukum yang mesti dilakukan, seperti yang diungkapkan oleh Mendagri di atas?

Menurut penulis, ribuan aparat keamanan dan puluhan pasukan khusus yang didatangkan ke Tanah Papua merupakan cermin dan wajah kekuasaan Negara Indonesia yang sesungguhnya di Tanah Papua, sejak 1963 hingga saat ini.

Ketika saya membuka lembaran sejarah kekuasaan Indonesia di Papua pada 1960-an, saya menemukan wajah kekuasaan dan kekerasan telah muncul di tengah orang-orang Papua. Dinamika sejarah dan politik saat itu cukup jelas menggambarkan Negara menunjukkan kekuatan dan kekuasaan terhadap orang-orang Papua dengan tidak manusiawi, bahkan tak mengenal penghormatan kepada kemanusiaan.

Saya membaca catatan Acub Zainal dalam buku memoarnya berjudul *I Love the Army*. Acub Zainal, panglima militer Indonesia, yang kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Irian Jaya saat itu menulis situasi yang menegangkan setelah Negara Indonesia mendapatkan kekuasaannya, usai UNTEA meninggalkan Papua pada 1 Mei 1963.

“Begitu mendapat tempat di Papua setelah UNTEA tanggal 1 Mei 1963, para elit yang menampakkan kekuatannya dan membakar semua buku, dokumen-

dokumen, jurnal dan semua tulisan tentang sejarah, etnografi, penduduk, pemerintahan, semua dibakar di depan orang banyak di halaman Kantor DPRP sekarang di Jayapura”, tulis Acub Zainal. Sumber lain dari arsip Partai Nasional Indonesia Daerah Irian Barat, yaitu Resolusi Partai Nasional Indonesia (PNI) Daerah Irian Barat, 6 Juni 1963, No.2/PN-II/1973, mengungkapkan adanya kekuatan dan kekuasaan digunakan untuk merampas dan menjarah. Demikian situasi itu digambarkan dalam arsip berikut:

“Pada awal Juni 1963 banyak putra dan putri Irian Barat yang Pegawai Negeri dihentikan dan digeser dan digantikan oleh petinggi Indonesia yang baru datang. Di Jayapura dan Biak perampokan yang dilakukan para pendatang yang masuk ke rumah-rumah pegawai dan menjarah barang-barang berupa pesawat radio, radio, tempat tidur dan lemari es, pakaian, bahkan hasil-hasil kebun mereka ambil dan bawa pergi. Ini terjadi di beberapa kota di Papua sejak Mei sampai Juni 1963.”

“Mereka mendatangi rumah-rumah yang baru ditinggalkan petinggi pemerintah Belanda dan kantor-kantor pemerintah, mengambil/merampok semua barang-barang dari rumah-rumah dan kantor-kantor peninggalan Belanda, kemudian dinaikkan ke mobil/truk yang sudah diparkir untuk dibawa keluar Papua. Setelah merampok barang-barang dari rumah dan kantor pemerintah Belanda, kloter/rombongan lain masuk lagi ke rumah-rumah para pegawai orang Papua; di kota Biak, Kotabaru (Jayapura) para elit Indonesia ambil barang-barang dan mereka bawa untuk dikirim keluar Papua. Belakangan Presiden Soekarno sendiri menyampaikan teguran lewat pidato Dewan Pengurus Partai Nasional.” (Resolusi Partai Nasional Indonesia (PNI) Dalam Rapat Dewan Daerah ke I tanggal 9 Djuni 1963).

Tak hanya perampasan dan penjarahan, aksi-aksi pembersihan simbol-simbol nasional Papua dilakukan oleh militer saat itu, seperti yang terungkap dalam Buletin TAPOL No.53, September 1982.

“Pada bulan April 1963, Adolof Henesby Kepala Sekolah salah satu Sekolah Kristen di Jayapura ditangkap oleh pasukan tentara Indonesia. Sekolahnya digrebek dan cari simbol-simbol nasional Papua, bendera-bendera, buku-buku, kartu-kartu, sesuatu yang berhubungan dengan budaya orang-orang Papua diambil. Adolof Henesby dibawa ke asrama tentara Indonesia dan diinterogasi tentang mengapa dia masih memelihara dan menyimpan lambang-lambang Papua.”

Laporan itu juga mengungkapkan aksi ‘bumi hangus’ oleh ABRI terhadap simbol-simbol nasionalisme Papua. “Pembakaran besar-besaran tentang semua buku-buku teks dari sekolah, sejarah dan semua simbol-simbol nasionalisme Papua di Taman Imbi dilakukan ABRI (sekarang:TNI) dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Indonesia, Mrs.Rusilah Sardjono.”

Aksi-aksi ABRI saat itu merupakan bagian dari kebijakan Presiden Republik Indonesia, Ir. Sukarno yang mengeluarkan Surat Larangan pada Mei Nomor 8 Tahun 1963. “Melarang/menghalangi atas bangkitnya cabang-cabang Partai Baru di Irian Barat. Di daerah Irian Barat dilarang kegiatan politik dalam bentuk rapat umum, demonstrasi-demonstrasi, percetakan, publikasi, pengumuman-pengumuman, penyebaran, perdagangan atau artikel, pameran umum, gambaran-gambaran atau foto-foto tanpa ijin pertama dari gubernur atau pejabat resmi yang ditunjuk oleh Presiden.”

Perampokan dan penjarahan yang dilakukan militer Indonesia digambarkan Djopari sebagai berikut.

“...Belanda waktu berangkat meninggalkan Irian Barat, meninggalkan segala sesuatu yang merupakan sarana umum dan milik pribadi kepada pemerintah setempat serta kenalan atau bawahannya. Dalam hal ini adalah berbagai perlengkapan militer di asrama-asrama militer, perlengkapan di kantor-kantor pemerintah, sarana-sarana di lapangan terbang dan pelabuhan, perlengkapan rumah dinas lengkap dan rumah-rumah pribadi lengkap. Setelah tanggal 1 Mei 1963 masyarakat di kota-kota Jayapura, Biak Manokwari dan Sorong menyaksikan berbagai fasilitas untuk digunakan di Irian Jaya itu diangkut ke daerah Indonesia lain menggunakan transportasi yang ada apakah itu tempat tidur, kasur, mesin cuci, kaca nako, wash tafel, oven, sepeda, vespa, kipas angin, tangga pesawat terbang di lapangan terbang internasional Mokmer Biak, dan dok apung di Manokwari.” (Djopari, 1993, hal.83, baca: Yoman, Pintu Menuju Papua Merdeka: 2001, hal.49).

Filep Karma dalam bukunya “Seakan Kitorang Setengah Binatang” mengungkapkan bahwa perilaku Negara yang memperlakukan orang Papua setengah binatang. “Mereka (baca: Indonesia) memandangi, menganggap dan memperlakukan orang Papua sebagai setengah manusia, tidak diakui sebagai manusia pada umumnya.”

Ia mengungkapkan bahwa perampasan hak-hak orang Papua terjadi di berbagai sektor, baik swasta maupun di pemerintahan. “Contoh, dulu di Papua, ada perusahaan Nieuwnhuijs, yang dimiliki keluarga saya, Rumpaisum itu diambil alih oleh orang asal Manado. Sekarang perusahaan itu milik mereka, bergerak dalam ekspedisi muatan kapal laut.”

Negara menggunakan aparat keamanan, termasuk puluhan pasukan khusus yang didatangkan ke Papua, untuk mendidik dan mengubah paradigma atau cara pandang orang Indonesia terhadap orang asli Papua (OAP). Pendekatan kekuasaan keamanan seringkali justru merendahkan martabat orang Papua, yang sesungguhnya membutuhkan penghargaan nilai-nilai kemanusiaan dan merindukan kehidupan yang damai.

Pastor Frans Lieshout, OFM dalam buku Pastor Frans Lieshout OFM: Gembala dan Guru Bagi Papua (2020:593), memberikan kesaksian:

“Pada tanggal 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian.”

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno dalam buku “Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme Bunga Rampai Etika Politik Aktual” (2015:255-257). Pada bagian bahasan soal Papua, Romo Magnis menulis demikian:

“Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia. Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theys Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya untuk pulang dari sebuah resepsi Kopassus.”

“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” (hal.255)

“...kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (hal.257)

Pastor Frans Leishout, OFM melayani di Papua selama 56 tahun sejak tiba di Papua pada 18 April 1969 dan kembali ke Belanda pada 28 Oktober 2019. Pastor Frans dalam surat kabar Belanda *De Volkskrant* (Koran Rakyat) yang diterbitkan pada 10 Januari 2020, menyampaikan pengalamannya di Tanah Papua.

“Saya sempat ikut salah satu penerbangan KLM yang terakhir ke Hollandia, dan pada tanggal 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian.”

“Saat itu saya sendiri melihat amukan mereka. Menjarah barang-barang bukan hanya di toko-toko, tetapi juga di rumah-rumah sakit. Macam-macam barang diambil dan dikirim dengan kapal itu ke Jakarta. Di mana-mana ada kayu api unggun: buku-buku dan dokumen-dokumen arsip Belanda di bakar.” (2020:593)

Pastor Frans menggambarkan tentang siapa sebenarnya Indonesia. Menurutnya wajah Indonesia dari semula adalah wajah kekuasaan militer. Uraian kesaksiaan dan pengalaman Pastor Frans saya lihat juga hari ini. Rupa Indonesia di Tanah Papua adalah wajah militer yang tak lepas dari sejarah kekerasan. Meski aparat keamanan datang ke kampung-kampung dengan buku dan sapaan-sapaan, itu tak bisa menghapus wajah kekerasan yang melekat dalam alat-alat keamanan negara itu.

BAB 14

Ambisi Menguasai [Kekayaan] Papua, Gereja Pun Menjadi Korban Kekerasan Militer

Ambisi dan motivasi menguasai Tanah Papua itu telah tertanam kuat jauh sebelum jajak pendapat atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Indonesia memiliki motivasi kuat untuk menguasai Papua. Hal ini tampak dalam beragam sejarah dan peristiwa yang dialami oleh penduduk Papua, yang merasa tanah dan kekayaan alamnya dicuri, dijarah, dan dirampok. Beberapa dekade di bawah kekuasaan Pemerintah Indonesia, masyarakat asli Papua hidup menderita, miskin, dan tersingkirkan.

Kehidupan masyarakat asli Papua yang buruk ini terjadi karena adanya upaya pendudukan dan penguasaan atas wilayah Papua melalui aneksasi. Kekuatan politik, yang didukung dengan militer, telah melumpuhkan rakyat Papua, dan dibuat tunduk, meski berbagai protes dan perlawanan dilakukan oleh rakyat Papua. Hingga, rakyat Papua selama bertahun-tahun hidup dalam ketidakberdayaan di berbagai aspek kehidupan; politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan.

Kolonialisme, misalnya, yang telah dibahas dalam bagian lain buku ini, terus berkembang di Tanah Papua karena dukungan kapitalisme. Wilayah Papua yang kaya raya itu menjadi motivasi pendudukan dan penjajahan

baru (setelah penjajahan Belanda) Indonesia yang ditopang Amerika Serikat.

Dan, praktik politik kapitalisme tingkat tinggi tersebut telah memakan korban para tokoh penting, antara lain, Sekretaris Jenderal PBB, Dag Hammarskjold yang tewas dalam misinya di Kongo pada 17/18 September 1961, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy tewas ditembak oleh Lee Harvey Oswald pada 22 November 1963, dan Presiden Ir. Soekarno dilengserkan pada 1965 dengan tuduhan mendukung Komunis – saat pecahnya Perang Dingin, melibatkan blok AS dan Uni Soviet.

Ketiga pemimpin tersebut menjadi korban diangggap menghambat upaya-upaya penguasaan kekayaan alam Papua. Para pemilik modal dengan secepatnya membuat perjanjian kontrak kerja PT Freeport McMoran dengan Soeharto pada 7 April 1967 untuk tambang dan uranium di Namangkawi/Ndugu-Ndugu (Tembagapura), Timika, Mimika, Papua. Perjanjian kontrak kerja ini dibuat dua tahun sebelum Papua masuk ke dalam wilayah Indonesia melalui Pepera 1969 – yang dilakukan dengan rekayasa dan tekanan tentara dan senjata.

Setelah itu, korban-korban dalam pertarungan perebutan sumber daya alam di Papua, terutama di areal tambang Freeport, terus berjatuhan. Konflik dan kekerasan terus terjadi, dan memakan banyak korban dari berbagai pihak.

Peristiwa penembakan di Kuala Kencana pada 30 Maret 2020 yang menewaskan Graeme Thomas Wall, seorang kebangsaan Selandia Baru dan melukai beberapa orang bukan peristiwa baru. Kekerasan kejahatan kemanusiaan ini sebagai peristiwa pengulangan seperti

yang terjadi banyak kasus serupa sebelumnya.

Kehadiran Freeport di gunung emas ini sebagai simbol kekerasan, kejahatan, dan tragedi kemanusiaan. Yang menjadi korbannya ialah pemilik tanah, rakyat sipil, dan karyawan Freeport dan juga aparat keamanan yang bertugas di Tembagapura.

Sayang sekali, dalam dinamika spiral kekerasan seperti ini, sudah lama rakyat Papua, Indonesia dan komunitas global menjadi korban kejahatan kebohongan dengan mendapat informasi dari media yang dikontrol penguasa Indonesia yang berkultur militer. Ada kejahatan konspirasi ekonomi dan politik yang menggunakan kekerasan keamanan di areal pertambangan emas di Mimika, Tembagapura khususnya, dan di seluruh West Papua dari Sorong hingga Merauke pada umumnya.

Suharto penguasa otoriter selama 32 tahun menggunakan kekuatan TNI untuk menjaga dan melindungi keamanan PT Freeport-Rio Tinto (PTFI), perusahaan tambang emas raksasa dunia milik Amerika.

Sebelum Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI, wilayah petambangan emas terbesar ketiga di dunia ini jarang terjadi penyerangan dan penembakan terhadap warga sipil karyawan PT Freeport. Setelah Undang-Undang pemisahan TNI-Kepolisian disahkan, peran TNI di Perusahaan PT Freeport ditarik dan digantikan dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melindungi dan menjaga keamanan PT Freeport.

Namun, perubahan ini tetap muncul kekerasan dan aksi penembakan, yang pelakunya diduga para pihak yang menguasai senjata di areal tambang Freeport. Peristiwa

yang sempat kontroversi terjadi ketika penembakan warga negara Amerika dan Indonesia pada 31 Agustus 2002 diungkapkan oleh Global Witness dalam laporan berjudul *Uang Keamanan Freeport dan Aparat Keamanan Indonesia*.

Tokoh Gereja Pun Menjadi Korban Kekerasan Militer

Tak sedikit tokoh-tokoh gereja, atau pun petugas gereja yang menjadi korban konflik dan kekerasan yang sedang terjadi di Tanah Papua. Peristiwa di Nduga, Puncak Jaya, dan Intan Jaya, masih ada tempat lain, operasi militer menunjukkan bahwa kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua sungguh-sungguh terjadi.

Sejak 2004 hingga 2020, setidaknya yang tercatat ada tiga pendeta yang menjadi korban penembakan oleh aparat militer (TNI), antara lain Pendeta Yeremia Zanambani, Pendeta Geyimin Nirigi, dan Pendeta Elisa Tabuni.

Empat tahun lalu, Sabtu, 19 September 2020, Pendeta Yeremia Zanambani di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, tertembak oleh anggota pasukan TNI yang sedang melakukan operasi militer. Ia mengalami korban kekerasan dan penembakan ketika beragai di kandang babi miliknya.

Pendeta Yeremia adalah Ketua Sekolah Teologia Atas (STA) di Hitadipa dan gembala jemaat Imanuel Hutadipa dari Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) daerah Hitadipa wilayah Papua 3, Penterjemah Alkitab bahasa Moni dan tokoh gereja, dan juga pemuka masyarakat suku Moni.

Akibat dari operasi militer, sekitar tujuh gereja dikosongkan. Para anggota jemaat menyelamatkan diri dengan melarikan diri ke hutan-hutan.

Kekejaman dan kejahatan TNI ini bagian yang tak terpisahkan dari perintah operasi militer oleh Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo di Nduga Papua sejak Desember 2018 yang menyebabkan pelanggaran berat HAM besar-besaran dilakukan TNI di Papua.

Dua tahun sebelum kematian pendeta Yeremia, Pendeta Geyimin Nirigi tewas ditembak oleh pasukan elit TNI tanggal 19 Desember 2018 di Distrik Mapenduma. Korban disuruh menggali tanah di belakang halaman rumah, kemudian ditembak mati dan disiram dengan minyak tanah di tubuhnya dan dibakar. Kapendam XVII Cenderawasih, Mohamad Aidi saat itu menyebarkan berita bahwa pendeta Geyimin Nigiri masih hidup dan sehat-sehat. Tetapi, hasil investigasi Yayasan Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Manusia Papua dipimpin langsung Direktur Theo Hesegem pada 25-27 Desember 2018 membuktikan, Pdt. Giyimin Nigiri (80/L) benar tewas di tangan pasukan elit TNI.

Kematian pendeta atau pimpinan gereja di Tanah Papua yang disebabkan oleh operasi militer pernah menjadi catatan kelam pada 2004 silam. Kala itu, terjadi di Puncak Jaya, jelang hari kemerdekaan RI, pada 16 Agustus 2004 silam. Korbannya adalah Pendeta Elisa Tabuni di Tingginambut, Puncak Jaya. Sebelumnya Pendeta Elisa Tabuni ditangkap, diborgol tangannya, dan diduga tewas ditembak oleh pasukan Kopassus yang saat itu dipimpin Dansatgas BAN-II/Koppasus, Letkol Inf.Yogi Gunawan.

Kekejaman, kekerasan, dan kebiadaban militer tersebut telah merendahkan martabat kemanusiaan. Gereja mengutuk keras dan mengecam tindakan tersebut yang telah menarget para para pendeta dan gembala

umat, dan Hamba Tuhan.

Kematian Hamba Tuhan itu menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat asli Papua terhadap negara dan pemerintah Indonesia. Tindakan-tindakan tidak berperikemanusiaan terhadap masyarakat asli Papua, bahkan kepada pimpinan dan tokoh gereja, memupus harapan dan melukai hati mendalam. Ketidakpercayaan inilah yang menyebabkan jauhnya mendapatkan keadilan dan penegakan hukum terhadap para korban kejahatan aparat keamanan.

Dalam kasus kematian Pendeta Yeremia, ketidakpercayaan itu memengaruhi upaya pencarian keadilan dan kebenaran yang dilakukan oleh negara. Saat itu, Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP) menolak Tim Investigasi kematian Pendeta Yeremia yang dibentuk Menkopolhukam Mahfud MD yang dinilai tidak independen. Hal ini karena pelaku-pelaku penembakan adalah alat negara, yang menjadi bagian dari pemerintah.

Penolakan itu bukan tidak beralasan. Masyarakat asli Papua mempunyai pengalaman panjang terkait tim-tim investigasi kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dibentuk negara, bekerja secara tidak transparan dan tidak dipertanggungjawabkan ke publik, bahkan terkesan menjadi bagian rekayasa. Pembentukan Tim Investigasi dari Menkopolhukam disinyalir bisa mengulangi upaya rekayasa dan sandiwara negara seperti Tim Investigasi yang dibentuk Menkopolhukam pada masa Luhut Panjaitan untuk menyelesaikan 13 kasus pelanggaran berat HAM di Papua.

Selain itu, pembentukan tim investigasi dari negara pada tahun 2015 dan 2020 memiliki kesan kuat untuk menghindari tekanan internasional dan menghalang-

halangi kunjungan utusan Komisionaris Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Papua untuk memantau langsung keadaan pelanggaran berat HAM.

Dalam Sidang Umum PBB, pemerintah Indonesia selalu tampil defensif dan menyerang serta marah-marah kepada negara-negara yang peduli dan bersuara untuk penghormatan martabat manusia, keadilan, dan perdamaian bagi Papua. Kalau memang tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sebaiknya Indonesia membuka ruang untuk perwakilan Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua.

Kejahatan Negara yang berdarah-darah selama 57 tahun, tidak hanya terjadi kepada Pendeta Yeremia, ada juga Pendeta Geyimin Nirigi yang tewas ditembak oleh pasukan elit TNI tanggal 19 Desember 2018 di Distrik Mapenduma. Korban disuruh menggali tanah di belakang halaman rumah dan kemudian ditembak mati, tubuhnya disiram dengan minyak tanah, dan dibakar dengan api. Kapendam XVII Cenderawasih, Mohamad Aidi diduga menyebarkan hoax bahwa pendeta Geyimin Nigiri masih hidup dan sehat-sehat. Tetapi, hasil investigasi Yayasan Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Manusia Papua yang dipimpin langsung Direktur Theo Hese gem pada 25-27 Desember 2018 membuktikan, Pdt. Giyimin Nigiri (80/L) benar tewas di tangan pasukan elit TNI.

Indonesia dengan gemilang melaksanakan operasi militer di era modern di Nduga sejak 4 Desember 2018 sampai 2020 yang menewaskan 110 orang anak, 38 orang perempuan, serta 95 orang laki-laki. Lebih kejam lagi pemerintah Indonesia dengan kekuatan militernya

menciptakan perang kemiskinan rakyat secara permanen khususnya di Nduga dan pada umumnya di Papua, dari Sorong sampai Merauke.

Theo Hesegem, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Manusia Papua, mengungkapkan dalam operasi militer di Nduga, TNI menewaskan/menembak mati 5 orang sipil pada 20 September 2019 di Gua Gunung Kenbobo, Distrik Inye dan mayat mereka dikuburkan dalam satu kuburan. Nama-nama korban tewas antara lain (1) Yuliana Dorongi (35/P), (2) Yulince Bugi (25/ P), (3) Masen Kusumburue (26/ P), (4) Tolop Bugi (13/ P), dan (5) Hardius Bugi (15/L).

Kejahatan dan pelanggaran berat HAM lain yang dilakukan TNI menewaskan Pendeta Elisa Tabuni di Tingginambut, Puncak Jaya pada 16 Agustus 2004. Sebelumnya Pendeta Elisa Tabuni ditangkap, diborgol tangannya, dan tewas ditembak anggota pasukan khusus TNI.

Kita masih ingat peristiwa 8 Desember 2014, serangkaian rentetan tembakan aparat keamanan telah menewaskan 4 siswa di Paniai: Simon Degey, Apinus Gobay, Alfius You, dan Yulian Yeimo. Kasus ini hingga sekarang belum diselesaikan, walaupun Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo berjanji pada bulan Desember 2014 untuk menyelesaikan secara tuntas kasus ini.

Amnesty International Indonesia dalam pemantauan mencatat dari Februari 2018 sampai September 2020 terjadi pembunuhan di luar hukum sebanyak 47 kasus dengan 96 korban jiwa. Secara rinci kasus-kasus tersebut meliputi 7 kasus penyidikan yang sedang berlangsung, 14 kasus penyidikan tidak dipublikasikan, 9 kasus tidak

ada penyidikan, 5 kasus mekanisme disiplin internal polisi, 1 kasus lewat penyelesaian adat, 2 kasus melalui pengadilan militer, 2 kasus melalui pengadilan pidana, dan 7 kasus dalam proses verifikasi.

Pemerintah Indonesia gagal menjalankan kewajibannya dalam penegakan HAM di Papua. Kekerasan negara yang menyebabkan pelanggaran berat HAM dan tragedi kemanusiaan terus meningkat dari waktu ke waktu dan pelakunya adalah sama yaitu negara. Para pelaku kejahatan kemanusiaan selalu dilindungi dan mendapat imunitas dari negara. Mereka juga diakui seperti pahlawan nasional setelah menewaskan rakyat sipil yang tidak berdaya dan bersalah.

BAB 15

Seruan Gereja Untuk Selesaikan Konflik Papua: Konsisten Suarakan Dialog Pemerintah dan ULMWP

“Orang-orang Papua Barat telah dikhianati hak-hak dasar mereka, termasuk hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri (the right to self-determination). Teriakan mereka untuk keadilan dan kebebasan telah jatuh pada telinga-telinga tuli di Jakarta. Saya selalu bersama mereka dalam doa saya tentang kebutuhan mereka.” (alm.

Arbishop Desmond Tutu)

Konflik di Tanah Papua terus terjadi karena Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan keamanan. Janji Presiden Joko Widodo yang hendak menyelesaikan persoalan hak asasi manusia dan konflik di Papua pun menguap begitu saja hingga di akhir masa jabatan dua periode.

Presiden Joko Widodo, yang dikenal presiden yang saat ini paling sering berkunjung ke Papua, lebih banyak menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur – itu pun tak banyak melibatkan orang asli Papua, sementara pelbagai konflik dan kekerasan terus terjadi, seperti peristiwa pembunuhan masyarakat Papua, konflik bersenjata di daerah-daerah pegunungan antara TPN-PB dan TNI-POLRI terus berlangsung hingga sekarang.

Berulang kali, tak kenal lelah, para pemimpin dan warga gereja di Papua memberikan perhatian agar konflik di Papua mendapatkan jalan keluarnya. Hal ini konsisten dilakukan oleh para pimpinan gereja di Tanah Papua.

Seruan-seruan moral dan suara profetis Gereja-gereja di Tanah Papua Barat dihadirkan dalam bagian ini karena pimpinan agama dan Gereja-gereja di Tanah Papua Barat tidak pernah membisu dan diam dalam melihat persoalan ketidakadilan dan ancaman kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat terhadap penduduk Orang Asli Papua.

Agama dan Gereja-gereja di Tanah Papua menilai, bahwa masalah pro dan kontra terhadap beragam persoalan konflik, misalnya, pelaksanaan Pepera 1969 tidak akan bisa diselesaikan dengan cara pemblokiran jalan, penangkapan, penahanan, atau pemukulan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Tindakan aparat keamanan menangkap, mengadili dan memenjarakan semua orang Papua pun tidak akan menyelesaikan persoalan Pepera.

Suara dan seruan moral dari gereja-gereja di Papua begitu konsisten mendesak penyelesaian konflik Papua secara dialog hingga ke akar persoalannya.

Sebagai catatan, pada 20 Maret 2022, Dewan Gereja Papua dengan jelas menyampaikan seruan moral, yaitu “Untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Tanah Papua, kami tetap konsisten mendesak dilakukan dialog antara Pemerintah Indonesia dengan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua), seperti yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam penyelesaian konflik Aceh”.

Tak main-main, Dewan Gereja Papua (WPCC) pada 21 November 2022 mengeluarkan seruan moral solusi untuk mengakhiri semua persoalan Papua kepada lembaga internasional. Berikut kutipan seruan moral itu:

“Meminta kepada Dewan HAM PBB (Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa) datang berkunjung ke Tanah Papua untuk melihat secara langsung situasi penderitaan panjang orang Papua selama 58 tahun.”

“Presiden Joko Widodo tetap konsisten mewujudkan statemennya pada 30 September 2019 untuk berdialog dengan kelompok Pro Referendum, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dimediasi pihak ketiga sebagaimana yang pernah terjadi antara Pemerintah RI dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Helsinki pada 15 Agustus 2005.”

Dewan Gereja Papua sebelumnya telah menegaskan kepada Presiden Joko Widodo agar berunding dengan kelompok organisasi politik Papua ULMWP, melalui Surat Gembala Dewan Gereja Papua yang disiarkan dalam momen 166 Tahun Perayaan Injil Masuk di Tanah Papua pada 5 Februari 2021.

“Presiden Jokowi, pada tanggal 30 September 2019, sudah berjanji di depan media massa di Jakarta bahwa pihaknya ingin bertemu dengan ‘kelompok Pro referendum Papua’. Sehingga kami percaya bahwa Indonesia/Jakarta pada akhirnya akan berunding dengan ULMWP. Melalui surat ini, kami menagih janji tersebut”, demikian penggalan kutipan seruan tersebut.

Kekerasan demi kekerasan tetap terjadi, dan konflik seakan tak terhenti. Situasi tersebut membuat sikap gereja terus menyerukan lebih keras lagi kepada para pihak yang terlibat konflik untuk menempuh jalan dialog secara damai.

Gereja-gereja di Tanah Papua yang berhimpun dalam Dewan Gereja Papua (WPCC) dan sekitar 57

Pastor Katolik Pribumi Papua bersama-sama mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perundingan damai dan setara dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) – kelompok yang kini merepresentasikan perjuangan rakyat Papua.

Pada 21 Juli 2020 dari 57 Pastor Katolik Pribumi Papua menyatakan bahwa: “Kami meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di tanah leluhur kami- Papua- dengan cara dialog. Sejauh yang kami lihat, dengar, serta ikuti di media sosial, semua elemen masyarakat akar rumput di Papua, mereka meminta Pemerintah Indonesia untuk berdialog dengan ULMWP yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral, sebagaimana yang pernah dilakukan dengan GAM di Aceh.”

Sebelumnya, Dewan Gereja Papua (WPCC) mengeluarkan beberapa kali surat pastoral tertanggal 16 Februari 2019, 26 Agustus 2019, dan 13 September 2019. Berikut desakan atau suara dari ketiga surat pastoral tersebut.

Pertama, Surat Pastoral pada 16 Februari 2019, yang isinya: “Meminta Dewan Gereja Dunia (WCC) untuk mendorong dialog yang bermartabat dan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) dalam menyelesaikan masalah sejarah politik Pepera 1969 yang melibatkan pihak ketiga yang lebih netral.”

Kedua, Surat Pastoral pada 26 Agustus 2019, isinya menyerukan, “Kami meminta keadilan dari pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua yang sudah ditunjukkan oleh Indonesia untuk GAM di Aceh. Wakil Presiden Yusuf Kalla berperan

secara aktif mendukung dialog dengan GAM yang dimediasi Internasional. Oleh karena itu, kami menuntut bahwa pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral.”

Ketiga, Surat Pastoral pada 13 September 2019, isinya: “Mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri berunding dengan ULMWP sebagaimana Pemerintah Indonesia telah menjadikan GAM di Aceh sebagai mitra perundingan yang dimediasi pihak ketiga; sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk menghadirkan perdamaian permanen di Tanah Papua, sesuai dengan seruan Gembala yang pada 26 Agustus 2019 yang telah dibacakan dan diserahkan langsung kepada Panglima TNI dan Kapolri di Swiss-Bell Hotel Jayapura.”

Jauh sebelumnya, desakan kepada Pemerintah Indonesia untuk membuka dialog pernah diserukan oleh Gereja-gereja di Tanah Papua pada Januari 2011 silam. Pemerintah Indonesia diminta berdialog dengan rakyat asli Papua (pro kemerdekaan) dengan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral.

Pada 10 Januari 2011, Komunike Bersama Para Pemimpin Gereja di Tanah Papua mendesak pemerintah RI untuk segera melakukan dialog damai dengan rakyat Papua untuk menyelesaikan ketidakpastian hukum dan politik di Tanah Papua yang menjadi akar dari konflik yang berkepanjangan dan telah menyengsarakan umat Tuhan di Tanah ini.

Pada 12 Agustus 2010, para pemimpin Gereja di Tanah Papua dalam pernyataan moral dan keprihatinan menyatakan, “Para pemimpin Gereja-gereja di Tanah Papua menyerukan untuk segera diadakan dialog nasional untuk menyelesaikan masalah-masalah di Tanah

Papua secara adil, bermartabat, dan manusiawi yang dimediasi oleh pihak ketiga yang lebih netral”.

Pada 28 Juli 2009 Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) sebanyak 33 Sinode telah mendesak agar diadakannya dialog nasional dengan rakyat Papua. “Pimpinan Gereja-gereja di Tanah Papua menyerukan kepada pemerintah pusat agar segera melaksanakan Dialog Nasional dengan rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah-masalah di Tanah secara bermartabat, adil, dan manusiawi yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral.”

Gereja di Tanah Papua tak diam, tiap tahun menyuarakan penyelesaian Papua secara damai. Pada 18 Oktober 2008 para pimpinan gereja menyatakan keprihatinan: “Untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan agar orang Papua tidak menjadi korban terus-menerus, kami mengusulkan agar PEPERA 1969 ini diselesaikan melalui suatu dialog damai. Kami mendorong pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk membahas masalah PEPERA ini melalui dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Betapapun sensitifnya, persoalan Papua perlu diselesaikan melalui dialog damai antara pemerintah dan orang Papua. Kami yakin bahwa melalui dialog, solusi damai akan ditemukan.”

Gereja memfasilitasi acara yang resmi untuk membahas penyelesaian konflik Papua dengan menggelar Konferensi Gereja dan Masyarakat Papua pada 14-17 Oktober 2008. Dalam konferensi itu diserukan: “Pemerintah Pusat segera membuka diri bagi suatu dialog antara Pemerintah Indonesia dengan Orang Asli Papua dalam kerangka evaluasi Otonomi Khusus No.21 tahun 2001 tentang OTSUS dan Pelurusan Sejarah Papua.

Menghentikan pernyataan-pernyataan stigmatisasi 'separatis, TPN, OPM, GPK, makar' dan sejenisnya yang dialamatkan kepada orang-orang asli Papua dan memulihkan hak dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan sehingga azas praduga tak bersalah harus sungguh-sungguh ditegakkan."

Tahun sebelumnya, gereja-gereja di Tanah Papua pada 3 Mei 2007 menyatakan: "Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua menjadi masalah baru dan mengalami kegagalan maka solusinya dialog yang jujur dan damai seperti penyelesaian kasus Aceh. Dialog tersebut dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan yang diminta dan disetujui oleh orang asli Papua dan Pemerintah Indonesia."

Sesudah itu para pemimpin agama dan gereja dalam Lokakarya Papua Tanah Damai pada 3-7 Desember 2007 mendesak Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan perbedaan ideologi di Papua dengan sebuah dialog yang jujur dan terbuka antara Pemerintah Pusat dan Orang Asli Papua dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Tiap tahun Gereja di Tanah Papua menyuarakan jalan keluar penyelesaian konflik melalui perundingan dan dialog damai, terutama kepada Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua yang saat ini diwakili oleh ULMWP. Namun, jalan perundingan ini masih belum mendapatkan titik temu, atau pun Pemerintah Indonesia belum bisa menerima dengan terbuka. Tanah Papua akan terus mengalami tragedi kemanusiaan dan rakyat Papua menjadi korban, karena konflik belum terselesaikan. (*)

BAGIAN IV

**KOLONIALISME MODERN:
OTONOMI KHUSUS,
RASISME, DAN
MARJINALISASI**

BAB 16

Kolonialisme Beririsan dengan Rasisme dan Stigma

Kolonialisme selalu beririsan dengan rasisme. Kenapa? Perbedaan dan tindakan diskriminasi rasial terhadap bangsa lain, upaya menempatkan bangsa itu sebagai bangsa yang inferior. Bagaimana Bangsa dan Negara Indonesia menyiram rasisme pada orang Papua, yang terus direndahkan martabatnya, sebagai bangsa inferior daripada bangsa Indonesia?

Rasisme merupakan sikap membeda-bedakan antar sesama berdasarkan warna kulit, rambut, suku, agama, dan ras. Rasisme juga suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia, bahwa suatu ras tertentu lebih manusiawi, terhormat, terpandang, lebih maju daripada ras lain.

Bagian ini, penulis memeriksa dan menunjukkan bahwa praktik dan aksi rasisme bagi bangsa Papua, adalah bagian kolonialisme yang berjalan, disadari maupun tidak disadari, telah mendukung bahwa bangsa dan negara Indonesia masih begitu kuat mewarisi bangsa yang terjajah selama ratusan tahun.

Karena keyakinan itu, pandangan rasisme menjadi landasan atau dasar pendudukan dan penjajahan serta penindasan penguasa Indonesia atas penduduk orang asli Papua. Penguasa Indonesia dan sebagian besar orang Indonesia memandang orang asli Papua adalah

manusia kelas dua. Sehingga, orang Papua sering kali mendapatkan tindakan diskriminasi dengan melabeli stigma atau pun sebutan negatif, macam sebutan monyet, gorila, bau, bodoh, dan sebagainya.

Siapakah yang membuat label dan stigma kepada rakyat Papua dengan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Gerakan Pengacau Liar (GPK), Organisasi Papua Merdeka (OPM), separatis, makar, kelompok kriminal bersenjata dan teroris? Siapakah yang memberikan label orang asli Papua dengan sebutan monyet?

Barangkali kita bisa membuka kembali pernyataan dari petinggi militer Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (KABAISS) TNI sejak tahun 1996-2014, dan Laksamana Muda TNI (Purn) Iskandar Sitompul. Dalam sebuah kesempatan, keduanya berbicara di saluran Iskandar Sitompul Publika-Poscast membongkar aib dan rahasia operasi militer serta bagaimana militer Indonesia memproduksi mitos, label, dan stigma kepada penduduk asli di Papua Barat.

Laksamana Muda (TNI) Soleman B. Ponto mengatakan, "Kita (TNI) yang memberi nama KKB, KSB. Sekarang ini, suka-suka memberi nama..."

Kemudian, Laksamana Muda TNI (Purn) Iskandar Sitompul mengatakan, "Seperti dulu, kami kasih nama GPK. Saya masih ingat di kepala saya sampai sekarang."

Dengan tepat Syed H. Alatas (Mitos-Mitos Pribumi Malas, 1998: 37, 44) mengungkapkan demikian, "Mereka harus direndahkan dan dibuat merasa bodoh dan bersikap tunduk, karena kalau tidak, mereka akan bergerak untuk memberontak. Maka penghancuran kebanggaan pribumi dipandang sebagai kebutuhan; karenanya dilakukan

pencemaran watak pribumi.”

Rasisme ini yang sering kali melekat ketika rezim kekuasaan hadir di tengah warga masyarakat dengan menindas. Meskipun, rasisme ini telah ditentang di seluruh dunia, termasuk agama telah menentangnya. Dalam buku *Melawan Rasisme dan Stigma di Tanah Papua* (Yoman, 2020: 19), penulis menegaskan rasisme itu sebuah kejahatan kemanusiaan yang harus dilawan. “Rasisme ialah musuh orang Muslim, musuh orang Hindu, musuh orang Budha, musuh orang Konghucu, musuh kaum Atheis, musuh orang Kristen. Rasisme ialah musuh kita bersama sebagai manusia. Mari kita sama-sama lawan dan memberantas rasisme.”

Peneliti dan Pemerhati Hak Asasi Manusia Papua, Theo van den Broek dalam sebuah seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh Dewan Gereja Papua-WPCC pada 3 Februari 2022 mengungkapkan bahwa insiden rasisme yang terjadi di asrama mahasiswa di Surabaya telah menyebabkan masyarakat Papua sangat terhina, dan hal ini menyatakan realitas rasisme itu masih ada di Indonesia. Karena terhina, masyarakat Papua melakukan aksi protes.

“Mereka protes dengan penuh hati karena diremehkan seakan-akan mereka bukan manusia. Protes ini dijawab oleh pemerintah pusat dengan suatu pola tindakan keamanan saja, yang sebenarnya tidak menfokus pada rasisme melainkan bertujuan utama untuk mendiamkan para pejuang haknya yang secara vokal menghadapi pemerintah Indonesia,” ungkap Theo.

Dalam analisis Theo yang membeberkan protes rasisme yang terjadi pada 2019 itu tidak direspons dengan wajar. Protes masyarakat Papua atas rasisme direspons

oleh pemerintah pusat yang melibatkan Menkopolhukam Wiranto – sekarang Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dan Kapolri Tito Karnavian – kini Menteri Dalam Negeri di era Presiden Joko Widodo.

“Masalah rasisme tidak dianalisa dan tidak dijadikan suatu dasar respons yang sewajarnya. Keinginan menguasai secara politik sampai dalam kehidupan sehari-hari orang Papua lebih diutamakan daripada membereskan suatu penyakit ‘saling merendahkan’ serta ‘penyangkalan martabat setiap manusia’ (rasisme),” ungkap Theo.

BAB 17

Rasisme dan Ketidakadilan Bertumbuh Subur dan Berurat Akar

Rasisme dan ketidakadilan sebagai jantung persoalan Papua bertumbuh subur dan berurat akar di Papua sejak 1969 sampai dengan era Otonomi Khusus 2001 sampai 2020. Ada beberapa fakta rasisme dan ketidakadilan yang menjadi catatan penting dalam artikel ini.

Kasus Tolikara, Jumat, 17 Juli 2015 sebanyak 11 orang ditembak aparat keamanan Indonesia dan 10 orang luka-luka. 1 orang bernama Endi Wanimbo tewas di tangan aparat keamanan Indonesia. Rasisme dan ketidakadilan terlihat ketika Panglima TNI, Kapolri, Menteri Sosial datang ke kabupaten Tolikara hanya mengurus orang-orang pendatang di Tolikara, urus kayu-kayu, dan seng kios yang terbakar. Kios itu digunakan sebagai tempat ibadah (Musola). Musola itu terbakar, bukan dibakar. Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Sosial Republik Indonesia tidak mempersoalkan 10 orang yang luka-luka akibat ditembak aparat keamanan Indonesia dan 1 orang bernama Endi Wanimbo yang tewas.

Kasus rasisme yang meletus lebih besar dan hebat terjadi pada 2019. Rasisme yang terjadi di Surabaya itu dilawan dengan aksi damai dengan skala besar di berbagai daerah di Papua dan daerah lain di luar Papua pada 19 Agustus-23 September 2019. Demo damai melawan rasisme dipicu dari peristiwa rasisme yang

terjadi pada 15-17 Agustus 2019 di Semarang, Malang, dan Yogyakarta yang dilakukan oleh organisasi massa radikal seperti Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), anggota TNI, dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI (FKPP).

Aksi melawan rasisme itu kemudian menyulut konflik lain yang berakibat pada jatuhnya korban di kalangan orang asli Papua, antara lain:

1. Marselino Samon (15) pelajar SMA ditikam hingga tewas pada 29 Agustus 2019 di belakang Kantor Pos Jayapura.
2. Evert Mofu (21) penjaga gudang kontainer pada 29 Agustus 2019 dibacok kepala dan mati di tempat di Telkom Kota Jayapura.
3. Maikel Kareth (21) mahasiswa Uncen semester 7 pada 31 Agustus 2019 ditembak didada tembus belakang dengan peluru tajam.
4. Oktovianus Mote (21) Mahasiswa STIKOM Muhammadiyah pada 30 Agustus 2019 jenazah disimpan di freezer di RS Bhayangkara dan jenazah diambil keluarga pada 25 September 2019.

Semua ini korban tewas dari tangan milisi, Barisan Merah Putih, dan Paguyuban Nusantara. Aksi kriminal dari kelompok tersebut bergerak leluasa tanpa dihalangi oleh aparat kemananan TNI dan Polri. Masih banyak luka-luka serius dan ringan yang dialami oleh orang asli Papua. Pertanyaannya, apakah aparat kepolisian Indonesia sudah menangkap para pelaku kriminal ini? Kalau sudah, kapan ditangkap? Siapa-siapa pelakunya pembunuhan? Di mana ditahan para penjahat ini?

Dimana proses peradilan dilaksanakan?

Diskriminasi rasial dan ketidakadilan sebagai jantung kejahatan Negara Republik Indonesia berjalan telanjang dan tergambar jelas dengan penangkapan: Buchtar Tabuni (Deklarator dan Wakil Ketua II ULMWP), Agus Kossay (Ketua Umum KNPB), Steven Itlay (Ketua KNPB Timika), Alex Gobay (Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa USTJ), Fery Gombo (Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UNCEN), Irwanus Uropmabin (Mahasiswa), Hengky Hilapok (Mahasiswa), dan Basoka Logo (Eksekutif ULMWP).

Rasisme dan ketidakadilan dari penguasa pemerintah Republik Indonesia juga terbukti dengan diberikannya kesempatan kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk membentuk Partai Politik Lokal dan mengibarkan bendera GAM. Sebaliknya, selama 19 tahun perjalanan pelaksanaan perintah Undang-Undang Negara Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Pemerintah Negara Republik Indonesia menolak semua draft PERDASUS tentang Orang Asli Papua, Perdasus tentang Partai Politik Lokal, dan Partai Rekrutmen Politik.

Rasisme dan ketidakadilan juga terbukti dalam penerimaan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). IPDN yang berlokasi di Bumi Perkemahan Waena 99,9% dikuasai oleh orang-orang pendatang. Amanat Undang-Undang Otsus 2001 tentang perlindungan (*protection*), keberpihakan (*affirmative*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengakuan hak-hak dasar orang asli Papua (*recognition*) gagal total.

Rasisme dan ketidakadilan juga terbukti dalam perekrutan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Indonesia. Alasan lama yang digunakan adalah

kesehatan dan juga tinggi badan. Kenyataannya, banyak anggota TNI dan Polri yang berbadan tidak tinggi. Pada bulan Maret 2020, ada anggota polisi datang ke kantor Pusat Gereja Baptis West Papua, dan saya pernah menyampaikan kepadanya, “Anda pendek begini anggota polisi?”

Komandan polisi dan anggotanya yang datang dan mendengar itu, mereka berfikir itu hanya bahasa biasa-biasa saja. Tetapi, sesungguhnya itu sindirian keras saya kepada penguasa Indonesia yang berwatak rasis dan tidak adil ini. Rasisme dan ketidakadilan sudah berjalan telanjang di Papua selama 59 tahun sejak 1961-2020.

Diskriminasi rasial dan ketidakadilan terbukti dengan dibungkamnya ruang kebebasan berkumpul, kebebasan berbicara di depan umum bagi rakyat dan masyarakat Papua, dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Bahkan pemimpin KNPB, Mako Tabuni tewas ditangan Densus 88 pada 14 Juni 2012 di Perumnas 3 Waena, Jayapura.

Prof. Dr. Richard Chauvel dari Universitas Melbourne pada 6 September 2019 dalam diskusi dengan FISIP UGM bertopik Papua dan Kebangsaan mengatakan sebagai berikut, “Ungkapan rasisme terhadap orang Papua telah mempersatukan dan memperkuat orang Papua dimana saja dan dalam posisi apa saja. Seluruh rakyat Indonesia bersuara tidak setuju Papua Merdeka lepas dari Indonesia. Tetapi, sikap dan narasi-narasi seperti rasisme di Malang dan Surabaya sudah menunjukkan bahwa orang Papua bukan bagian dari rakyat Indonesia. Dampak negatif jangka panjang sangat membahayakan masa depan Indonesia. Orang Papua mengatakan, ‘Kami bangsa monyet, jangan paksakan kami kibarkan bendera

merah putih'. Pendekatan infrastruktur dan pendekatan militer bukan solusi masalah Papua."

Cypri J.P. & John Djonga dalam buku Paradoks Papua: Pola-pola Ketidakadilan Sosial, Pelanggaran Hak Atas Pembangunan dan Kegagalan Kebijakan Afirmatif, dengan Fokus di Kabupaten Keerom dengan detail merekam kegagalan Otonomi Khusus 2001.

"Otonomi Khusus (Otsus) sebenarnya dapat merintis jalan keluar untuk berbagai persoalan itu. Kebijakan ini dianggap sebagai terobosan baru bagi pembangunan, sekaligus penyelesaian untuk berbagai persoalan di Papua. Namun, implementasinya, yang kini penuh masalah. Akibatnya, sampai kini akar masalah rakyat Papua belum tertangani." (hal.xi). "...Ketidakadilan terhadap orang Asli Papua sudah parah dan sistematis. ...Kebijakan afirmatif juga masih terbatas retorika;... mesin ketidakadilan dan marginalisasi itu terus bekerja menambah penderitaan orang Asli Papua" (2011:hal.xxv).

Gizi Buruk

Pelapor Khusus untuk Hak atas Pangan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hilal Elver, menyebut kasus gizi buruk yang menimpa suku pedalaman Asmat di Papua sebagai insiden tragis. "Saya ingin menarik perhatian Anda semua pada sebuah insiden yang sangat tragis. Dalam beberapa bulan terakhir, 72 anak meninggal di Kabupaten Asmat, Papua. 66 anak meninggal akibat campak dan 6 lainnya akibat gizi buruk." (CNN, Rabu (18/4/2018))

Hal ini merupakan sesuatu yang memalukan bagi sebuah negara yang punya perkembangan ekonomi yang baik dan sumber daya yang melimpah. Di tengah kelimpahan masih ada warganya yang mengalami gizi buruk.

Gizi buruk dan kematian orang asli Papua ini bertolak belakang dengan janji palsu pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Pepera 1969 Annex 1 yang dilaporkan perwakilan PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz dari Bolivia dan Annex II. Laporan dalam versi pemerintah Indonesia sangat bertolak belakang dengan laporan Annex 1. Menteri Dalam Negeri RI Amir Machmud pada pelaksanaan Pepera 14 Juli 1969 di Merauke dihadapan peserta Anggota Musyawarah Pepera menyampaikan janji bohong. "...pemerintah Indonesia, berkeinginan dan mampu melindungi untuk KESEJAHTERAAN rakyat Irian Barat, oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, tetapi tinggal dengan Indonesia."

Realitas yang ada tidaklah sesuai dengan janji tersebut. Sepanjang perjalanan 51 tahun sejak 1969 sampai 2020, Otonomi Khusus 2001 yang sangat paradoks dengan kata-kata indah itu berubah menjadi tragedi kemanusiaan dan malapetaka, penderitaan, tetesan air mata, cucuran darah berkepanjangan, dan tulang belulang yang berserakkan. Itu semua dialami rakyat Papua di atas Tanah mereka sendiri.

Orang Papua Tidak Bisa Diukur dengan Uang

Penguasa Negara Republik Indonesia yang rasis selalu melihat orang asli Papua dari nilai uang. Penguasa Indonesia mengatakan dalam Otonomi Khusus 2001 terdapat banyak uang. Dan penggunaan dana Otonomi Khusus harus diaudit atau diperiksa. Sikap pemerintah itu tidak terlihat pada kasus-kasus yang terjadi di Papua. Jarang bahkan "nol" penguasa Indonesia secara terbuka mengutuk kekerasan Negara (pelakunya TNI-Polri) terhadap orang Asli Papua dan meminta para pelaku

kejahatan kemanusiaan itu ditangkap, diadili, dan dihukum demi rasa keadilan bagi keluarga korban dan juga orang asli Papua.

Penguasa Indonesia yang berwatak rasisme keliru dalam menilai dan melihat orang asli Papua. Orang Asli Papua mampu dan sanggup hidup tanpa uang Otonomi Khusus dan juga tanpa Indonesia. Karena, sebelum Indonesia menduduki dan menjajah orang asli Papua, bangsa Papua pernah hidup berdaulat di atas Tanah leluhurnya. Itu karena OAP adalah pemilik Tanah Papua.

Dalam implementasi Otonomi Khusus 2001, penduduk orang asli Papua mengalami banyak penderitaan dan kematian ditangan pemerintah Indonesia melalui kekuatan TNI-Polri yang selalu menganggap diri manusia superior. Gambaran singkat kegagalan Otsus di atas membuktikan bahwa amanat undang-undang Otsus 2001 gagal total.

BAB 18

Masalah Rasisme Orang Papua: Mengapa Tak Belajar dari Gus Dur?

Bangsa Indonesia dikenal bangsa yang ramah, rakyatnya punya keluhuran hati nurani, dan mencintai harmoni dan kedamaian antar sesama. Bangsa Indonesia pernah punya pemimpin yang mencintai kemanusiaan dan dekat di hati rakyat Papua. Dia adalah Presiden Abdurrahman Wahid, yang dikenal dengan Gus Dur.

Kebijakan dan cara Gus Dur memberlakukan bangsa Papua yang bermartabat itu selalu dikenang dan meninggalkan jejak sejarah berharga bagi kehidupan dan kemanusiaan bangsa Papua. Gus Dur merepresentasikan nilai kultur keluhuran hati nurani kepada dunia, Indonesia, dan juga secara khusus rakyat dan bangsa Papua. Bahkan, bagi bangsa Papua, Gus Dur merupakan simbol nyata dari kehidupan rakyat Indonesia. Ia mewujudkan bangsa Papua berdampingan dengan bangsa Indonesia. Pada 2000, Gus Dur mewujudkan bendera Bintang Kejora berkibar bersama dan berdampingan dengan bendera Merah Putih.

Jejak bersejarah Gus Dur itu sayangnya tidak berlanjut. Seiring dengan serangan politik kepada dirinya, hingga berakhir dengan lengsernya Gus Dur sebagai presiden, benih sejarah kedamaian itu terus dikubur oleh para penguasa dan rezim sesudah Gus Dur. Perubahan

itu berputar cepat 360 derajat, Tanah Papua yang damai kembali bergolak dengan kebijakan dan tindakan represif yang menyulut konflik pecah di berbagai wilayah di Tanah Papua.

Wacana dan narasi kedamaian dan menghormati martabat masyarakat Papua pun terobek, dan digantikan dengan narasi-narasi yang menghancurkan hakekat dan nilai-nilai luhur bangsa Papua. Wajah Indonesia di mata rakyat dan bangsa Papua berubah menjadi angkuh, sombong, jahat, pembohong, perampok, dan pembunuh.

Pemimpin dan rezim kekuasaan berperan dalam menciptakan kekerasan dan konflik orang-orang asli Papua diberi label dan stigma separatis, makar, OPM, KKB agar pihak-pihak yang berwenang dibolehkan melakukan tindakan-tindakan represif, yang sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang dijunjung bangsa dan negara Indonesia.

Di balik jargon keamanan dan kepentingan nasional, kedaulatan NKRI, dan NKRI harga mati, negara dan pemerintah, termasuk para elit-elit, menangkap dan membunuh rakyat Papua. Mereka juga mengeksploitasi kekayaan alam rakyat Papua.

Dan belakangan ini, para pemimpin dan pemerintah Indonesia, menutup mata dan hati terhadap jerit derita rakyat Papua yang jatuh miskin, kualitas hidup yang buruk, dan diskriminasi. Mereka beberapa kali melakukan tindakan rasisme, yang justru, pernah ditentang oleh salah satu pemimpin dan presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid. Beberapa kutipan para pemimpin itu bisa direkam dan dilihat kembali bahwa rasisme terhadap rakyat Papua itu benar-benar nyata, alih-alih tak dihapus, justru dipelihara dan dipakai untuk

menjatuhkan martabat rakyat dan bangsa Papua.

Misalnya, beberapa ungkapan yang tidak simpati dalam melihat orang asli Papua dilontarkan oleh para pemimpin dan tokoh bangsa Indonesia serta dari kalangan pemerintah. Luhut Panjaitan, sewaktu menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ketika menanggapi kemunculan organisasi ULMWP yang berjuang untuk menjadi anggota organisasi negara-negara rumpun Melanesia pada Melanesian Spearhead Group (MSG). “Ya pergi saja mereka ke MSG sana, jangan tinggal di Indonesia lagi,” kata Luhut, seperti dikutip *Kompas.com*, 19 Februari 2016.

Menteri Sosial Tri Rismaharini melontarkan kemarahannya kepada para ASN di Balai Wyata Guna, Bandung, Jawa Barat pada 13 Juli 2021, seperti dikutip *Tempo.co*, “Sekarang saya nggak mau lihat seperti ini, kalau saya lihat lagi, saya pindahkan ke Papua, saya nggak bisa mecat kalau enggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua sana teman-teman.” Pernyataan itu menimbulkan kontroversi publik karena dianggap rasis terhadap orang-orang Papua, yang wilayahnya sebagai tempat pembuangan.

Pernyataan yang menyinggung rakyat Papua juga pernah dilontarkan oleh tokoh intelijen dan militer Indonesia, A.M. Hendropriyono pada Juni 2021 lalu, saat berbicara di Sekoad, yaitu “memindahkan sekitar 2 juta penduduk Irian Jaya ke Manado. Sebaliknya, orang-orang di Manado dipindahkan ke Papua.” Ia ingin memisahkan orang Papua dari Papua New Guinea yang punya ras sama, supaya merasa tidak terasing dengan orang Indonesia, sehingga mesti tinggal di Manado.

Para pemimpin negeri ini, sekali lagi, tak belajar dari pengalaman Gus Dur, yang menghargai budaya dan menghormati orang Papua sebagai manusia yang bermartabat. Para pemimpin, yang dicontohkan dengan sikap di atas, tentu masih ada yang lainnya, justru menjadi bagian negara yang menciptakan tindakan rasisme kepada orang Papua secara terstruktur dan sistematis di dalam kekuasaan pemerintah dan negara Indonesia.

Rasisme ialah musuh utama dunia. Rasisme ialah musuh semua umat manusia apa pun latar belakang dan status sosialnya. Perbuatan rasisme yang merendahkan martabat manusia. Ujaran rasisme adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dan membangkitkan kemarahan seluruh umat manusia di planet ini.

Hail itu terjadi saat tindakan rasisme dan kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, Yogyakarta dan Semarang pada 15-17 Agustus 2019 yang dilakukan oleh organisasi massa seperti: Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI (FKPPI) dan didukung oleh aparat keamanan setempat telah memicu kemarahan rakyat dan bangsa Papua serta kelompok solidaritas dengan melakukan demonstrasi damai di Tanah Papua, kota-kota studi di luar Papua hingga beberapa kota di Luar Negeri, di kawasan Pasifik, Asia Tenggara, Eropa, Afrika dan Amerika Serikat.

Theo van den Broek dalam bukunya *Tuntut Martabat, Orang Papua Duhukum* (2020:5) dengan tepat menggambarkan situasi tersebut:

“Faktanya bahwa orang Papua dinilai sebagai ‘sekumpulan monyet’ memang sangat tidak dapat diterima orang asli Papua (OAP) maupun orang non asli Papua. Penilaian ini dialami sebagai suatu penghinaan berat sekaligus suatu kontras yang ekstrem dengan sikap yang selalu ditunjukkan bangsa Papua dalam penerimaan ribuan orang dari luar Papua (migran) yang mau menetap dan mencari nafkahnya di Tanah Papua. Pengalaman bahwa mereka (OAP) digambarkan sebagai ‘monyet’ merupakan suatu pukulan yang sangat keras, sangat tidak dapat diterima dan merendahkan harga dirinya orang Papua”.

Selain itu, perlakuan rasisme juga terjadi pada pemain Persipura di luar Papua terjadi di depan negara dan aparat keamanan, tapi Negara dan aparat keamanan TNI-Polri selalu diam seribu bahasa. Rasisme terhadap Natalius Pigai, yaitu fotonya telah disejajarkan atau dipasang bersebelahan dengan foto monyet, yang sudah viral tapi negara dan aparat kepolisian tidak mempedulikannya.

Kemudian ujaran rasisme terhadap “pahlawan nasional” Frans Kaisepo dalam mata uang Rp 10.000. Nurazisah Asril dalam akunnya: “Saya tidak setuju dengan gambar uang baru yang mukanya menyerupai monyet!!! Bukannya memasang wajah pahlawan malah memasang wajah seperti itu.” Ujaran rasisme yang dilandasi kebencian ini yang sudah menjadi viral tetap dibiarkan oleh penegak hukum.

Tindakan-tindakan rasisme tersebut telah memperlihatkan kejahatan Negara secara sistematis, terstruktur, terlembaga, masif dan kolektif dalam rangka proses pemusnahan etnis orang asli Papua. Dengan tepat (alm) Hermanus Wayoi pernah mengungkapkan pada

Februari 1999 dalam makalahnya – tidak dipublikasikan, berjudul *Irian Jaya Masih dalam Status Tanah Jajahan: Mengungkap Hati Nurani Rakyat Papua* (Yoman, 2007, hal. 143).

“Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia dan menggantinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan mendatangkan transmigrasi dari luar daerah dalam jumlah ribuan untuk mendiami lembah-lembah yang subur di Tanah Papua. Dua macam operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan Ras Melanesia di tanah ini...”

Melihat dari fakta dan gerakan rasisme dari militer dan warga sipil Indonesia dengan sistematis dan masif serta kolektif, ini menandakan bahwa rakyat dan bangsa Papua tidak mempunyai masa depan yang baik dalam dalam rumah besar yang bernama Indonesia. Ada operasi militer, operasi transmigrasi, operasi pemekaran kabupaten dan provinsi yang bertujuan untuk menyingkirkan dan memusnahkan rakyat Papua dari tanah leluhurnya. Dan, inilah upaya-upaya yang memperburuk situasi kemanusiaan yang dialami oleh rakyat Papua.

Walaupun ada kekejaman dan kejahatan negara yang menakutkan dan sangat memprihatinkan, tetapi kami rakyat dan bangsa Papua mempunyai harapan masa depan yang lebih baik, damai dan harmoni di atas tanah leluhur karena meyakini adanya kekuatan tanpa kekerasan yang terus bergerak memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan martabat orang Papua dari

berbagai pihak baik di tingkat nasional dan internasional.

Saya juga percaya, nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur, telah tumbuh dan berkembang di kalangan generasi muda saat ini. Orang-orang muda di berbagai daerah di Tanah Air inilah yang menjadi energi lebih positif dan menerima keterbukaan terhadap apa yang dialami dan diperjuangkan oleh orang Papua.

BAB 19

Luka Rasisme yang Tak Disembuhkan

Rakyat Papua terus menggugat Pemerintah Indonesia. Akar-akar masalah Papua yang menjadi bara api dan luka membusuk tak kunjung 'diobati'. Kondisinya mengkhawatirkan saat dibiarkan berlarut dalam waktu yang lama, terus menggerogoti sendi-sendi perdamaian dan keadilan yang jadi landasan hidup rakyat Papua.

Masalah yang digugat rakyat Papua adalah rasisme dan ketidakadilan. Keduanya merupakan jantungnya persoalan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara di Tanah Papua. Pastor Franz Magnis Suseno dengan lugas dan pedas mengatakan bahwa "Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia."

Tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam buku *Papua Road Map* (2008), yang dipimpin oleh alm. Muridan S. Widjojo bersama dengan Ibu Adriana Elisabeth, Amirudin Al-Rahab, Cahyo Pamungkas dan Rosita Dewi dengan teliti telah berhasil membedah dan mendiagnosa luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sudah berhasil membantu penguasa Indonesia menemukan bara apinya dan sekarang tugas penguasa pemerintah Indonesia melangkah untuk mematikan bara apinya, supaya tidak sibuk buang uang, tenaga, waktu untuk mengurus yang

tidak hanya menghalau dan mengusir asapnya, namun apinya yang terus membara.

Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia itu sudah dibedah dan didiagnosa dengan sempurna dan benar oleh Tim LIPI. Ada empat penyakit menahun (kronis) yang ditemukan LIPI.

1. Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;
2. Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;
3. Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di tanah sendiri;
4. Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Penulis telah berulang kali mengutip penegasan dari Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno (2015:255-257) mengenai bara api itu, yang dia sebut sebagai luka membusuk dalam tubuh bangsa Indonesia. "Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia. Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theys Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya untuk pulang dari sebuah resepsi Kopassus."

Pastor Franz Magnis dengan benderang menuliskan bahwa "Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia." "...kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam," tulisnya.

Saat ini, akar persoalan Papua tersebut tak bisa

diselesaikan lagi dengan Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, karena landasan hukum tersebut telah menjadi masalah baru dan dinilai gagal oleh rakyat Papua, bahkan dianggap 'mati'. Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan, Lembaga Penelitian Indonesia atau LIPI, Cahyo Pamungkas menyatakan kepada Jubi, 2 Agustus 2020, bahwa Otonomi Khusus atau Otsus Papua telah gagal sejak awal.

Kekerasan dan jatuhnya berbagai korban pelanggaran HAM di Tanah Papua bertahun-tahun dibiarkan terlantar dan tak mendapatkan tempat dan ruang. Lembaga yang semestinya menyelesaikan korban-korban kejahatan kemanusiaan dikubur dalam-dalam. Nama besar Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tak pernah serius didiskusikan, inisiasi pembentukannya pun lenyap tak jelas. Hampir mustahil masalah ini terpecahkan jika bagian dari solusi itu dikubur satu per satu.

BAB 20

Otonomi Khusus Lahir Karena Tuntutan Merdeka Bukan Kesejahteraan

Pemerintah Indonesia, Rakyat Papua, dan komunitas internasional harus jujur mengakui bahwa “Otsus lahir karena tuntutan merdeka bukan kesejahteraan”. Kita jangan membuat kabur roh dari latar belakang mengapa Otonomi Khusus 2001 ada di Papua. Para penguasa Indonesia berusaha dengan berbagai bentuk dan siasat untuk mereduksi esensi dan makna perjuangan lahirnya Otsus Papua.

Para tokoh pimpinan di Jakarta sering kali menyebut bahwa persoalan Papua adalah masalah kesejahteraan semata. Simak komentar Muh. Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa “masalah Papua adalah masalah kesejahteraan” (TVOne, 8 Noveber 2018). Kemudian Ketua Umum Pimpinan pusat Muhammadiyah M. Din Syamsuddin dan ketua Umum Pengurus Besar NU, Said Agil Siroj menyatakan bahwa “akar persoalan di Papua adalah ketidakadilan, terutama dalam kesejahteraan ekonomi...” (Kompas, 11 November 2011).

Kata “kesejahteraan” itu mitos lama yang terus di ulang-ulang dan dikumandangkan dalam berbagai forum dan kesempatan untuk menutupi dan menghilangkan akar persoalan bangsa Papua yang sesungguhnya, yaitu masalah status politik. Lahirnya Otonomi Khusus Papua pada 2001 menjadi alat bargaining atau tawar-menawar

politik bukan pembangunan atau kesejahteraan. Pada 1998 seluruh rakyat dan bangsa Papua dari Sorong sampai Merauke menyatakan keluar dari Indonesia.

Pada 26 Februari 1999 Tim 100 mewakili bangsa West Papua secara bermartabat dan terhormat menyampaikan kepada Prof. Dr. B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia di Istana Indonesia. Demikian yang tertulis dalam buku berjudul Otonomi Khusus Papua telah Gagal (Yoman, 2012:30).

“Bahwa Permasalahan mendasar yang menimbulkan ketidakstabilan politik dan keamanan di Papua Barat (Irian Jaya) sejak 1963 sampai sekarang ini, bukanlah semata-mata karena kegagalan pembangunan, melainkan status Politik Papua Barat yang pada 1 Desember 1961 dinyatakan sebagai sebuah Negara Merdeka diantara bangsa-bangsa di muka bumi oleh sebab itu, dengan jujur kami menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa tidak ada alternatif lain untuk merundingkan atau mempertimbangkan keinginan Pemerintah Indonesia guna membangun Papua dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Maka pada hari ini, jumat, 26 Februari 1999, Kepada Presiden Republik Indonesia, Kami Bangsa Papua Barat menyatakan bahwa: Pertama, kami bangsa Papua Barat berkehendak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk merdeka dan berdaulat penuh diantara bangsa-bangsa lain di bumi.”

Rakyat dan bangsa Papua dalam Musyawarah Besar (Mubes) pada 23-26 Februari 2000 merumuskan dan menyatakan pada point 3.2. “Pemerintah Indonesia melaksanakan *act of self dertemination* yang disebut Pepera dengan cara meniadakan hak-hak dan kebebasan politik rakyat Papua yang menentang cara-cara Indonesia dalam melaksanakan Pepera yang tidak sesuai dengan New

York Agreement 15 Agustus 1962.” (Yoman, 2012:32-34)

Perjuangan Papua tidak berhenti pada Tim 100 dan Mubes. Rakyat dan Bangsa Papua dalam memperjuangkan hak politiknya mengadakan Kongres Nasional II pada 26 Mei - 4 Juni 2000. Dalam Kongres Nasional II disampaikan beberapa pernyataan politik, diantaranya, Bangsa Papua telah berdaulat sebagai sebuah bangsa dan Negara sejak 1 Desember 1961 (Yoman, 2012:34-38).

Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001 adalah alat tawar-menawar politik Papua Merdeka dengan Indonesia. Otsus tidak dirancang karena kesejahteraan dan masalah perut, makan dan minum. Oleh karena itu, para sarjana dan intelektual Bangsa Papua jangan mengaburkan akar masalah bangsa Papua dengan pernyataan yang tidak jelas. Para sarjana Papua sebaiknya mengawal masalah mendasar ini.

Tokoh bangsa Papua, Freddy Numbery dalam opini di *Kompas*, 6 Juli 2012 berjudul “Satu Dasawarsa Otsus Papua” pernah dengan sempurna menyatakan sumber-sumber agraria milik masyarakat adat dieksploitasi dalam skala besar tanpa menyejahterakan pemiliknya. Sebaliknya marjinalisasi berlangsung di mana-mana. Pelurusan sejarah yang juga diamanatkan Undang-undang Otsus tidak pernah disentuh. Persoalan kekerasan oleh negara tidak diselesaikan, malah bereskalasi. Penambahan pasukan dari luar berlangsung tanpa pengawasan. Kebijakan demi kebijakan untuk Papua sudah diterapkan Jakarta, tapi tak bertaji menyelesaikan masalah.

Status politik atau sejarah bergabungnya Papua kedalam Indonesia dengan tekanan militer dan pelanggaran HAM berat yang merupakan kejahatan

negara menjadi luka membusuk dalam tubuh bangsa Indonesia. Dr. Adnan Buyung Nasution, SH, seperti dilansir *Detiknews* (Rabu, 16/12/2011) pernah bernubuat seperti ini, “Tinggal soal waktu saja kita senang atau tidak, mau atau tidak akan kehilangan Papua karena kita gagal merebut hati orang Papua dan itu kesalahan bangsa sendiri dari awal.”

Mengapa Lahir Otonomi Khusus Papua?

Hampir dua dekade Otonomi Khusus Papua, masyarakat Papua menyadari otonomi khusus berjalan tanpa roh. Latar belakang lahirnya otsus Papua pun tak memberi spirit yang berarti bagi politik kelahirannya. Otsus akan berakhir, namun masih menyisakan banyak substansi dalam UU Otonomi Khusus Papua yang tak dijalankan.

Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 adalah undang-undang *win-win solution* (penyelesaian yang bisa diterima masing-masing pihak) status politik bangsa Papua dalam wilayah Indonesia. Namun, ini menjadi perdebatan. Pemerintah Republik Indonesia dianggap memutarbalikkan dan menghilangkan fakta historis lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus nomor 21 Tahun 2001 yang terdiri dari 24 Bab dan 79 Pasal.

Undang-undang Republik Indonesia tentang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 lahir setelah tumbangya kekuasaan Soeharto pada 1998. Seluruh rakyat dan bangsa Papua merapatkan barisan dan membangun kekuatan bersama, menuntut kemerdekaan dan berdaulat penuh, bangsa Papua dengan cara damai mengibarkan bendera Bintang Kejora di seluruh Tanah Papua. Banyak

rakyat menjadi korban di tangan TNI-Polri.

Saat gelombang rakyat menuntut reformasi, rakyat Papua melalui utusan perwakilan, yang dikenal kemudian dengan Delegasi Tim 100, menggelar pertemuan dengan Prof. Dr. B.J. Habibie di Istana Negara Republik Indonesia pada 26 Februari 1999. Di dalam Istana Negara dengan terang benderang aspirasi politik itu disampaikan.

"....dengan jujur kami menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa tidak ada alternatif lain untuk merundingkan atau mempertimbangkan keinginan Pemerintah Indonesia guna membangun Papua dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pada hari ini, Jumat, 26 Februari 1999, kepada Presiden Republik Indonesia, kami bangsa Papua Barat menyatakan bahwa:

Pertama, kami bangsa Papua Barat berkehendak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk merdeka dan berdaulat penuh di antara bangsa-bangsa lain di bumi.

Kedua, segera membentuk pemerintahan peralihan di Papua Barat dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara demokratis, damai dan bertanggungjawab, selambat-lambatnya bulan Maret tahun 1999.

Ketiga, Jika tidak tercapai penyelesaian terhadap pernyataan politik ini pada butir kesatu dan kedua , maka:

(1) segera diadakan perundingan Internasional antara Pemerintah Republik Indonesia, Bangsa Papua Barat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

(2) Kami bangsa Papua Barat menyatakan, tidak ikut serta dalam pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 1999.

Musyawaharah Besar (MUBES) 23-26 Februari 2000 telah menghasilkan rekomendasi politik. Dari 7 butir

keputusan peserta MUBES, pada butir 4 dinyatakan:

“Bahwa kami bangsa Papua Barat setelah berintegrasi dengan Indonesia melalui pelaksanaan pepera yang tidak adil dan penuh kecurangan, dan setelah 36 tahun berada dalam Negara Republik Indonesia, bangsa Papua Barat mengalami perlakuan-perlakuan keji dan tidak manusiawi: pelanggaran berat HAM, pembunuhan, pemerkosaan, pembodohan, pemiskinan, ketidakadilan sosial dan hukum yang mengarah pada etnik dan kultur genocide bangsa Papua Barat, maka kami atas dasar hal-hal tersebut di atas menyatakan kehendak kami untuk memilih merdeka-memisahkan diri dari negara Republik Indonesia kembali ke status kami semula sebagai bangsa dan negara Papua, 1 Desember 1961.”

Selanjutnya digelar Kongres Nasional II Rakyat dan Bangsa Papua Barat pada 26 Mei - 4 Juni 2000. Kongres yang dibiayai oleh Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid ini melahirkan beberapa butir keputusan politik sebagai berikut.

1. Bangsa Papua telah berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961.
2. Bangsa Papua melalui Kongres II menolak New York Agreement 1962 yang cacat hukum dan cacat moral karena tidak melibatkan wakil-wakil bangsa Papua.
3. Bangsa Papua melalui Kongres II menolak hasil-hasil pepera, karena dilaksanakan dibawah ancaman, intimidasi, pembunuhan sadis, kekerasan militer, dan perbuatan-perbuatan amoral di luar batas-batas perikemanusiaan. Karena itu, bangsa Papua menuntut PBB untuk mencabut Resolusi PBB Nomor 2504 tanggal 19 Desember 1969.
4. Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB harus mengakui hak politik dan kedaulatan Bangsa Papua

Barat yang sah berdasarkan kajian sejarah, hukum, dan sosial budaya.

5. Kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat yang terjadi sebagai akibat dari konspirasi politik internasional yang melibatkan Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB, harus diusut tuntas dan pelaku-pelakunya diadili di peradilan Internasional.
6. PBB, AS, dan Belanda agar meninjau kembali keterlibatan mereka dalam proses aneksasi Indonesia atas Papua Barat dan menyampaikan hasil-hasilnya secara jujur, adil dan benar kepada rakyat Papua pada 1 Desember 2000.

Para pembaca yang mulia dan terhormat, Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 tidak turun sendiri dari langit. Otonomi Khusus 2001 lahir karena ada tuntutan rakyat dan bangsa Papua Barat untuk merdeka dan berdaulat. Menjadi jelas dan terang latar belakang lahirnya Otonomi Khusus melalui proses dari Tim 100, Mubes 23-26 Februari 2000 dan Kongres II Nasional rakyat dan bangsa Papua Barat pada 26 Mei-4 Juni 2000, yaitu rakyat dan bangsa Papua Barat menyatakan berhak atas kemerdekaan dan kedaulatan pada 1 Desember 1961.

BAB 21

Praktik Kolonialisme Baru: Marjinalisasi Masyarakat asli Papua

Masyarakat asli Papua tersingkir atau disingkirkan, dibuat miskin, tanpa tanah dan tanpa masa depan, bahkan menjadi korban kekerasan karena konflik lahan. Tak sedikit juga mengalami kematian.

Sejak beberapa dekade, penduduk Papua hidup dalam kekuasaan kolonial. Meskipun penjajahan telah ditentang oleh berbagai pihak dan negara di muka bumi ini, namun praktek-praktek kolonialisme masih terlihat di Papua. Kejahatan dan praktek-praktek kekuasaan di era konolonial itu terungkap di publik luas.

Pada tahun 1969 ketika bangsa Papua diintegrasikan ke dalam Indonesia, jumlah populasi orang asli Papua (OAP) sekitar 809.337 jiwa. Sedangkan orang papua di Papua New Guinea berkisar 2.783.121 jiwa. Saat ini pertumbuhan penduduk di PNG sudah mencapai 8.947.024 juta jiwa, sementara jumlah OAP masih berada pada angka 1,8 juta jiwa.

Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia adalah benar-benar penguasa kolonial modern yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa Papua. Dr. Veronika Kusumaryati, seorang putri generasi muda Indonesia dalam disertasinya berjudul "Ethnography of Colonial Present: History, Experience, And Political

Consciousness in West Papua” mengungkapkkan:

“Bagi orang Papua, kolonialisme masa kini ditandai oleh pengalaman dan militerisasi kehidupan sehari-hari. Kolonialisme ini juga bisa dirasakan melalui tindak kekerasan yang secara tidak proporsional ditunjukkan kepada orang Papua, juga narasi kehidupan mereka. Ketika Indonesia baru datang, ribuan orang ditahan, disiksa, dan dibunuh. Kantor-kantor dijarah dan rumah-rumah dibakar. Kisah-kisah ini tidak muncul di buku-buku sejarah, tidak di Indonesia, tidak juga di Belanda. Kekerasan ini pun tidak berhenti pada tahun 1960-an” (2018:25).

Pemerintah Indonesia mengulangi pengalaman penguasa kolonial Apartheid di Afrika Selatan pada tahun 1978. Peter W. Botha menjadi Perdana Menteri dan ia menjalankan politik adu domba dengan memecah belah persatuan rakyat Afrika Selatan dengan mendirikan negara-negara boneka: 1) Negara Boneka Transkei, 2) Negara Boneka Bophutha Tswana, 3) Negara Boneka Venda, 4) Negara Boneka Ciskei. Hal ini dikatakan oleh Sutrisno Eddy (2002:25) dalam “16 Pahlawan yang Paling Berpengaruh”.

Ancaman serius dan tersingkirnya orang asli Papua di tanah leluhur mereka dengan fakta perampasan ruang-ruang ekonomi dan hak-hak dasar penduduk asli Papua terjadi di berbagai kabupaten. Berikut ini data komposisi kekuasaan kursi parlemen di sejumlah kabupaten, yang bisa menggambarkan bagaimana orang Papua tersingkir.

1. Kabupaten Sarmi 20 kursi: Pendatang 13 orang dan Orang Asli Papua (OAP) 7 orang
2. Kabupaten Boven Digul 20 kursi: pendatang 16 orang dan OAP 6 orang

3. Kabupaten Asmat 25 kursi: pendatang 11 orang dan OAP 14 orang
4. Kabupaten Mimika 35 kursi: pendatang 17 orang dan OAP 18 orang
5. Kabupaten Fakfak 20 kursi: pendatang 12 orang dan OAP 8 orang
6. Kabupaten Raja Ampat 20 kursi: pendatang 11 orang dan OAP 9 orang
7. Kabupaten Sorong 25 kursi: pendatang 19 orang dan OAP 7 orang
8. Kabupaten Teluk Wondama 25 kursi: pendatang 14 orang dan OAP 11 orang
9. Kabupaten Merauke 30 kursi: pendatang 27 orang dan OAP hanya 3 orang
10. Kabupaten Sorong Selatan 20 kursi. pendatang 17 orang dan OAP 3 orang
11. Kota Jayapura 40 kursi: pendatang 27 orang dan OAP 13 orang
12. Kabupaten Keerom 23 kursi: pendatang 13 orang dan OAP 7 orang
13. Kabupaten Jayapura 25 kursi: pendatang 18 orang dan OAP 7 orang

Sementara anggota Dewan Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai berikut: 1) Provinsi Papua dari 55 anggota 44 orang Asli Papua dan 11 orang Melayu atau pendatang. 2) Provinsi Papua Barat dari 45 anggota 28 orang Melayu atau pendatang dan hanya 17 Orang Asli Papua.

Nubuatan Hermanus (Herman) Wayoi sedang tergenapi (Yoman, 2007:143). 'Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan

pemusnahan etnis Melanesia dan menggantinya dengan etnis Melayu dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan mendatangkan transmigrasi dari luar daerah dalam jumlah ribuan untuk mendiami lembah-lembah yang subur di Tanah Papua. Dua macam operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan Ras Melanesia di tanah ini...’ (Dikutip dari Makalah “Tanah Papua (Irian Jaya) Masih Dalam Status Tanah Jajahan: Mengungkap Hati Nurani Rakyat Tanah Papua”, Bandar Numbay, Medyo Februari 1999)

Pemekaran kabupaten dan provinsi di Papua sebagai operasi militer itu terbukti dengan dokumen-dokumen negara sangat rahasia. Seperti dokumen Departemen Dalam Negeri, Ditjen Kesbang dan LINMAS: Konsep Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dalam Menyikapi Arah Politik Irian Jaya (Papua) untuk Merdeka dan Melepaskan Diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terungkap dalam Nota Dinas No.578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tanggal 9 Juni 2000 berdasarkan radiogram Gubernur (caretaker) Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. BB.091/POM/060200 tanggal 2 Juni 2000 dan No.190/1671/SET/tertanggal 3 Juni 2000 yang berhubungan dengan tuntutan penentuan nasib sendiri Orang Asli Papua.

Adapun data lain yaitu dokumen Dewan Ketahanan Nasional Sekretariat Jenderal, Jakarta, 27 Mei 2003 dan tertanggal 28 Mei 2003 tentang: Strategi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Separatisme di Provinsi Papua melalui Pendekatan Politik Keamanan.

Lembaga-lembaga yang melaksanakan operasi ini ialah Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Luar Negeri, khusus untuk operasi diplomasi, Kepolisian Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI), KOSTRAD, dan KOPASSUS.

Indonesia sebaiknya menyelesaikan luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia yaitu 4 pokok akar masalah Papua. Terlihat bahwa Pemerintah dan TNI-Polri bekerja keras dengan berbagai bentuk untuk menghilangkan 4 akar persoalan Papua yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku "Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future" yang diterbitkan tahun 2008.

Empat akar persoalan itu adalah sebagai berikut: 1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia; (2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; (3) Diskriminasi dan marginalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri; (4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Pada akhir tulisan ini saya ingin hadirkan pernyataan dari Pastor Frans Lieshout, OFM. "Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan. Papua tetepelah luka bernanah di Indonesia." (2020:601)

BAGIAN V

**WARISAN JOKOWI:
PEMBANGUNAN VS.
ESKALASI KONFLIK**

BAB 22

Sembilan Dosa Politik Joko Widodo Terhadap Bangsa Papua Barat

Kebohongan Pemerintahan Indonesia berjalan telanjang di Tanah Papua Barat.

Presiden Joko Widodo berulang kali mengunjungi Tanah Papua Barat namun tak menyentuh jantung dan hati masyarakat Papua, yang menghadapi berbagai diskriminasi dan terancam marjinal di tanahnya sendiri. Ia mengecilkan masalah penderitaan, kekerasan, dan berbagai persoalan kemanusiaan yang dialami masyarakat atau Orang Asli Papua (OAP)– pemilih tanah leluhur.

Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 7 Juli 2023 lalu telah melukai, bahkan menjadi dosa bagi tanah dan bangsa Papua Barat (OAP). Saat itu Jokowi mengatakan begini:

“Jangan dilihat (negatif). Karena memang secara umum, 99 persen itu gak ada masalah. Jangan masalah kecil dibesar-besarkan. Semua di tempat, di manapun, di Papua kan juga aman-aman saja”.

“Kita karnaval juga aman, kita ke sini juga gak ada masalah, ya kan? Kita malam makan di restoran juga gak ada masalah. Jangan dikesankan justru yang dibesarkan yang negatif-negatif. Itu merugikan Papua sendiri”.

Pernyataan Jokowi tersebut bagi kami menyiratkan pandangan berbasis rasialisme terhadap rakyat Papua. Inilah muasal dosa-dosa politik Jokowi di Tanah Papua, yang telah merusak dan memperburuk komunikasi politik dan relasi sosial antara rakyat dan bangsa Papua Barat dengan Pemerintah RI.

Tulisan ini ingin menunjukkan sembilan dosa politik Joko Widodo terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat.

1. Jangan dilihat (negatif)

Selama ini yang melihat dan membuat rakyat dan bangsa Papua Barat negatif ialah penguasa Indonesia.

Pemerintah Indonesia sejak awal 19 Desember 1961 sudah melihat Penduduk Orang Asli Papua (POAP) atau bangsa Papua Barat dengan pikiran negatif, yaitu kemerdekaan bangsa kami pada 1 Desember 1961 dianeksasi atau diinvasi militer dengan label negatif “negara boneka.”

Pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika dan PBB telah melihat kami dengan pikiran negatif, rasis dan fasis, yaitu tidak melibatkan perwakilan bangsa Papua Barat dalam proses pembuatan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan Perjanjian Roma 30 September 1962.

Pemerintah Indonesia melalui kekuatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) – sekarang bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI) – telah melihat negatif sejarah dan kebudayaan bangsa Papua Barat, sehingga buku-buku sejarah yang berhubungan dengan bangsa Papua Barat dimusnahkan dan dibakar.

Pemerintah Indonesia juga memandang rendah martabat dan melihat secara negatif terhadap rakyat

dan bangsa Papua Barat dan hak politik dirampok dan dihancurkan dalam proses politik Pepera 1969 dengan kekuatan moncong senjata ABRI.

Lagu-lagu Mambesak yang dipopulerkan oleh (alm) Arnold Clemens Ap, Edward Mofu dan kawan-kawan yang menghidupkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Papua Barat juga dilihat negatif oleh penguasa Indonesia dan para pemimpinnya dibunuh.

Pemerintah Indonesia menilai negatif Penduduk Orang Asli Papua dan merendahkan martabat dengan stigma atau label separatistis, makar, OPM, GPK, GPL, KKB, teroris, monyet, dan masih banyak sebutan negatif lain.

Pemerintah, TNI-Polri melihat negatif terhadap Mama-Mama Papua dengan inovasi dan kreatif melukis bendera Bintang Kejora di noken-noken kerajinan tangan sebagai salah satu sumber pendapatan atau mata pencaharian.

Pemerintah Indonesia menilai negatif demo damai rakyat dan bangsa Papua Barat yang menentang rasisme dan ketidakadilan. Para pemimpin demonstrasi ditangkap dan diadili secara negatif dituduh makar dan dipenjarakan.

2. Karena memang secara umum, 99 persen itu gak ada masalah

Sesungguhnya persoalan konflik Papua Barat itu sangat kompleks dan multidimensi. Spiral kekerasan Negara menyebabkan tragedi kemanusiaan yang kronis, diperlukan penyelesaian dengan serius. Karena aktor kekerasan di Papua Barat selama ini didominasi oleh Negara, pernyataan Joko Widodo tersebut sangat paradoks dan buruk. Karena, 99% di Papua Barat ada

masalah ketidakadilan dan pelanggaran HAM berat sangat sulit dan rumit.

Akar konflik sudah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kini dikenal namanya Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), terdapat empat, yaitu: (1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia; (2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; (3) Diskriminasi dan marginalisasi orang asli Papua di tanah sendiri; (4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Kalau dianggap di Papua Barat 99% tidak ada masalah, mengapa Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo berkunjung ke Australia 4-5 Juli 2023, lalu dilanjutkan ke PNG pada 5 Juli 2023 untuk mencari atau meminta dukungan untuk “memikul dosa-dosa” Indonesia secara bersama-sama.

Prof. Dr. Franz Magnis Suseno pernah menyatakan bahwa situasi Papua sedang tidak baik-baik saja. “Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu terutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia... kita akan ditelanjangi di dunia beradab, sebagai bangsa biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata” (Suseno: 2015, 255-257).

Pastor Frans Lieshout OFM (alm.), seorang pastor Belanda dan menjadi Warga Negara Indonesia dan tinggal di Papua, dengan jernih menyatakan bahwa, “Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan. Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia” (Lieshout: 2020, 601).

Pengakuan Dr. Anti Soleman dalam peluncuran 5 buku *Seri Sejarah Politik, HAM dan Demokrasi di West Papua* karya Markus Haluk di Graha Oikoumene, Jakarta, pada Kamis (15/6/2023) menyatakan orang-orang Papua yang telah terjadi turun temurun. “Buku ini cerita tentang luka. Luka tentang Papua itu tidak saja ada pada kami seperti usia saya yang sudah 71 tahun, tapi luka itu sudah ada dalam hidup anak dan cucu kita, umurnya 17 tahun”.

3. Jangan masalah kecil dibesar-besarkan

Dalam keadaan sadar atau tidak sadar, Presiden RI Ir. Joko Widodo dengan rombongan ke Australia dan PNG pada 4-5 Juli 2023 lalu, merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari memperluas dan memperkenalkan akar konflik Papua Barat kepada komunitas internasional. Atau, dalam bahasa Presiden Ir. Joko Widodo “Jangan masalah kecil dibesar-besarkan”.

Rakyat awam dengan polos akan bertanya. Siapa yang membesar-besarkan masalah Papua Barat selama ini?

Pengiriman pasukan non organik dalam jumlah besar ke Papua Barat juga adalah bukti pemerintah ikut membesar-besarkan, menyebar-luaskan, memperkenalkan, mengumumkan, dan mengkampanyekan, bahwa di Papua Barat 99% ada masalah.

Pengiriman kelompok komprador binaan intelijen negara yang dikirim ke Vanuatu pada 19-21 Juli 2023 lalu untuk menghadiri Festival Budaya Melanesia juga menunjukkan bahwa ada konflik besar di Papua Barat. Maka Negara membina kelompok komprador dan gladiator untuk mengadu-domba rakyat dan bangsa Papua Barat sendiri.

Penyanderaan pilot Philip Mark Mehrthens dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) oleh pimpinan Egianus Kogeya pada 7 Februari 2023 dan masih disandera ini, menunjukkan bahwa di Tanah Papua Barat ada masalah besar, bukan masalah kecil atau tidak ada masalah.

Pemerintah Indonesia belum atau tidak mengizinkan Komisioner Tinggi HAM PBB dan wartawan asing dan diplomat asing ke Papua Barat juga menunjukkan bahwa ada persoalan besar yang sedang disembunyikan penguasa Indonesia.

Jadi, secara logika dan realitas saat ini, bahwa yang membesar-besarkan, menyebar-luaskan, memperkenalkan, mengumumkan dan mengkampanyekan akar konflik Papua Barat adalah pemerintah Indonesia, TNI-Polri, dan kaum gladiator dan komprador. Sikap negara sangat membantu dan memperkuat bahwa di Papua Barat ada masalah atau persoalan besar.

4. Semua di tempat, di manapun, di Papua kan juga aman-aman saja

Bagi Presiden Ir. Joko Widodo merasa aman karena dikawal dan dijaga ketat oleh pengawal Presiden dan dengan pengawasan tertutup dan terbuka dari seluruh kekuatan militer Indonesia.

Di Nduga, di Intan Jaya, di Puncak, di Pegunungan Bintang, di Yahukimo, di Maybrat dan pengungsi 67.000 jiwa hidup tidak nyaman. Pada umumnya, rakyat dan bangsa Papua Barat tidak merasa aman di atas tanah leluhur mereka, karena wajah kekerasan negara berjalan telanjang di seluruh Tanah Papua Barat, dari Sorong hingga Merauke.

Salah dan keliru, kalau ukuran aman dilihat dari posisi kenyamanan Presiden RI Ir. Joko Widodo. Sesungguhnya, rakyat dan bangsa Papua Barat tidak nyaman dan itu terbukti ketika Joko Widodo datang ke Papua Barat yang ke-17 kali, tidak ada penjemputan yang meriah, seperti di luar Papua.

5. Kita karnaval juga aman

Akar konflik Papua Barat yang menahun dan kronis tidak ada kaitan dengan Karnaval. 99% akar konflik Papua Barat yang mendera hebat dalam tubuh bangsa Indonesia tidak dipelester atau disembunyikan dengan kegiatan hiburan yang tidak ada manfaat langsung bagi Penduduk Orang Asli Papua. Apa relasi antara 99% akar konflik Papua Barat dengan kegiatan karnaval?

Kegiatan karnaval pasti aman karena di dalam kota dan dijaga ketat oleh aparat keamanan. Jadi, ukuran aman dalam pengertian dari perspektif apa? Karnaval pasti aman karena dihadiri oleh Presiden.

6. Kita ke sini juga gak ada masalah, ya kan?

Pasti, dimana ada Presiden di situ pasti aman dan tidak ada masalah. Memang rasanya lucu pernyataan seorang Kepala Negara, maaf kesannya pernyataan itu seperti “kanak-kanak”.

7. Kita malam makan di restoran juga gak ada masalah

Di rumah makan dan di restoran memang tidak ada masalah. Tidak mungkin orang datang mengganggu karena Presiden dengan rombongan sedang makan. Bahkan setiap rumah makan dan restotan pasti dan selalu nyaman untuk para pelanggan menikmati makan siang,

sore atau malam. Pemilik rumah makan itu selalu menjaga kualitas pelayanan yang terbaik untuk pelanggan.

Ukuran aman yang dipakai Presiden Joko Widodo tidak diterima secara akal sehat. Karena, rasa aman di rumah makan atau restoran dijadikan ukuran rasa aman di seluruh Tanah Papua Barat.

8. Jangan dikesankan justru yang dibesar-besarkan yang negatif-negatif

Saya coba menuliskan fakta-fakta mengenai korban yang jatuh karena peperangan atau konflik bersenjata TNI/Polri dan TPNPB di hutan belantara Papua Barat. Kalau penguasa Indonesia melihat masalah konflik 99% di Papua Barat ini, maka korban anggota TNI/Polri berpangkat kecil atau rendah yang selalu berada pada front line (garis depan), pulang dalam duka untuk keluarganya di kampung halamannya.

Saya catat beberapa korban dari anggota TNI sebagai berikut: Peristiwa penembakan yang menyebabkan kematian Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha pada 25 April 2020 di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Barat, sampai saat ini masih misteri siapa penembak sang jenderal ini. Negara menuduh pelakunya ialah pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Ada penembakan terhadap tenaga kesehatan Suster Gabriella Meilan (22) di Distrik Kiwirok-Pegunungan Bintang, Papua Barat pada 13 September 2021 dan anggota TNI Prada Beryl Kholif Al Rahman ditembak mati pada 29 Juni 2022.

Ada empat anggota TNI ditembak mati di Aifat, Distrik Kisor, Maybrat pada 2 September 2021, yakni: Ko-

mandan Pos Koramil Kisor Letnan Satu (Inf) Dirman, Serasan Dua Ambrosius Yudiman, Prajurit Kepala Muhammad Dirhamsyah, dan Prajurit Satu Zul Ansari Anwar.

Pada 14-15 April 2023 di Distrik Bugi, Kabupaten Nduga, Papua Barat, ada empat anggota TNI ditembak mati oleh TPNPB. Nama-nama korban sebagai berikut: 1) Alm. Pratu Miftahul Arifin (Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad; (2) Alm. Pratu Ibrahim (Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad; (3) Alm. Pratu Kurniawan (Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad; (4) Alm. Prada Sukra (Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad. Keempat prajurit yang ditembak mati tersebut berasal dari Satuan Tugas Batalion Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.

Ada juga penembakan terjadi di Dekai, Yahukimo, Papua Barat pada 13 Maret 2023. Komandan Kodim atau Dandim 1715/ Yahukimo, Letkol Inf J.V. Tethool menjadi satu dari lima anggota TNI yang ditembak. Akibat penembakan ini ada 4 prajurit TNI tertembak, salah satunya yakni Pratu Lukas Worambai meninggal dunia dan tiga prajurit lainnya yakni, Sertu roby, Pratu Niko dan Pratu Jakonias terluka.

Apakah Presiden tetap memelihara 99% konflik Papua dengan pernyataan-pernyataan yang mengganggalkan akar konflik Papua Barat yang menahun, kronis, dan sudah menjadi luka mendalam di dalam tubuh bangsa Indonesia?

9. Itu merugikan Papua sendiri

Dosa politik yang ke-9 ialah siapa yang merugikan Penduduk Orang Asli Papua (POAP) atau rakyat dan bangsa Papua Barat?

Pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, PBB telah merugikan dan mengorbankan rakyat dan bangsa Papua Barat dengan konspirasi politik kepentingan kapitalisme, hegemoni kolonialisme dan imperialisme melalui Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan Pepera 1969.

Pemerintah Indonesia merugikan dan menghancurkan POAP atau rakyat dan bangsa Papua Barat dengan gagal melaksanakan UU Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001. Otsus sebagai solusi politik yang berprospek damai ini benar-benar menjadi malapetaka bagi POAP karena tidak ada perlindungan (*protection*), tidak ada pengakuan (*recognition*), tidak ada keberpihakan (*affirmative action*) dan tidak ada pemberdayaan (*empowering*).

Hukum menjadi alat untuk melegitimasi dan melakukan diskriminasi rasial, kriminalisasi terhadap pemimpin-pemimpin hebat dan berani yang berpihak kepada Penduduk Orang Asli Papua juga adalah kerugian dan kehancuran besar yang dilakukan penguasa Republik Indonesia selama ini, telah merugikan pihak Penduduk Orang Asli Papua.

BAB 23

Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke Papua: Apa yang Dilakukan dan Mengapa Masalah Konflik dan Hak Asasi Manusia Tak Diselesaikan

Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Mah'ruf Amin banyak kunjungan ke Papua Barat tapi belum mengerti akar konflik Papua Barat. Banyak kunjungan tapi tidak menolong Penduduk Orang Asli Papua Barat dalam menyelesaikan akar konflik Papua Barat. Banyak janji tapi tak terpenuhi, bahkan tak jarang yang terlihat pernyataan yang sangat melukai hati rakyat dan bangsa Papua Barat.

Pernyataan Presiden Joko Widodo pada 7 Juli 2023 menjadi contoh, yang penulis elaborasi lebih mendalam pada tulisan "Sembilan Dosa Politik Joko Widodo Terhadap Bangsa Papua Barat". Demikian pernyataan itu, "Jangan dilihat (negatif). Karena memang secara umum, 99 persen itu gak ada masalah. Jangan masalah kecil dibesar-besarkan. Semua di tempat, di manapun, di Papua kan juga aman-aman saja." Selanjutnya Presiden Jokowi mengatakan, "Kita karnaval juga aman, kita ke sini juga gak ada masalah, ya kan? Kita malam makan di restoran juga gak ada masalah. Jangan dikesankan justru yang dibesar-kan yang negatif-negatif. Itu merugikan Papua sendiri".

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Presiden Mah'ruf Amin, dalam pernyataan keterangan pers di

Pondok Pesantren KHAS Kempek pada agenda Haul Ke-34 KH Aqiel Siroj, di Cirebon, Jawa Barat, (Kompas, Sabtu, 26/8/2023) menyatakan, “Jadi, kita akan menggaruk yang gatal. Kita akan tanya yang gatal di mana? Jangan sampai kita yang gatal di mana, yang digaruk di mana, sehingga tidak menyelesaikan persoalan.”

Ir. Joko Widodo mengatakan 99% Papua Barat tidak ada masalah. Haji Ma’ruf Amin mengatakan persoalan Papua itu hanya penyakit gatal-gatal. Mengapa Presiden dan Wakil Presiden mengabaikan masalah konflik dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Negara terhadap Penduduk Orang Asli Papua Barat?

Padahal, konflik dan kekerasan di Tanah Papua tak pernah surut. Bahkan, beberapa tahun terakhir ini intensitas konflik terus meningkat. Sebaran konflik dan korbannya pun semakin meluas. Kekerasan konflik bersenjata antara militer Indonesia dan kelompok perlawanan Papua Tentara Pembabasan Nasional Papua Barat (TPNPB) terus terjadi, dan memakan korban di kedua belah pihak.

Apakah konflik kekerasan di wilayah Papua itu tak bisa diselesaikan? Barangkali konflik di Papua berlangsung lebih dari setengah abad, namun belum ada upaya signifikan untuk menghentikan konflik tersebut. Mengapa dan untuk apa konflik dan kekerasan itu seakan dibiarkan atau ‘dipelihara’? Apakah kepentingan yang membuat konflik ini terus meningkat?

Saat ini, hampir tiap konflik di kampung-kampung atau daerah pedalaman Papua bisa terpantau dan diketahui oleh masyarakat. Dunia ini sudah menjadi seperti sebuah kampung kecil, tidak seperti tahun 1960-an. Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan Pepera 1969

bisa direkayasa atau bersandiwara di belakang orang Papua, tapi era sekarang semua berjalan telanjang. Tidak ada kolong dan tempat untuk para pihak yang melakukan kejahatan untuk bersembunyi. Sudah usang cara-cara rekayasa dan cara-cara primitif di era ini. Seluruh mata komunitas global dan rakyat Indonesia sedang melihat perilaku penguasa Indonesia yang rasisme dan fasisme di Papua.

Bagaimana kita percaya pembakaran pesawat MAF di Intan Jaya (6 Januari 2021), penembakan Kabinda Papua di Puncak (25 April 2021), penembakan dua anggota TNI di Yahukimo (18 Mei 2021), penembakan 4 anggota TNI di Maybrat (2 September 2021), penembakan dan pembakaran kantor di Pegunungan Bintang pada 13 September 2021, yang informasi-informasinya hanya kita peroleh dari satu pihak?

Konflik kekerasan, pelaku dan motif seringkali sulit diungkap kebenarannya, karena satu pihak dari yang berkonflik mendominasi dalam penyebaran informasi terkait peristiwa tersebut. Acap kali, informasi itu keliru dan tak bisa dimengerti dengan nalar. Bahkan, informasi dari satu pihak itu, mengarah pada ketidaksesuai atau tak masuk di akal untuk memahami pelaku, korban, dan juga motif maupun kronologi dalam peristiwa itu. Karena tidak terungkap, berbagai konflik tak bisa diselesaikan dengan tuntas, baik melalui dialog maupun penegakan hukum.

Pengaman intelijen AC Manulang – mantan Direktur pernah mengungkapkan

“Bukan tidak mungkin dan jarang terjadi jika berbagai kerusuhan di berbagai daerah terlepas dari aktor intelektual dari Jakarta. Ini tidak lepas kepentingan elit di Jakarta.” (AC Manulang-2012).

Pengamat Intelijen (alm.) AC Manulang, Mantan Direktur BAKIN (sekarang BIN), pernah mengungkapkan bagaimana intelejen di negara ini bekerja dalam mengelola konflik di berbagai daerah, termasuk di Papua. Dalam Indopos, 4 November 2012, ia mengatakan seperti ini:

“Bukan tidak mungkin dan jarang terjadi jika berbagai kerusuhan di berbagai daerah terlepas dari aktor intelektual dari Jakarta. Sangat mungkin kerusuhan ini didesain (design) dari Jakarta dengan berbagai tujuan. Sangat tidak logis, aparat kepolisian tidak bisa memanfaatkan tokoh lokal yang sangat berpengaruh dan meminta warga agar tidak lepas kendali. Rekayasa kerusuhan SARA juga akan terus dipelihara di Maluku maupun kawasan Indonesia bagian Timur. Sekarang mulai merambah ke wilayah Barat. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, situasi Ambon, Lampung, Poso maupun Papua masih terus bergejolak. Ini tidak lepas kepentingan elit di Jakarta.”

Roh dan pesan yang penulis tangkap dari komentar AC Manulang tersebut ialah seluruh konflik kekerasan negara di Papua ada aktor dari Jakarta dan kepentingan Jakarta. Konflik diciptakan dan dipelihara oleh elit-elit Jakarta. Komentarnya ini, setidaknya AC Manulang membongkar siasat dan strategi konflik sistemik, terstruktur, terlembaga, masif dan kolektif dilakukan penguasa kolonial modern Indonesia atas rakyat dan bangsa Papua.

Penulis mengamati konflik kekerasan oleh negara di Papua memuat beberapa tujuan dalam munculnya beragam peristiwa:

1. Pembeneran label atau mitos teroris di Papua.

Negara berusaha menciptakan konflik di Papua seperti di Nduga pada 2018, Intan Jaya pada 2019,

Puncak Ilaga tahun 2020, Yahukimo pada 2020, Maybrat 2 September 2021, Pegunungan Bintang 13 September 2021, bisa bertujuan untuk membenarkan atau menjustifikasi (*justification*) dan memperkuat pemberian label atau mitos teroris kepada gerakan orang asli Papua yang telah dan sedang berjuang untuk penentuan nasib sendiri dengan cara-cara damai sejak 1960-an sampai saat ini.

Harapan dan tujuan Indonesia memberikan label/mitos teroris kepada orang Papua untuk mencari dukungan komunitas internasional. Meskipun, ternyata masing-masing negara mempunyai definisi 'teroris' berbeda-beda. Artinya, Indonesia tidak mencapai atau mendapat tujuan mereka untuk meraih dukungan komunitas global untuk melawan mitos 'teroris' di Papua. Label teroris yang dianggap paling tinggi ini ternyata sudah menjadi sama level dengan mitos-mitos yang diciptakan sebelumnya: separatis, makar, OPM dan KKB yang tidak berdampak banyak untuk dukungan internasional.

2. *Pengalihan kejahatan hak asasi manusia dan pemusnahan etnis Papua.*

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dari empat akar persoalan Papua salah satunya ialah pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama lebih dari setengah abad, sejak 1 Mei 1963 sampai saat ini, telah menjadi keprihatinan dan perhatian komunitas internasional dan juga rakyat Indonesia.

Pemerintah Indonesia didesak oleh hampir 84 negara termasuk Uni Eropa untuk penyelesaian akar konflik kekerasan negara, pelanggaran berat HAM dan pemusnahan etnis Papua. Pelanggaran berat HAM dan

pemusnahan etnis Papua yang berbasis pada diskriminasi rasial telah menjadi duri dalam tubuh bangsa Indonesia. Penguasa Indonesia berusaha menghindar dan mencuci tangan dari seluruh kekejaman negara.

Pelanggaran berat HAM dan pemusnahan etnis di Papua terjadi karena praktik-praktik kekuasaan kolonialisme modern dalam proses integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia. Praktik kolonialisme modern itu seperti eksploitasi sumber daya alam atau kekayaan bumi Papua, pengerahan kekuatan militer secara masif, diskriminasi rasialisme pada orang Papua, marginalisasi dan ketidakadilan, serta genosida-ekosida yang berlangsung dalam waktu yang panjang.

Ada beberapa pertanyaan yang penulis ajukan agar para pembaca bisa berpikir, berefleksi, dan barang kali juga menjawabnya, sesuai kemampuan analisisnya.

- Apakah benar pesawat Mission Aviation Fellowship (MAF) bernomor penerbangan PK-MAX yang dipiloti Alex Lufcherd berkewarganegaraan Amerika ini dibakar oleh Tentara Pembebasan Papua Barat (TPN-PB) pada 6 Januari 2021 di bandara Kampung Pagamba Distrik Mbiaduga, Kabupaten Intan Jaya?
- Apakah benar Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Putu Gusti Danny Nugraha Karya ditembak mati oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) pada Minggu, 25 April 2021 di Kabupaten Puncak?
- Apakah benar penembakan dua anggota TNI Satgas Pamrahwan Yonif PR 432/WSJ, Praka Yudi Aryanto dan Praka Alif pada 18 Mei 2021 di Kali Brasa Dekai, Kabupaten Jahukimo dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-TPN-PB?

- Apakah benar pembunuhan dengan cara yang biadab, kejam dan barbar terhadap 4 anggota TNI, yaitu Serda Amrosius, Praka Dirham, Pratu Zul Ansari, dan Lettu chb Dirman di kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kab. Maybrat pada 2 September 2021 dilakukan oleh TPN-PB?
- Apakah benar 8 orang karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) atau pekerja Tower masing-masing Bona Simanullang, Billy Garibaldi, Renal T. Tentua, Syahril Nurdianyah, Eko, Ibo, Jamaludin, dan Bebi Tabuni tewas ditembak oleh TPN-PB pada 2 Maret 2022 di Beoga, Puncak?
- Mengapa korban lebih banyak anggota TNI berpangkat rendah, kecuali Kabinda Papua dan diberitakan atau disiarkan secara luas, besar-besaran dan masif di media-media utama nasional?
- Mengapa penembakan ratusan ribu orang asli Papua yang ditembak mati selama lebih dari 50 tahun sejak 1 Mei 1963 terbungkam, belum dan tidak pernah disiarkan secara luas dan masif di media-media nasional?

Para pembaca yang mulia yang masih memiliki hati nurani kemanusiaan melihat kejahatan dan kekejaman ini dengan jernih, supaya salah satu pihak dalam konflik bersenjata tidak mengkambinghitamkan pelaku atau pun aktor dalam kekerasan bersenjata tersebut. Apakah TNI-Polri diduga pelakunya, atau bahkan muncul dugaan juga pelakunya TPN-PB, rakyat Papua dan rakyat Indonesia akan selau mempertanyakan. Karena, konflik kekerasan yang memakan korban rakyat Papua itu tidak pernah terungkap dan proses hukum yang adil oleh negara.

Para pembaca mulia dan terhormat. Barangkali

kita perlu secara kritis dan teliti merenungkan, mengapa berkembang begitu dominannya orang asli Papua menjadi kambing hitam dalam fenomena-fenomena konflik tersebut? Mari dengan pikiran terbuka, kita membuka lensa kekuasaan yang menunjukkan penindasan dan penjajahan modern di tengah-tengah rakyat Papua. Bila kita menggunakan lensa kemanusiaan dan keadilan, kita akan memahami dan mengetahui kebenaran-kebenaran dalam konflik-konflik kekerasan yang terjadi di Tanah Papua.

Pada 6 April 2013 dalam acara peresmian Tugu Injil di Beoga, Kabupaten Puncak, Dandim 1714 Puncak Jaya pada malam hari mendiskusikan bagaimana anggota TNI menjual senjata dan amunisi kepada anggota TPN-PB. Ia pernah berujar seperti ini, "Kami rasa takut yang ada di dalam dan kami juga takut kepada mereka yang ada di luar. Karena kami ada keluarga yang kami tinggalkan di Jawa. Mereka mau kami kembali kepada mereka dalam keadaan selamat."

Apa maksud dan pesan dari Dandim 1714 Puncak Jaya ini? Siapa yang ada di dalam perlu ditakuti dan diwaspadai? Pesan seperti ini dimaknai, ditafsirkan dan dianalisa, bahwa semua kekerasan dan kejahatan yang terjadi di Papua selama ini patut dipertanyakan. Terlalu prematur, TPN-PB selalu dikambing-hitamkan sebagai aktor kekerasan.

Menurut penulis, sejauh belum ada tim investigasi independen dan kredibel untuk mencari bukti-bukti atau fakta-fakta tentang seluruh kekerasan yang terjadi Papua, maka kekerasan tidak akan pernah berhenti. Sebaliknya, antar TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) saling tuding dan lebih mengkambing-

hitamkan TPN-PB atau tuduhan dengan mitos KKB/KKSB.

Rangkaian konflik kekerasan negara yang berlangsung panjang dan kini lebih terbuka itu dan masif, dalam waktu cepat konflik demi konflik terjadi, dan menutup ruang untuk mengungkapkan satu per satu. Maka, dugaan kuat, konflik-konflik yang berujung kekerasan dan memakan korban yang tak sedikit itu, bertujuan untuk menutupi dan menghilangkan berbagai jejak dan fakta dalam pengungkapan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan, dugaan pemusnahan etnis Papua, akan mudah disangkal oleh negara, karena orang-orang Papua yang menjadi korban selalu tertutupi dan terjauhkan dari pengawasan publik, baik nasional maupun internasional.

3. Remiliterisasi: pembangunan infrastruktur militer.

Dewan Gereja Papua (WPCC) telah menyatakan dengan surat terbuka pada 7 Oktober 2020 kepada Presiden Joko Widodo sebagai Panglima Teringgi TNI/Polri, bahwa rakyat Papua bukan musuh NKRI. Maka, Dewan Gereja Papua menyerukan agar menghentikan remiliterisasi yang terjadi di Tanah Papua.

Remiliterisasi sedang terjadi di seluruh wilayah Papua, dari Sorong hingga Merauke. Dan, yang menjadi alasan bagi remiliterisasi itu adalah adanya ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), yang membahayakan keselamatan keutuhan wilayah Indonesia. Konflik-konflik kekerasan negara yang terjadi itu tidak terpisahkan dari remiliterisasi di Papua.

Remiliterisasi dan kekerasan negara itu juga menjadi bagian integral dari “Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dalam

Menyikapi Arah Politik Irian Jaya (Papua) untuk Merdeka dan Melepaskan Diri Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang termuat dalam Nota Dinas No.578/ND/KESBANG/DIV/VI/2000 pada 9 Juni 2000 dan dokumen Ketahanan Nasional Sekretariat Jenderal, Jakarta, 27 Mei 2003 dan 28 Mei 2000.

Arkilaus Baho, Juru bicara DPP PRIMA Urusan Papua dan Papua Barat dalam menanggapi pembunuhan 4 anggota TNI: Serda Amrosius, Praka Dirham, Pratu Zul Ansari, dan Lettu chb Dirman di kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kab. Maybrat pada 2 September 2021 dengan tepat mengatakan, “Ada apa ini? Pembukaan pos teritorial disaat yang sama menguat kelompok yang klaim diri bahkan diklaim oleh aparat dengan label KKB.” Ia menduga bahwa labelisasi KKB dan skenario penyerangan itu dipakai meyakinkan pemerintah untuk melaksanakan percepatan dan perluasan operasi teritorial.

Ada yang aneh terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang pada 13 September 2021. Kelompok yang menamakan dirinya TPN-PB membakar fasilitas pelayanan umum. Kelompok itu mengatakan, “Kami menolak semua fasilitas pemerintah dan bakar semua gedung-gedung kantor pemerintah.”

Apakah TPN-PB berjuang untuk bakar-bakar gedung-gedung kantor untuk fasilitas pelayanan publik? Ini perjuangan yang aneh, dan bukan pejuang Papua Barat merdeka. Ini TPN-PB benaran atau kelompok yang dibina dan dipelihara khusus untuk membuat keonaran.

4. Kepentingan Bisnis atau Kapitalisme.

Sejarah mengorbankan nyawa manusia demi kepentingan bisnis atau kapitalisme selalu terulang

dari waktu ke waktu sesuai tempat dan kebutuhan para penguasa dan para pemodal. Seperti di Nduga ada emas, di Intan Jaya ada emas, di Puncak Ilaga ada emas, di Yahukimo ada emas, di Maybrat ada emas, di Pegunungan Bintang ada emas. Di mana ada emas di situ selalu diciptakan konflik supaya penduduk setempat sebagai pemilik emas itu harus diusir atau diungsikan dengan alasan wilayah sudah tidak aman bagi rakyat.

Setelah pemilik tambang diusir atau diungsikan, aparat keamanan dari TNI-Polri hadir membangun pos pengamanan dan diikuti pemilik modal untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Kekayaan Papua menjadi motivasi pendudukan dan penjajahan modern yang ditopang oleh kekuatan kapitalisme (investor besar) demi kepentingan ekonomi dan eksploitasi tambang emas dan uranium di Papua.

Bila membuka lembaran sejarah konflik terkait eksploitasi kekayaan alam Papua, kita akan menemukan bahwa kekuatan besar di balik kepentingan kapitalisme di Papua telah mengorbankan tokoh-tokoh penting. Kita bisa sebut: (a) Sekretaris Jenderal PBB, Dag Hammarskjold di Kongo pada 17/18 September 1961; (b) Presiden Amerika Serikat John F.Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963; Presiden John F Kennedy tewas ditembak oleh Lee Harvey Oswald. (c) Dan dilengserkannya Presiden Ir. Soekarno pada tahun 1965 dengan tuduhan pendukung Komunis – yang waktu itu dalam Perang Dingin dekat dengan blok Uni Soviet daripada Amerika Serikat.

Ketiga tokoh tersebut dianggap sebagai penghambat kepentingan ekonomi di Papua. Ketiganya jatuh dalam kekuasaan hebat dibalik penguasaan kekayaan

alam Papua. Setelah para penghalang itu bisa dijatuhkan, maka para pemilik modal dengan secepatnya membuat perjanjian kontrak kerja PT Freeport McMoran dengan Soeharto pada 7 April 1967 untuk tambang dan uranium di Namangkawi/Ndugu-Ndugu (Tembagapura).

Perjanjian kontrak kerja ini dibuat dua tahun sebelum Papua dipaksa integrasi melalui Pepera pada 1969, yang mekanisme pemilihannya didesain dan direkayasa oleh kekuasaan, yang melibatkan kekuasaan negara Indonesia, dan dukungan kepentingan kapitalisme internasional (Amerika Serikat).

5. Menghambat kunjungan Komisi HAM PBB di Papua.

Konflik-konflik kekerasan yang terjadi di Papua dalam waktu yang panjang juga dipakai oleh negara untuk menutup upaya-upaya bantuan kemanusiaan dari luar negeri. Konflik-konflik yang 'dikelola' negara itu bertujuan untuk menghambat berbagai pihak internasional dalam mengawasi persoalan HAM di Tanah Papua.

Memang sejak dulu Papua dikelola dan dipelihara sebagai wilayah konflik, persoalan keamanan diciptakan, untuk salah satunya, menutup akses internasional, karena Papua diciptakan 'citra' daerah berbahaya bagi orang asing. Maka, tak hanya turis asing yang ingin berkunjung ke Papua, namun juga 'terlarang' bagi kegiatan-kegiatan yang menyinggung masalah keamanan. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan melarang diplomat asing, wartawan asing, dan pekerja hak asasi manusia dari luar negeri untuk berkunjung ke Papua. Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia pun tidak mengizinkan Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua Barat.

Lalu, pertanyaannya, mengapa pemerintah

Indonesia melarang kunjungan Komisi HAM PBB, diplomat asing, wartawan asing untuk mengunjungi Papua? Apa yang sedang disembunyikan pemerintah Indonesia di Papua?

Menurut saya, ada konsekuensi logis yang sangat berat bagi Indonesia kalau Komisi HAM PBB, diplomat asing dan wartawan asing tidak diijinkan. Situasi itu akan memunculkan upaya mobilisasi komunitas internasional untuk memberikan perhatian masalah hak asasi manusia yang terjadi di Papua ke resolusi PBB. Dan, upaya itu telah berlangsung, seperti yang dimotori oleh negara-negara anggota MSG, PIF, ACP. Paling tidak, sekitar 85 negara dari organisasi internasional itu yang mempersoalkan masalah kunjungan Komisi HAM PBB ke Papua. Dalam keadaan pada tahap inisiatif resolusi PBB seperti ini, maka Indonesia akan membayar *high cost* (harga yang sangat mahal), tak sedikit biaya dan energi dikeluarkan untuk membendung dukungan internasional itu.

6. *Mereduksi perjuangan TPN-PB dan KNPB.*

Konflik-konflik kekerasan di Papua juga digunakan untuk mengkambinghitamkan dan mereduksi perjuangan yang dilakukan oleh TPN-PB dan KNPB, yang juga dituduh terlibat dalam berbagai kekerasan di Papua. Namun, KNPB tidak diam dalam tuduhan-tuduhan kekerasan yang diarahkan oleh pemerintah maupun pihak keamanan. KNPB dengan tegas menyatakan bahwa organisasinya bukan wadah kekerasan tapi media bagi rakyat untuk berjuang melalui jalan damai.

Misalnya, pada September 2021, Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Maybrat, Rudolf Fatem, membantah tudingan miring Kapolres Sorong Se-

latan AKBP Choiruddin Wachid, yang menyatakan KNPB wilayah Kisor adalah aktor sekaligus eksekutor dalam pembunuhan 4 anggota TNI AD di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat.

“Kami tidak tahu dengan insiden pembunuhan terhadap 4 anggota TNI di Kisor Sorong Selatan. Polisi Jangan mengkriminalisasi KNPB Maybrat dengan klaim sepihak yang tidak mendasar.” Pernyataan sikap dari KNPB itu dipublikasikan dalam *Jubi*, 9 September 2021.

7. Untuk Mempercepat Kepentingan Pemekaran Provinsi Boneka.

Kekerasan negara ini juga untuk meloloskan pembentukan provinsi-provinsi baru, atau pemekaran yang dimotori oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pemekaran provinsi terkesan tak lazim dalam pembentukan daerah otonomi baru, mengingat jumlah penduduk dan sumber daya manusianya yang amat terbatas. Namun, pemekaran provinsi dipaksakan untuk kepentingan keamanan nasional.

Tapi, tantangan terberat dan terbesar yang dihadapi Indonesia dan lebih khusus Menteri Dalam Negeri Indonesia ialah biaya pemekaran provinsi sangat besar, sementara Indonesia dirundung dan dibebani utang luar negeri yang mencapai ratusan triliunan rupiah. Kebijakan Negara yang tidak rasional dan realistis dan pemaksaan ini membawa Negara Indonesia dalam bahaya kehancuran. Apakah mau menyelamatkan NKRI atau paksakan pemekaran provinsi?

8. Pemusnahan Etnis Papua dan Marjinalisasi Orang Asli Papua.

Kekerasan dan kejahatan yang ditimbulkan ini bagian dari siasat Negara yang sistematis, terstruktur,

terlembaga, masif dan kolektif untuk memusnahkan dan meniadakan orang asli Papua dari tanah leluhurnya. Konflik diciptakan supaya orang asli Papua tidak merasa nyaman dan melarikan diri dari kampung halaman, tidak ada makanan, minuman, tidak ada pelayanan kesehatan yang baik, maka menimbulkan sakit dan menuju pada kematian. Orang Papua dibiarkan mati. Inilah kejahatan kemanusiaan yang melampaui batas-batas rasa keadilan dan kemanusiaan.

Marjinalisasi (peminggiran) atau pengusiran Orang Asli Papua dari Tanah air mereka adalah tindakan yang mencelakakan dan menghancurkan orang-orang asli Papua sebagai pemilik tanah. Pemusnahan dan marjinalisasi orang asli Papua juga melalui hak-hak dasar ekonomi sosial budaya yang terabaikan bertahun-tahun, seperti situasi hancurnya pilar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat orang asli Papua (OAP).

Realitas tersebut membuktikan bahwa OAP tidak mempunyai masa depan. Maka, penulis mendesak dengan pertanyaan ini, negara atau pemerintah model apa yang menggunakan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan dalam membangun wilayah Papua?

Pemerintah Indonesia merasa nyaman dengan banyaknya korban kemanusiaan, baik dari rakyat sipil maupun aparat keamanan. Dan, pada titik inilah, sejarah telah mencatat bahwa ambisi kekuasaan atas ekonomi dan kekayaan alam Papua sedang bekerja untuk membangun situs-situs kekerasan yang sistematis dan berkelanjutan. Demikian, Indonesia menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya di atas tanah dan manusia Papua hingga hari ini.

BAGIAN VI

PENUTUP

BAB 24

Penutup

Kekerasan terhadap kemanusiaan ini tidak berdiri sendiri dan tidak hanya terbatas dalam konteks Indonesia. Ada keterlibatan dan konspirasi internasional yang mengorbankan nasib dan masa depan rakyat dan bangsa Papua Barat, yaitu, Amerika Serikat, Belanda, Indonesia dan PBB ketika menjalankan proses perjanjian internasional dengan melahirkan New York Agreement pada 15 Agustus 1962. Oleh karena itu, dalam penyelesaian akar konflik Papua Barat yang kronis ini perlu dan penting meminta suatu pertanggungjawaban moral, etik dan politik dari PBB, Amerika Serikat dan Belanda.

Selanjutnya, persoalan ideologi Papua merdeka itu sudah berakar dan sulit digadaikan dengan pembangunan, uang dan jabatan. Kita sangat berbeda secara ideologis, antropologis, sosiologis, etnis dan letak geografis dan juga pemahaman proses sejarah. Ideologi Papua Barat merdeka tidak dapat digadaikan atau diselesaikan dengan Otonomi Khusus, pemekaran provinsi, pemberian reward (penghargaan) pada orang-orang yang dianggap atau diangkat sebagai tokoh-tokoh (tokoh boneka), kunjungan Presiden dan wakil Presiden berkali-kali dan pemberian uang dalam jumlah banyak, dan pembangunan yang semestinya sudah menjadi kewajiban negara.

Penguasa Indonesia bekerja dan berusaha keras dengan berbagai bentuk wajar dan tidak wajar: kejahatan- kejahatan dan kebohongan- kebohongan untuk mempertahankan Tanah Papua Barat. Tetapi, rakyat dan dan bangsa Papua Barat dengan konsisten terus mendidik para penguasa dan seluruh rakyat Indonesia dan komunitas internasional dengan data dan fakta-fakta kebenaran dengan jalan yang benar, jujur, dan obyektif untuk tujuan mulia, yaitu penghormatan hak dan martabat kemanusiaan kami sebagai sebuah bangsa merdeka dan berdaulat pada 1 Desember 1961 dan bukan sebagai sebuah provinsi-provinsi boneka kolonial Indonesia.

Pembangunan, yang dalam pandangan penguasa Indonesia sebagai upaya menyejahterahkan rakyat Papua, pada kenyataannya oleh rakyat Papua bukanlah pembangunan manusia seutuhnya melainkan praktik kolonialisme modern yang dilakukan melalui kultur militer dan kekerasan. Ingat! UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 tidak menjadi suatu rujukan bagi resolusi konflik melainkan resolusi pembangunan yang tidak menyelesaikan akar konflik Papua. Otsus merupakan upaya pemerintah untuk menghindari atau menyembunyikan akar konflik dan memperpanjang penderitaan rakyat dan bangsa Papua Barat.

Kepemimpinan Prabowo Subianto ke depan harus mengambil langkah-langkah konkrit, strategis, konstruktif, dialogis untuk mengakomodasi penyelesaian akar konflik Papua Barat yang kronis dengan melibatkan pihak ketiga yang netral di tempat yang netral. Contoh kasus, pemerintah sudah menjadikan GAM sebagai mitra dialog di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Pendekatan

ini masih relevan karena persoalan konflik Papua Barat sudah berdimensi internasional.

Akhirnya, saya mau sampaikan bahwa Indonesia menduduki dan menjajah bangsa Papua Barat sudah mencapai 63 tahun sejak 19 Desember 1961 sampai sekarang, tetapi ideologi dan nasionalisme rakyat Papua Barat tetap hidup, terus bertumbuh dan berakar kuat. Ideologi dan nasionalisme bangsa Papua Barat itu terbukti dengan dari waktu ke waktu rakyat dan bangsa Papua Barat menuntut pengakuan 1 Desember 1961 sebagai Hari Kemerdekaan yang dianeksasi oleh Indonesia melalui Maklumat Trikora 19 Desember 1961. Fakta-fakta ini sudah dijelaskan dalam buku ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus. 2000. *Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: ELSAM.
- Al Rahab, Amiruddin. 2010. *Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Alatas, 1988. *Mitos Pribumi Malas: Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonial*. Jakarta : Lembaga Peneli-tian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan sosial (LP3ES).
- Dingit, Loir Botor. 1999. *Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat: Ke pastian Hukum Kawasan Tamah Adat, dalam Sandra Kartika, Candra Gautama. Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haluk, Markus, dkk. 2020. *Frans Lieshout OFM: Gurudan Gembala Papua: Kesaksian Tokoh Gereja, Sahabat, Keluarga, dan 'Anak Cucu Rohani'*. Jayapura: SKPKC Fransiskan Papua.
- Hendrowinoto, Nurinwa Ki S. 1998. *Acub Zainal: I Love The Army*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kusumaryati, Veronika. 2018. *Ethnography of Colonial Present: Histo ry, Experience, And Political Consciousness in West Papua*. Dis-ertasi tak diterbitkan, Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences.
- Lieshout, Frans OFM. 2019. *Kebudayaan Suku Hubula Lembah Balim-Papua*. Jakarta: Tollelegi.
- Subroto, Hendro. 2009. *Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Praju rit Para Komando*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas..
- Rumkabu, Elvira, dkk. 2021. *Marginalisasi dan De-Marginalisasi Papua: Sebuah Dialog Panjang*. Malang: Pusat Studi Budaya dan Laman Batas.

- Sutrisno, Mayon. 2001. Arus Pusaran Sukarno: Roman Zaman Pergerakan. Jakarta: Taramedia.
- Broek, Theo Van den. 2020. Tuntut Martabat, Orang Papua Dihukum: Potret Politik Rasisme di Tanah Papua 2019. Jayapura: SKPKC Fransiskan Papua.
- Widjojo S. Muridan. 2010. Papua Road Map: Negotiating the Past, Im proving the Present and Securing the Future. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Wayoi, Hermanus. 1999. Irian Jaya Masih dalam Status Tanah Jajahan: Mengungkap Hati Nurani Rakyat Papua, makalah tidak dipublikasikan.
- Yoman, Socratez S. 2012. Otonomi Khusus Papua Telah Gagal. Jayapura: Cenderawasih Press.
- _____. 2007. Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah kebiasaan Sejarah Kekerasan di Papua Barat. Jogjakarta: Galang Press.
- _____. 2010. Kita Meminum Air Dari Sumur Kita Sendiri. Jayapura: Cenderawasih Press.
- _____. 2010. Integrasi Belum Selesai. Jayapura: Cenderawasih Press. .2020. Melawan Rasisme dan Stigma di Tanah Papua. Denpas-ar: Pustaka Larasan
- _____.2021. Jejak Kekerasan Negara dan Militerisme di Tanah Papua: Kumpulan Catatan Seorang Gembala. Denpasar: Pustaka Larasan.
- _____.2021. Kami Bukan Bangsa Teroris: Tentang Dewan Gereja Papua Menolak Label Teroris dan Catatan Gembala Lainnya. Den-pasar: Pustaka Larasan.